



INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

*Hendra Fatubun, Ezrom Batorinding,
Jhonal Thio, Roni Bawole, Aser Rouw,
Pudja Mardi Utomo, Maria Irene Arim*

Editor
*Charlie D. Heatubun
Max J. Tokede*

INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Hendra Fatubun, S.Hut
Ezrom Batorinding, S.Hut., M.Sc
Jhonal Thio, SP
Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si
Dr. Aser Rouw, SP., M.Si
Dr. Pudja Mardi Utomo, MP
Maria Irene Arim, SP.,M.Sc

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lt. 2 dan 3
Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari
Papua Barat 98312

INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Editor

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun , S.Hut., M.Si
Ir. Max J. Tokede. MS.

Desain Cover

Ferdian Mahendra Hamzah

Diterbitkan dan Dicetak oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

ISBN

978-623-93246-7-4



Dicetak dengan Pembiayaan Anggaran

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
Provinsi Papua Barat Tahun 2020

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- I. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan / atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- II. Pengandaan Ciptaan dan / atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- III. Pengandaan Ciptaan dan / atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- IV. Penggunaan untuk kepentingan Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mungkin suatu Ciptaan dan / atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produsen Fonogram atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan karuniaNya sehingga kami Tim Penulis dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat dapat menyelesaikan penyusunan buku **Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat**.

Buku ini disusun berdasarkan laporan hasil kegiatan Inventarisasi Inovasi Daerah yang merupakan program rutin unggulan pada Balitbangda Provinsi Papua Barat yang telah dilakukan dan dibiayai pada Tahun Anggaran 2019. Buku ini memuat informasi tentang inovasi-inovasi di Provinsi Papua Barat, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu *informasi umum*, *deskripsi inovasi* dan *kualitas inovasi*. Kategori informasi umum terdiri kelompok sumber inovasi, instansi penghasil inovasi, fokus bidang riset nasional, kategori riset dan kategori area inovasi. Sedangkan kategori deskripsi inovasi terdiri dari nama inovasi, lembaga inventor, bentuk inovasi dan kegunaan inovasi. Selain itu, buku ini juga memuat sintesa tentang kebaruan inovasi, tantangan dan solusi penciptaan inovasi, serta rekomendasi bagi upaya peningkatan penciptaan dan penerapan inovasi di Provinsi Papua Barat.

Harapan kami semoga dengan penerbitan buku ini, dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua pihak terutama pihak pengguna inovasi, baik pemerintah daerah dan parapihak lainnya untuk memanfaatkan dan mengembangkan semaksimal mungkin demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Disamping itu, dapat menginspirasi para pembaca untuk terus berinovasi dan berkarya dalam memberikan pelayanan yang terbaik demi kemajuan Provinsi Papua Barat, bangsa dan negara.

Pada kesempatan ini ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat yang telah mendukung, membantu dan mengizinkan kami untuk terlibat sejak awal dalam proses penelitian hingga penulisan dan penyelesaian buku

ini. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada Kepala Sub Bidang Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbang Balitbangda Provinsi Papua Barat, para penyunting, Tim Media Balitbangda Provinsi Papua Barat dan semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi terhadap penyelesaian buku ini. Akhirnya kami menyadari bahwa karya buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan dari para pembaca sangat dibutuhkan demi penyempurnaan karya ini. Sekian dan Terima Kasih.

Manokwari, 10 Oktober 2020

Tim Penulis

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah masih tergolong sangat muda usia di Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat. Balitbangda terbentuk di awal tahun 2017 yang lalu dan memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Keberadaan Balitbangda selain mampu memberikan saran-saran dan rekomendasi taktis kepada internal pemerintah daerah, juga diharapkan mampu menciptakan inovasi yang berdaya saing dalam mendukung pelaksanaan pembangunan melalui penyediaan data dan informasi ilmiah hasil-hasil kelitbangan dan inovasi yang berkualitas dan bermanfaat. Buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi peran Balitbangda dalam menunjang dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.



Penerbitan buku “***Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat***” merupakan salah satu hasil riset yang telah dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat pada tahun 2019. Buku ini dapat berfungsi sebagai penyedia sumber data dan informasi terkait inovasi yang dihasilkan di Provinsi Papua Barat. Potensi inovasi di Provinsi Papua Barat cukup tinggi karena memiliki lembaga sumber inovasi, yaitu Perguruan Tinggi (Universitas Papua dan Perguruan Tinggi Swasta) dan lembaga riset termasuk Balitbangda dan beberapa UPT Kementerian/Lembaga. Papua Barat membutuhkan inovasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif guna meningkatkan kinerja pembangunan dan daya saing daerah serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat luas sesuai amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Pasal 4, 39, 44; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017. Disamping itu, inovasi

perlu dikembangkan dalam mendukung kebijakan-kebijakan strategis yang mampu memberikan percepatan pembangunan terutama pembangunan ekonomi yang sangat dibutuhkan di Provinsi Papua Barat.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya monumental ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan juga dapat memberikan inspirasi bagi semua pihak terutama pada lembaga-lembaga riset untuk terus menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat.

Manokwari, 10 Oktober 2020
Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Penerbit	
Kata Pengantar	
Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Inovasi Alat Kemajuan Daerah dan Bangsa	10
1.2. Area Inovasi dan Sektor Publik	14

BAB II STRATEGI DAN ARAH PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

2.1. Strategi Rencana Induk Riset Kelitbangan	22
2.1.1. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Lembaga	25
2.1.2. Penguatan Kapasitas Riset dan Pengembangan Teknologi Berbasis Kebutuhan Daerah	26
2.1.3. Diseminasi, Hilirisasi dan Pemasaran Produk Riset	31
2.2. Posisi Riset Kelitbangan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat 2017-2022	32
2.3. Kondisi Riset Papua Barat dan Lingkungan Strategis	34
2.3.1. Posisi Riset, Iptek dan Inovasi Daerah	34
2.4. Sumber Daya Iptek Daerah	35
2.4.1. Sumber Daya Manusia	35
2.4.2. Anggaran	38
2.5. Dinamika Kebijakan Riset dan Iptek (Peraturan)	39
2.6. Fungsi dan Peran Strategis Kelitbangan	41
2.7. Kelembagaan dan Sinergi Riset	42
2.8. Kerangka Riset	42

BAB III

INOVASI DI PROVINSI PAPUA BARAT

3.1. Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat.....	46
3.2. Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Kelompok Sumber Inovasi Kabupaten/Kota di Papua Barat.....	47
3.3. Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Instansi di Papua Barat.....	49
3.4. Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Fokus Bidang Riset Nasional di Papua Barat.....	53
3.5. Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Kategori Riset.....	55
3.6. Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Area Inovasi.....	57
3.7. Deskripsi Inovasi.....	63
3.8. Penilaian Kualitas Inovasi	71
3.9. Aplikasi (Penerapan) Inovasi.....	73
3.10. Penciptaan Inovasi di Papua Barat.....	75
3.11. Tantangan dan Upaya Penciptaan Inovasi di Papua Barat	85

BAB IV

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PROFIL SINGKAT PENULIS



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Inovasi Alat Kemajuan Daerah dan Bangsa

Tidak ada satu negarapun di dunia yang maju tanpa dukungan inovasi. Inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, inovasi mutlak diperlukan bagi penciptaan daya saing suatu negara. Pemerintah mendorong setiap daerah untuk melakukan inovasi. Pemerintah mengharapkan bahwa visi inovasi daerah ke depan harus dapat mewarnai gerakan pembangunan dengan filosofi inovasi dapat memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*) dan memangkas waktu yang panjang (*cut off the time*).

Gagasan tentang inovasi di daerah telah diamanatkan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 386 yang bermakna bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Sebelumnya pada tahun 2012 secara operasional, inovasi daerah ditetapkan melalui Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Pertimbangan dikeluarkannya peraturan bersama ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam peraturan bersama tersebut, inovasi dimaksud adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Inovasi merupakan faktor penting untuk mendukung daya saing daerah. Langkah-langkah inovasi merupakan rangkaian elaboratif guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi di daerah. Inovasi disadari tidak dapat berjalan secara sporadis dan parsial, harus merupakan kolaborasi antar aktor-aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem inovasi.

Peraturan bersama tersebut memberikan pengertian sistem inovasi daerah sebagai keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Keseluruhan proses tersebut tertuang dalam kebijakan-kebijakan penguatan sistem inovasi daerah, dalam bentuk kebijakan nasional yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga dalam rencana strategis lima tahunannya.

Pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota, Gubernur menetapkan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota. Kebijakan Gubernur, Bupati/Walikota tertuang dalam *roadmap* penguatan sistem inovasi daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Rendahnya daya saing daerah menyebabkan tingginya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pelayanan publik tidak optimal, sumber daya manusia kurang kompetitif, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Beberapa faktor utama penghambat daya saing di Indonesia berdasarkan hasil kajian dari *World Economic Forum* adalah masalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, akses terhadap pembiayaan, dan inflasi. Jika kondisi ini terus berlanjut tentu akan berdampak terhadap daya saing nasional yang akan mengganggu kemampuan Indonesia bersaing dalam percaturan dunia. Diperlukan inovasi yang dapat dijadikan dasar kuat untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing tidak hanya di tingkat nasional (antar daerah) melainkan juga di tingkat dunia (global).

Dalam *Global Innovation Index* (GII), posisi Indonesia menduduki peringkat ke-85 dari 129 negara. Bahkan dalam lingkup negara ASEAN, Indonesia jauh di bawah Brunei (Tabel 1.1).

TABEL 1.1. POSISI NEGARA ASEAN DI INDEKS INOVASI DUNIA 2019

RANGKING 2019	NEGARA	RANKING 2018	PERUBAHAN
8	Singapura	5	-3
35	Malaysia	35	0
42	Vietnam	45	3
43	Thailand	44	1
54	Filipina	73	19
71	Brunei	67	-4
85	Indonesia	85	0
98	Kamboja	98	0

Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi semata, tetapi lebih pada kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif guna bersaing dengan daerah lainnya di era global (*Global Competitiveness*). Tingkat daya saing (*competitiveness*) antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan “ujung tombak” bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global.

Kunci peningkatan daya saing daerah adalah jika semua daerah bergerak melakukan inovasi di daerahnya masing- masing melalui perangkat daerah yang ada. Sepenggal kalimat itulah yang menjadi fokus arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Malam Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2018. Namun sayangnya Papua Barat tidak masuk dalam daftar penilaian tersebut karena belum mengusulkan inovasi unggulan daerahnya.

Laporan peringkat daya saing regional Indonesia tahun 2017 yang dipublikasikan *Asian Competitiveness Institute* menunjukkan bahwa lima provinsi dengan peringkat daya saing terbaik adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan daerah yang peringkat daya saingnya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, NTT dan Maluku. Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam pertumbuhan dan hasil pembangunan. Papua Barat membutuhkan inovasi bagi peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif guna meningkatkan kinerja pembangunan dan daya saing Papua Barat sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014; UU No 21 Pasal 4, 39, 44; PP No 38 Tahun 2017.

Potensi inovasi Papua Barat cukup tinggi karena Papua Barat memiliki lembaga sumber inovasi, yaitu Perguruan Tinggi (UNIPA dan PTS) dan Lembaga Riset (BALITBANGDA, BPTP dan BP2LHK) yang selama ini sudah banyak menghasilkan inovasi yang berdaya saing. Demikian halnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu dituntut menghasilkan dan menggunakan inovasi bagi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam konteks memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*), dan memangkas waktu (*cut off the time*) pelayanan publik.

Pemahaman akan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan inovasi yang ada di Papua Barat, akan sangat membantu Pemda Provinsi Papua Barat untuk dapat menilai posisinya dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dapat menyediakan data input inovasi bagi penilaian daya saing Papua Barat, dan upaya mendorong budaya inovasi penciptaan inovasi di Papua Barat.

Selain itu, Papua Barat dapat merencanakan dan melaksanakan riset inovasi secara efisien dan efektif, sekaligus dapat mensinergikan pelaksanaan riset inovasi oleh perguruan tinggi dan lembaga riset di Papua Barat. Di mana upaya ini telah diwadahi secara hukum melalui Peraturan Daerah Kelitbangan dan Inovasi Daerah Papua Barat, yang sudah di inisiasi sejak tahun 2018.

Sebagai langkah awal bagi Provinsi Papua Barat guna menata sistem inovasi daerah adalah penting untuk mengetahui sejauhmana inovasi yang telah dihasilkan, bahkan telah digunakan dalam konteks pelayanan publik, maupun penciptaan nilai tambah produk bagi penciptaan daya saing Papua Barat. Untuk itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat pada bulan Juni – Desember 2019 melakukan kajian untuk mengungkapkan inovasi daerah yang terdapat di Provinsi Papua Barat. Fokus kajian adalah inovasi yang dihasilkan baik oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Papua Barat. Wilayah kajian mencakup Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, meliputi: Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Manokwari Selatan.

1.2. Area Inovasi dan Sektor Publik

Inovasi merupakan istilah yang telah dipakai secara luas dalam berbagai bidang, baik industri, pemasaran, jasa dan pertanian. Secara sederhana, inovasi adalah *an innovation is an idea or object perceived as new by an individual* (Adams, 1988). Dalam perspektif pemasaran, inovasi adalah suatu ide, praktek atau produk yang dianggap baru oleh individu atau grup yang relevan. Ada juga yang mengartikan inovasi sebagai barang, jasa, dan ide yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam perspektif pemasaran, Simamora (2003) menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, praktek, atau produk yang dianggap baru oleh individu atau grup yang relevan. Definisi yang lebih lengkap adalah ide, metode atau objek yang dianggap baru oleh individu, tetapi tidak selalu merupakan hasil penelitian terbaru (*an innovation is an idea, method, or object which is regarded as new by individual, but which is not always the result of recent research*) (Van Den Ban dan Hawkins, 1996). Dari beberapa definisi tersebut, inovasi mempunyai tiga komponen, yaitu (a) ide atau gagasan, (b) metode atau praktek, dan (c) produk barang dan jasa.

Tiga komponen tersebut harus mempunyai sifat “baru”. Sifat “baru” tersebut tidak selalu berasal dari hasil penelitian mutakhir. Hasil penelitian yang telah lalu pun dapat disebut inovasi, apabila diintroduksikan kepada masyarakat ataupun seseorang yang belum pernah mengenal sebelumnya. Jadi, sifat “baru” pada suatu inovasi harus dilihat dari sudut pandang pengguna, bukan kapan inovasi tersebut dihasilkan.

Inovasi dapat dikelompokkan kedalam lima area, yakni inovasi administrasi, inovasi manajemen, inovasi kebijakan, inovasi sosial, dan inovasi teknologi, sebagaimana diperlihatkan pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1. Lima area inovasi (Saksono; Jurnal Inovasi, Vol. 15, No. 2 – Oktober 2018:113)

Sektor publik biasanya tertinggal dari sektor bisnis karena sektor bisnis selalu mendasari kinerjanya dengan inovasi. Ketertinggalan ini sudah lama dilaporkan oleh Stev Kelman bahwa tulisan-tulisan mengenai khazanah keilmuan organisasi pada awalnya didasarkan atas pengalaman empirik

organisasi. Kemudian ketika Weber menulis tentang ilmu organisasi (birokrasi), diantaranya yang menjadi patokannya adalah organisasi publik atau pemerintah dan bukan organisasi yang bergerak di sektor bisnis. Tulisan pertama Herbert Simon pada tahun 1937 adalah juga mengenai kinerja pemerintah kota, termasuk tulisan terkenalnya berjudul *Publik Administration* pada tahun 1950. Demikian pula halnya dengan Philip Zelsnick yang menulis judul *the new deal Tennessee valley authority in TVA and grass roots* pada tahun 1953.

Namun demikian dalam perkembangannya, keilmuan organisasi lebih berkembang dan lebih dinamis di disiplin ilmu sektor bisnis. Disiplin ilmu organisasi publik yang semula menjadi pionir, kini lebih banyak sebagai murid dengan mengadopsi berbagai konsep organisasi bisnis. Sebagai contoh ide Osborne dalam tulisannya *Reinventing Government* pada tahun 1990-an, yang banyak memperkenalkan dan memasukkan ideologi bisnis kedalam sektor publik.

Pentingnya inovasi di sektor publik juga diakui oleh *United Nations of Economic and Social Affairs* (UNDESA) dengan memunculkan penghargaan *United Nations Publik Service Awards* tahun 2003. Penghargaan ini dirancang untuk meningkatkan peran, *professionalism*, dan *visibility* dari pelayanan publik dengan tiga kategori dasar, yaitu: transparansi dan akuntabilitas, perbaikan pelayanan publik, dan aplikasi ICT atau (*e-governement*).

Dalam konteks pelayanan publik, pengertian inovasi disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dengan merujuk pada pengertian inovasi sebagai (a) ide atau gagasan, (b) metode atau praktik, dan (c) produk (barang dan jasa) atau semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana menurut Peraturan

Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2017, maka sebuah inovasi memiliki beberapa atribut penting (Halvorsen dan Thomas, 2005), yaitu:

1. Keunggulan relatif (*Relative Advantage*)

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dari inovasi sebelumnya. Selalu ada nilai kebaruan yang melekat dalam nilai inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

2. Kesesuaian (*Compatibility*)

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Dengan sifat yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dari inovasi sebelumnya. Namun demikian karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah yang penting.

4. Kemungkinan dicoba (*Triability*)

Inovasi hanya diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. Kemudahan diamati (*Observability*)

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana inovasi itu bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Dari atribut yang ada, maka sebuah inovasi merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun demikian inovasi mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama di tempat lain.

Karakteristik inovasi di sektor publik berbeda dengan inovasi di sektor bisnis. Perbedaan ini terlihat di matriks berikut.

KARAKTERISTIK	SEKTOR BISNIS	SEKTOR PUBLIK
Prinsip Pengorganisasian	Upaya memperoleh profit, stabilitas atau pertumbuhan pendapatan pasar yang terus berubah	Penegakkan kebijakan publik kebijakan baru dan atau yang berubah karena siklus politik
Struktur Organisasi	Ukuran organisasi yang bervariasi, perusahaan besar biasanya mengalokasi dana khusus untuk inovasi	Sistem organisasi yang kompleks, kadang konflik satu sama lain inovasi harus disesuaikan dengan situasi kompleks, termasuk isu sosial <i>equity</i> dan efisiensi ekonomi
Ukuran Kinerja	Return On Investment (RoI) Inovasi memakan biaya besar, oleh karenanya biasa dihitung dari selisih keuntungan penjualan	Indikator dan target kinerja yang banyak keuntungan dari inovasi sangat sulit diukur
Isu Manajemen	Beberapa manajer mempunyai otonomi, beberapa lainnya dibatasi oleh <i>shareholder</i> , <i>corporate goverance</i> dan atau keuangan inovasi berhubungan dengan pengambilan resiko	Kebanyakan manajer berada dalam situasi tekanan warga negara <i>Costumer relation</i> tidak terbangun dengan baik. Inovasi biasanya tidak didorong oleh faktor <i>end-users</i>
Hubungan dengan end-users	Pasar adalah sebagai konsumen dan juga industri. <i>Feedback</i> dari pasar mendorong ide/inovasi inovasi dimotivasi oleh kebutuhan menjaga hubungan dengan pasar	<i>End-users</i> adalah masyarakat, secara tradisional adalah warga negara <i>Costumer relation</i> tidak terbangun dengan baik. Inovasi biasanya tidak didorong oleh faktor <i>end-users</i>

KARAKTERISTIK	SEKTOR BISNIS	SEKTOR PUBLIK
Rantai <i>Supply</i>	Kebanyakan perusahaan merupakan bagian dari rantai <i>supply</i> yang lebih besar. Inovasi yang dihasilkan perusahaan kecil biasanya kalah oleh perusahaan besar karena biasanya kalah dalam hal dukungan dana	Sektor publik biasanya bergantung pada sektor bisnis dalam pengadaan barang dan jasa sektor publik menentukan standar, sektor bisnis menawarkan inovasi
SDM	Motif ekonomi pegawai didorong untuk membuat perbaikan atas produk yang dihasilkan	Motif idealis inovasi kadang dilihat sebagai ancaman, kadang juga dilihat sebagai adopsi untuk perbaikan pelayanan publik.
Sumber Pengetahuan	fleksibel dan luas, mulai dari konsultan, asosiasi perdagangan, dan peneliti sektor publik inovasi bervariasi	Sumber pengetahuan sangat banyak. Relatif kaku, hanya beberapa bagian dari sektor publik yang memanfaatkan Universitas. Jenis inovasi di beberapa bagian berbeda
Horizon Waktu	Kebanyakan <i>short-term</i> , inovasi memerlukan pembayaran secepatnya	Kebanyakan <i>long-term</i> , kesulitan dalam mengetahui konsekuensi dari sebuah inovasi



BAB II

STRATEGI DAN ARAH PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

2.1. Strategi Rencana Induk Riset Kelitbangan

Arah pengembangan kebijakan dan strategi kelitbangan daerah berhubungan dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang-bidang prioritas kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan IPTEKS dalam sektor produksi guna menumbuhkan perekonomian daerah yang berdampak pada pembangunan nasional. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya, secara nyata kelitbangan Papua Barat didorong untuk memperkuat fokus litbang yang telah ada dalam mendorong hasil riset daerah, sinergis dengan litbang yang ada di Provinsi Papua Barat, serta mendukung hilirisasi produk. Disamping itu, kelitbangan dapat menguatkan dukungan bagi pengembangan *science technology park*, dan mendukung dalam pemantapan sistem inovasi nasional. Oleh sebab itu, kebijakan dan strategi kelitbangan Papua Barat diarahkan pada pengembangan kapasitas, kapabilitas dan kontinuitas dengan berbagai tema riset (Tabel 2.1).

TABEL 2.1. TEMA RISET BERDASARKAN ISU STRATEGIS DAN SASARAN

No	Isu Strategis	Sasaran	Tema Riset
1	Penurunan Indeks Gini	Mengembangkan riset IPTEK untuk mendukung percepatan penurunan indeks gini pada setiap kabupaten/kota dengan sasaran menurunnya gap distribusi pendapatan antara golongan pendapatan tinggi dengan golongan pendapatan rendah baik yang ada di perkotaan maupun perdesaan, dan terpenuhinya distribusi pendapatan yang merata baik antar kabupaten/kota maupun desa dan kota.	Peningkatan pendapatan bagi masyarakat perdesaan melalui kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya lokal dan membuka akses pasar.

TABEL 2.1. TEMA RISET BERDASARKAN ISU STRATEGIS DAN SASARAN

No	Isu Strategis	Sasaran	Tema Riset
2	Penanggulangan Kemiskinan	Mengembangkan riset IPTEK untuk mendukung percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran menurunnya jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin.	Penanggulangan feminisasi kemiskinan, penanggulangan kerentanan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan bagi warga miskin serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
3	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Mendukung peningkatan ketersediaan pangan masyarakat, penyerapan pangan, akses pangan dan revitalisasi pertanian	ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan dan pemanfaatan pangan, termasuk di dalamnya infrastruktur pertanian.
4	Kelembagaan Usaha dan UMKM	Mengembangkan riset IPTEK untuk mendukung posisi tawar dan efisiensi serta penguatan kelembagaan usaha dan UMKM, yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan kualitas koperasi dan UMKM, meningkatnya jumlah wirausaha baru, meningkatnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.	peningkatan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemasaran hasil dan UMKM.
5	Investasi, Industri dan Perdagangan	Mengembangkan riset IPTEK untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif, meningkatnya ijin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, serta investasi daerah, meningkatnya kontribusi sektor industri, meningkatnya kunjungan wisata dan kualitas seni budaya lokal serta meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri	Peningkatan investasi, kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

TABEL 2.1. TEMA RISET BERDASARKAN ISU STRATEGIS DAN SASARAN

No	Isu Strategis	Sasaran	Tema Riset
6	Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Mengembangkan riset IPTEK untuk mendukung perbaikan sistem pengelolaan, pendayagunaan, konservasi dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, sumber daya air, daerah aliran sungai, pertanian dan hutan, wilayah pesisir dan laut dan sumber daya alam lainnya. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang, tersusunnya konsep dan langkah pengurangan resiko bencana sesuai jenis ancaman bencana dan lokasi geografis wilayah serta terwujudnya sistem penanggulangan bencana berbasis komunitas.	Peningkatan kualitas hidup, penataan ruang dan kebencanaan.
7	Menata dan Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Mengembangkan riset IPTEK untuk mendukung pengembangan SIDA Provinsi Papua Barat	Lokal bisnis berbasis berkelanjutan.
	Kinerja Aparatur Pemerintah (OPD, DPRPB, MRPB)		
	Diseminasi	Penerbit press	

Kelitbangan Papua Barat berdasarkan pada tiga pilar utama, yaitu: (a) peningkatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga dalam menyerap berbagai informasi dan teknologi riset dari luar; (b) kemampuan riset dan pengembangan teknologi berbasis kebutuhan daerah tetapi bertaraf internasional, dan (c) kemampuan mendiseminasikan hasil-hasil riset berkualitas dan bertaraf internasional dan hilirisasi riset dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengembangan kebijakan dan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas keunggulan kelitbangan, kapasitas inovatif dan meningkatnya daya saing produk yang dihasilkan. Selanjutnya, arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Lembaga

Tata kelola dan akuntabilitas lembaga diwujudkan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan keberlanjutan kelitbangan sehingga mampu menyerap berbagai informasi perkembangan teknologi riset. Strategi pengembangan kelitbangan dilaksanakan sebagai upaya terwujudnya arah kebijakan kelitbangan Papua Barat, yang diuraikan berikut ini:

1. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Organisasi. Strategi dalam meningkatkan mutu tata kelola organisasi, ketersediaan prosedur baku, alur manajemen, implementasi prosedur dan sistem manajemen internal lembaga.
2. Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia (SDM). Pengembangan kompetensi SDM didorong untuk menjaga rasio keunggulan SDM yang ada baik dari tingkat pendidikan maupun keahlian fungsional sesuai dengan fokus unggulan lembaga.
3. Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana. Dukungan sarana dan prasarana ini mencakup peningkatan ketersediaan, kalibrasi, dan upaya pemanfaatan sarana prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja lembaga (berupa produk dan layanan).
4. Penguatan Tata Kelola Anggaran. Kompetensi pengelolaan anggaran diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang mencakup manajemen anggaran dan kompetensi pengelola anggaran.
5. Sistem Penjaminan Mutu Kelitbangan (Akreditasi, Standardisasi dan Sertifikasi, ISO). Mutu lembaga litbang menjadi indikator kualitas lembaga. Oleh karena itu, perolehan jaminan mutu lembaga menjadi prioritas yang harus dicapai. Perolehan mutu lembaga ini mencakup perolehan akreditasi manajemen, standardisasi proses dan sertifikasi kelayakan produk unggulan.

6. Pengembangan Jaringan dan Akses Informasi. Peningkatan luasan jaringan dan akses informasi dibutuhkan untuk meningkatkan keberterimaan lembaga dalam lingkungan inovasinya. Luasan jaringan informasi lembaga mendorong sinergi kerjasama dengan lembaga lain. Sementara kemudahan lembaga dalam mendapatkan akses informasi akan memacu keberterimaan produk unggulan lembaga berbasis *demand driven* yang dibutuhkan.
7. Pengembangan Jejaring Lembaga. Menguatnya jejaring lembaga ini mencakup menguatnya posisi strategis lembaga pada lingkungan kerjasamanya. Beberapa *output* yang terlihat dari berkembangnya jejaring lembaga antara lain undangan sebagai pembicara dan pemakalah dalam konferensi seminar nasional dan internasional serta kunjungan lembaga internasional.

2.1.2. Penguatan Kapasitas Riset dan Pengembangan Teknologi Berbasis Kebutuhan Daerah

Peningkatan kemampuan riset dan teknologi ditujukan untuk mendayagunakan potensi unggulan komoditi daerah tetapi memiliki pangsa pasar global. Komoditi lokal dari berbagai sektor basis (pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan dan kelautan) seperti sagu, kayu dan hasil hutan bukan kayu, ekstraksi bahan hayati, dan *bio-prospecting (biodiversity)*. Fokus riset dan pengembangan lembaga diarahkan pada tingkat riset yang menghasilkan produk massal dengan orientasi pasar. Kegiatan riset yang bersifat invensi dan penemuan (penelitian dasar dan pengembangan) akan dikerjasamakan dengan lembaga litbang yang ada di Papua Barat atau mitra lain yang kompeten.

Strategi penguatan kapasitas riset dan pengembangan berbasis kebutuhan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan fokus riset di bidang sektor basis (pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, peternakan) seperti sagu, kayu dan hasil hutan bukan kayu, ekstraksi bahan hayati, dan *bio-prospecting (biodiversity)*.

Lembaga litbang diharuskan mampu menyusun rumusan strategi dalam memperkuat fokus riset. Oleh karenanya, rumusan strategi implementasi penguatan SDM dalam pelaksanaan riset menjadi hal pokok yang diperlukan. Penguatan fokus riset juga dilakukan dengan menerapkan *roadmap* riset berdasarkan bidang program lembaga. Fokus riset diuraikan berdasarkan produk unggulan kabupaten/kota (Balitbangda Papua Barat, 2017) sebagai berikut:

- a. Di Kabupaten Fakfak: pada sub sektor pangan dan hortikultura adalah: durian, ubi jalar, pisang, keladi, dan kacang panjang; pada sub sektor perkebunan adalah: pala, kelapa, cengkeh, pinang, dan sagu; pada subsektor peternakan adalah: sapi potong, ayam potong, ayam kampung, kambing, dan bebek; pada sub sektor kehutanan adalah: kayu merbau (besi), kayu matoa, bambu, damar/kayu gaharu dan rotan; pada sub sektor perikanan adalah: ikan cakalang, ikan merah, ikan tenggiri, dan kembung.
- b. Di Kabupaten Kaimana: pada sub sektor pangan dan hortikultura adalah: pisang dan keladi; pada sub sektor perkebunan adalah: kelapa, pala, pinang, sagu, dan kakao; pada sub sektor peternakan adalah: babi, sapi potong, kambing, ayam kampung, dan ayam potong; pada sub sektor kehutanan adalah: kayu merbau (besi), kayu matoa, gaharu, masohi dan kayu jati mas; pada sub sektor perikanan: tenggiri, udang, ikan kakap merah, cakalang dan kepiting.
- c. Di Kabupaten Teluk Wondama: pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: pisang, ubi jalar, ubi kayu, dan keladi; pada sub sektor perkebunan adalah: sagu, kelapa dan pala; pada sub sektor peternakan adalah: ayam kampung, babi, sapi potong, kambing dan ayam potong; pada sub sektor kehutanan adalah: kayu besi, kayu matoa, kayu putih, kayu dragon dan kayu binuang; pada sub sektor perikanan adalah: lobster, ikan kerapu, ikan cakalang, teripang, dan kakap merah.

- d. Di Kabupaten Teluk Bintuni: pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: padi sawah, rambutan, durian, ubi kayu, dan ubi jalar; pada sub sektor perkebunan adalah: sagu, pala, coklat, kelapa, pinang, dan buah merah; pada subsektor peternakan adalah: sapi potong, babi, ayam kampung, kambing dan ayam petelur; pada subsektor kehutanan adalah: kayu besi, kayu matoa, kayu cempaka, kayu gaharu, dan rotan; pada sub sektor perikanan adalah: udang, ikan conggeh, ikan sembilan dan ikan merah.
- e. Di Kabupaten Sorong Selatan: pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: kacang panjang, keladi, ubi jalar, ubi kayu dan kangkung kolam; pada sub sektor perkebunan adalah: sagu, kelapa, pinang, kakao, dan kelapa sawit; pada sub sektor peternakan adalah: ayam kampung, babi, sapi potong, ayam potong, dan kambing; pada subsektor kehutanan adalah: kayu besi, matoa, gaharu, dan kayu susu; pada sub sektor perikanan adalah: udang, kepiting, ikan merah dan ikan sembilan.
- f. Di Kabupaten Raja Ampat: pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: ubi jalar, pisang, keladi, ubi kayu dan tomat; pada subsektor perkebunan adalah: kelapa, kakao, sagu, pinang, dan pala; pada subsektor peternakan adalah: ayam kampung, sapi potong, ayam potong, kambing, bebek dan babi; pada subsektor kehutanan adalah: kayu besi, kayu matoa, kayu linggua, kayu bintanggurr dan dammar; pada subsektor perikanan adalah: ikan kerapu, ikan tenggiri, ikan puri, ikan cakalang dan ikan ekor kuning.
- g. Di Kabupaten Tambrauw: pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: keladi, ubi jalar, beberapa jenis pisang, dan ubi kayu; pada subsektor perkebunan adalah: kelapa, siri, pinang, kakao, sagu, dan tebu; pada subsektor peternakan adalah: sapi potong, babi, ayam kampung, kambing dan bebek; pada subsektor kehutanan: kayu besi, kayu matoa, kayu putih, damar, kayu linggua, rotan, bambu, kayu palaka, dan kayu dragon; pada subsektor perikanan adalah: ikan bubara, ikan cakalang, ikan merah, ikan tenggiri, ikan mujair, lobster, ikan lele, ikan gabus, ikan sembilan, dan belut.

-
- h. Di Kabupaten Maybrat: pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: kacang panjang, keladi, kacang tanah, cabai rawit dan sawi; pada subsektor perkebunan adalah: kakao, sagu, buah merah, pinang, sirih dan kelapa; pada subsektor peternakan adalah: ayam kampung, sapi potong, kambing dan ayam potong; pada subsektor kehutanan: kayu besi, kayu meranti, rotan, kayu matoa, kulit lawang; pada subsektor perikanan adalah: ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan mujair dan gabus.
 - i. Di Kabupaten Pegunungan Arfak: pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: bawang daun, wortel, labu siam, kentang, ubi jalar, dan nenas; pada subsektor perkebunan adalah: kopi dan buah merah; pada subsektor peternakan adalah: babi, ayam kampung, dan sapi potong; pada subsektor kehutanan adalah: kayu besi, jenis kayu besi, kayu cina dan kayu cemara; pada subsektor perikanan adalah: ikan mujair dan ikan mas.
 - j. Di Kota Sorong: pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: kacang panjang, keladi, kacang tanah, cabai rawit dan sawi; pada subsektor perkebunan adalah: kelapa dan pinang; pada subsektor peternakan adalah: sapi, ayam potong, ayam petelur, babi dan ayam buras; pada subsektor kehutanan: kayu besi, jenis kayu besi, kayu cina dan kayu cemara; pada subsektor perikanan adalah: ikan cakalang, ikan tenggiri, ikan tuna, ikan kerapu dan ikan kakap/ikan merah.
 - k. Di Kabupaten Manokwari: pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: keladi, sukun, padi, kedelai dan kacang tanah; pada subsektor perkebunan: pinang, kakao, kelapa sawit, kelapa dalam dan cengkeh; pada subsektor peternakan adalah: ayam pedaging, babi, ayam petelur dan ayam kampung; pada subsektor kehutanan: kayu besi, kayu linggua dan kayu matoa; pada subsektor perikanan adalah: ikan layang, bambangan, tuna, dan kerapu.
 - l. Di Kabupaten Manokwari Selatan: pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura: padi, buah-buahan, sayuran dan palawija; subsektor perkebunan: kakao dan kelapa; subsektor peternakan: ayam pedaging,

babi, ayam petelur dan ayam kampung; pada subsektor kehutanan: kayu besi, jenis kayu besi, kayu linggua dan kayu matoa; pada subsektor perikanan adalah: ikan layang, tuna, dan kerapu.

- m. Di Kabupaten Sorong: subsektor tanaman pangan dan hortikultura: ubi-ubian, buah dan sayuran, padi, jagung dan kedelai; sub-sektor perkebunan: kelapa sawit, sagu, pinang, kakao dan kelapa; subsektor peternakan: sapi potong, ayam kampung, ayam potong, ayam petelur, dan kambing; subsektor kehutanan: kayu merbau (*Instia* sp.), kayu matoa (*Pometia* sp.), kayu linggua, damar, rotan dan kayu buru.

Pada tingkat Provinsi fokus bidang riset (teknologi) didorong pada pembangunan rencana bisnis untuk memudahkan aliran barang dan jasa dari pengembangan produk unggulan pada tingkat kabupaten/kota. Produk unggulan pada setiap kabupaten/kota berhubungan dengan pengembangan dan penguatan Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, sehingga fokus riset akan terkait pula dengan pengelolaan dan perlindungan spesies endemik (aspek *bio-prospecting*) dan ekosistem esensial (kawasan konservasi). Dalam konteks ini pengembangan jasa lingkungan melalui pengembangan kegiatan ekowisata menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengembangan riset komoditi/produk unggulan.

Dari aspek kelembagaan dan regulasi, fokus riset Balitbangda diarahkan pada riset relevansi dan kompetensi kapasitas lembaga menuju pada reformasi birokrasi pada lingkungan OPD, riset yang menghasilkan kebijakan dengan pendekatan sains. Hasil riset dapat berupa rekayasa sosial model pembangunan dengan mendorong kemandirian OAP dalam mengakses peluang bisnis yang tercipta. Rekayasa sosial termasuk penyusunan naskah akedemik dari berbagai peraturan-peraturan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kegiatan lain dapat berupa evaluasi dan kajian terhadap capaian RPJMD Provinsi dan Kabupaten, Perdasi dan Perdasus, APBD kab/kota, pembangunan kampung melalui dana kampung, aspek perumahan dan pemukiman.

2. Pemanfaatan Produk Riset. Peningkatan pemanfaatan produk riset dilakukan melalui strategi dan implementasi peningkatan perolehan paten dan rezim HKI lain, pelaksanaan strategi dan implementasi penguatan produk riset, pelaksanaan strategi dan implementasi penguatan kerangka kerjasama pemanfaatan produk unggulan.
3. Penguatan Produktivitas Riset. Dalam meningkatkan kinerja output riset, dilakukan strategi publikasi dalam jurnal internasional terakreditasi (target minimal = 5), lulusan S3 yang dihasilkan sesuai tema riset unggulan lembaga (target minimal = 2), perolehan paten atau rezim HKI lainnya (target minimal = 1).
4. Membangun kapasitas *Science and Techno Park* pada produk unggulan (sagu, buah merah, ikan hasil hutan dan *bio-prospecting*).
5. Melaksanakan penelitian kebijakan, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian yang dilakukan oleh tim peneliti dalam bentuk kerjasama maupun swakelola.
6. Pengembangan riset sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan produk unggulan daerah.

2.1.3. Diseminasi, Hilirisasi dan Pemasaran Produk Riset

Diseminasi dan hilirisasi produk riset merupakan ukuran kinerja lembaga yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Strategi Diseminasi dan hilirisasi produk riset adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka diseminasi. Upaya yang perlu dikuatkan dalam pengembangan hilirisasi produk unggulan adalah memperkuat kerangka basis data dan informasi produk dan merumuskan kerangka kerjasama produk.
2. Keberlanjutan dan perluasan diseminasi produk riset. Dalam upaya menjaga keberlanjutan diseminasi produk, maka Kelitbangan perlu ditingkatkan kinerja output yang mencakup kerjasama riset pada tingkat nasional dan internasional, kerjasama non riset dan kontrak bisnis.

3. Produktivitas diseminasi dan hilirisasi produk. Penguatan produktivitas diseminasi dan hilirisasi produk riset dilakukan dengan menjaga capaian lembaga untuk terwujudnya keuntungan ekonomi dan dampak sosial dalam peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Memasarkan produk riset melalui kegiatan promosi dan *e-commerce*, serta koperasi yang terbentuk secara lokal di Papua Barat.

2.2. Posisi Riset Kelitbangan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat 2017-2022

Visi Kelitbangan Papua Barat mengacu pada Visi Kepala Daerah Papua Barat yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun, yaitu ***Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat***. Penjabaran makna dari Visi diuraikan berikut ini:

- AMAN** : Mengarah pada kondisi sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan suku dan agama, guna menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis, sebagai prasyarat utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
- SEJAHTERA** : Mengarah pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan perekonomian masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan lokal, dengan sasaran utama meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- BERMARTABAT** : Mengarah pada kondisi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur adat dan agama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Papua Barat.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, misi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta otonomi khusus yang efektif;
2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar;
5. Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata;
6. Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat;
7. Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial;
8. Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah.

Guna menunjang program pembangunan di Provinsi Papua Barat, Balitbangda menyelenggarakan misi pertama dari RPJMD Provinsi Papua Barat yaitu ***menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif***. Misi ini terintegrasi dengan misi lain dan mendukung tujuan yang hendak dicapai dalam setiap misi tersebut melalui kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dari Balitbangda sehingga sasaran yang ingin dicapai di dalam RPJMD Provinsi Papua Barat memiliki dasar IPTEK yang dapat dipertanggungjawabkan.

Efisiensi dan efektifitas implementasi IPTEK terhadap proses pencapaian tujuan diperlukan sehingga sasaran yang diinginkan dapat terukur dengan baik. Kemampuan IPTEK yang dimiliki oleh suatu daerah sangat menentukan daya saingnya baik antar regional, nasional maupun internasional, sehingga

pembangunan Papua Barat melalui dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK agar dapat mengapresiasi daya saing dan kemandirian daerah dalam menghadapi persaingan global.

Pengembangan IPTEK yang dapat menghasilkan inovasi daerah, bukan hanya diorientasikan pada pembangunan industri, tetapi juga memberikan prioritas kepada penelitian sosial dan kemanusiaan. Untuk itu, beberapa isu strategis memerlukan perhatian khusus dalam upaya mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat.

2.3. Kondisi Riset Papua Barat dan Lingkungan Strategis

2.3.1. Posisi Riset, Iptek dan Inovasi Daerah

Kinerja lembaga Litbang di Papua Barat, baik dari sisi kontribusinya terhadap pemajuan Iptek dan inovasi maupun kontribusinya terhadap pemenuhan realita kebutuhan atau penyediaan solusi bagi persoalan pembangunan masih belum memuaskan. Amanah konstitusi untuk memajukan peradaban dan mensejahterakan umat manusia belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.

Tentunya upaya untuk menunaikan amanah konstitusi ini akan lebih mudah dilakukan jika pengembangan Iptek mendapat dukungan pembiayaan yang lebih pantas; infrastruktur penunjang yang baik, terutama infrastruktur informasi dan telekomunikasi; SDM Iptek dan inovator dalam jumlah yang memadai, kapasitas Iptek yang tinggi, dengan motivasi yang tinggi; serta dukungan sistem manajemen teknologi dan inovasi yang profesional.

Provinsi Papua Barat yang memiliki masyarakat yang kreatif dan inovatif serta didukung oleh perguruan tinggi negeri dan swasta, memiliki potensi yang tinggi untuk terus mengembangkan inovasi daerah. Sejalan pula dengan visi RPJPD Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan Provinsi sebagai daerah termaju di Indonesia, maka potensi ini perlu untuk dioptimalkan. Provinsi Papua Barat hingga tahun 2019 telah melakukan berbagai inovasi yang sudah berjalan diantaranya adalah: penerapan *E-Monev*, *Absensi Online*, dan *Paperless Office*.

Di samping itu, bentuk pelayanan dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah juga sudah ditingkatkan melalui *SAMSAT Online*; dan program-program lain sebagai bentuk aplikasi inovasi daerah. Terkait dengan Potensi Unggulan Daerah yang dimiliki Provinsi Papua Barat melalui kabupaten dan kotanya sangat beragam. Potensi produksi mulai dari agribisnis, agriwisata, agroindustri, industri, hingga jasa. Beragamnya potensi inovasi dan produksi pada daerah kota atau kabupaten di Papua Barat belum tersusun secara tematik kewilayahannya, sehingga pemantauan dan pelaksanaan inovasi berdasarkan wilayah kerja pemerintahan dan pengembangan belum terstruktur dan efektif.

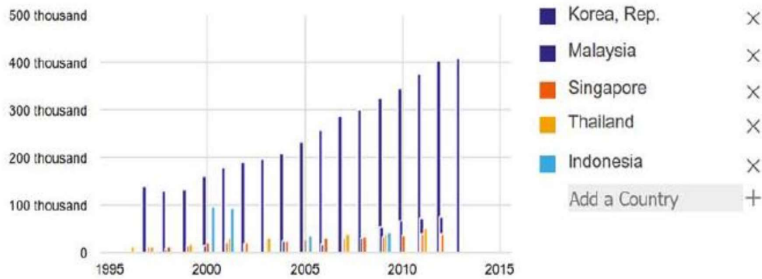
2.4. Sumber Daya Iptek Daerah

2.4.1. Sumber Daya Manusia

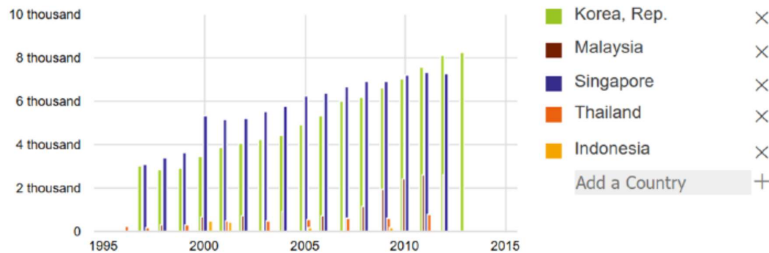
Kekuatan riset dan inovasi daerah sangat ditentukan oleh keberadaan SDM Ipteknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Karena kegiatan riset merupakan proses penciptaan invensi yang bersandar pada kemampuan berkreasi para pelakunya. Ristekdikti (2017), negara-negara maju yang kuat ekonomi dan ipteknya didukung oleh banyaknya jumlah SDM Iptek. Untuk kasus di Asia, majunya ekonomi dan iptek Korea Selatan dan Jepang didukung oleh melimpahnya SDM Ipteknya. Salah satu faktor kunci kemajuan Korea Selatan saat ini adalah kekuatan ipteknya. Semenjak tahun 1960-an melalui berbagai kebijakannya, Pemerintah Korea Selatan mendorong kemajuan iptek dalam rangka mendukung daya saing industrinya. Guna meningkatkan kemampuan ipteknya, pemerintah Korea Selatan juga mendorong keberadaan SDM Ipteknya.

Tren peningkatan jumlah peneliti yang signifikan di Korea Selatan (**Gambar 2.1**). Saat ini jumlah peneliti absolut di Korea Selatan mencapai angka 400 ribu atau setara dengan 8 ribu peneliti per sejuta penduduk. Hal yang serupa juga terjadi pada Singapura, jumlah peneliti per sejuta penduduk di negara tersebut mencapai angka lebih dari 7 ribu. Sementara itu, Malaysia memiliki 2.590 peneliti per sejuta penduduk, Thailand dengan 765 peneliti per sejuta

penduduk, dan Indonesia masih berkisar 1.071* peneliti per sejuta penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah absolut peneliti Indonesia masih jauh berada di bawah negara-negara di kawasan Asia. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa pemajuan kondisi ekonomi Indonesia melalui riset harus dimulai dari peningkatan kapasitas SDM Iptek. Penambahan kuantitas peneliti di Indonesia terutama Papua Barat seharusnya menjadi isu krusial saat ini.



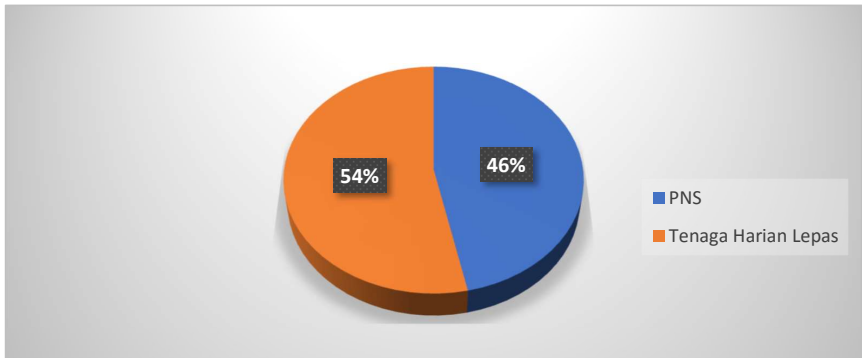
Sumber: UIS (2015)



Sumber: UIS (2015)

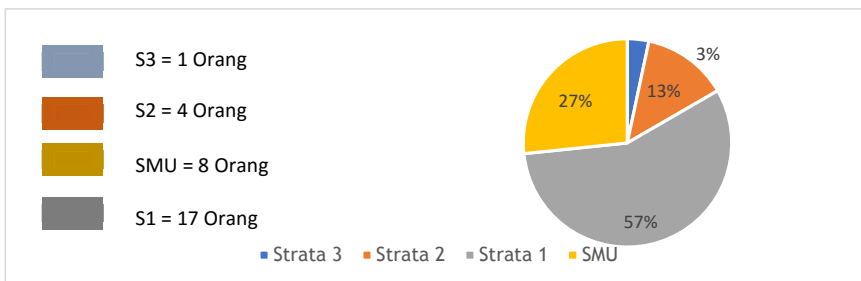
Gambar 2.1. Jumlah peneliti (atas) dan peneliti per sejuta penduduk (bawah)
(Kemeristek Dikti, 2017)

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat didukung oleh 30 Orang Personil terdiri dari 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 20 Tenaga Harian Lepas (**Gambar 2.2**)



Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

Berdasarkan data Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, persentase tingkat pendidikan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.



Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan Pendidikan

Tenaga fungsioanal yang melaksanakan tugas penelitian belum tersedia dan saat ini dalam proses rekrutmen. Mengatasi masalah keterbatasan SDM dilakukan kerja sama antar lembaga Litbang di Provinsi Papua. Pekerjaan

riset yang dilakukan oleh Kelitbangan Papua Barat dengan cara merekrut tenaga ahli dari berbagai lembaga Litbang dan sekaligus digunakan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan individu Kelitbangan.

Kerjasama Kelitbangan saat ini masih terbatas pada membangun kemitraan lembaga Litbang pada tingkat lokal di Papua Barat. Kerjasama dibangun untuk melihat kekuatan dan kekhususan bidang fokus riset yang melekat pada lembaga Litbang masing-masing. Lembaga Litbang yang dimaksud meliputi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Papua, Litbang Kehutanan, Litbang Pertanian, BP-DAS Papua Barat, STPP, dan lembaga lain. Kerjasama juga dilakukan dengan Kelitbangan pada tingkat kabupaten/kota terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah riset dan pengembangan, serta mendorong kerjasama yang lebih luas dalam memanfaatkan hasil riset Kelitbangan Papua Barat.

2.4.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja Iptek suatu negara. Di era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) saat ini, banyak negara yang mempunyai komitmen tinggi untuk berinvestasi dalam kegiatan riset. Ini didorong oleh keyakinan bahwa riset memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pendanaan Kelitbangan diperoleh dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBN maupun dari APBD serta kegiatan kerjasama dengan berbagai lembaga Litbang di Papua Barat, Indonesia dan dunia internasional serta mitra pembangunan. Kedepan pendanaan Kelitbangan lebih diarahkan pada peningkatan kerjasama antar lembaga (baik dalam maupun luar negeri) dalam upaya menjamin keberlanjutan pendanaan produk unggulan riset Kelitbangan.

2.5. Dinamika Kebijakan Riset dan Iptek (Peraturan)

Melihat kondisi saat ini, Provinsi Papua Barat belum memiliki acuan sistem inovasi daerah yang terintegrasi, dan juga peraturan perundangan yang mengamanatkan adanya suatu sistem inovasi daerah yang terintegrasi. Rumusan dari Sistem Inovasi Nasional (SIN), telah menjadi agenda nasional sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penerapan atas peraturan perundangan sebagaimana dimaksud, dijabarkan dalam Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Substansi Peraturan Bersama Kementerian tersebut adalah mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penguatan SIDa, yaitu dengan membuat Road Map SIDa, penataan secara kelembagaan dan pengembangan kualitas SDM, serta pengembangan SIDa berbasis potensi lokal. Melalui sistem inovasi yang terintegrasi, diharapkan tercipta alur koordinasi dan pelaporan terkait inovasi daerah yang harmonis dengan pemerintah pusat.

Road Map SIDa adalah desain kebijakan yang akan menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan Papua Barat yang berbasis inovasi. Road Map akan mengintegrasikan jejaring institusi, baik institusi pemerintahan sektoral atau lintas sektoral, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia bisnis dan masyarakat. Pada konteks kebijakan, maka dalam Road Map SIDa disusun sebagai petunjuk arah bagi inovasi yang mendukung program-program pembangunan Papua Barat dan beragam peraturan terkait lain. Beberapa peraturan yang terkait dengan inovasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; Amanah konstitusi Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa: “Pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Amanah ini mengisyaratkan bahwa Iptek yang dikembangkan perlu relevan dengan kebutuhan dan/atau persoalan yang dihadapi oleh rakyat dan bangsa

Indonesia, serta lebih diutamakan berbasis pada sumberdaya alam domestik dan membuka peluang lebih luas bagi tenaga kerja dalam negeri untuk berpartisipasi.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

2.6. Fungsi dan Peran Strategis Kelitbangan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Bidang Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau disebut Balitbangda Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balitbangda Provinsi Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

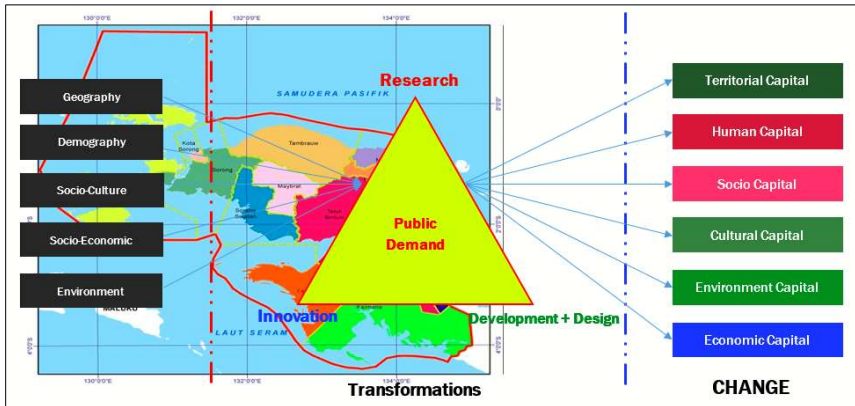
2.7 Kelembagaan dan Sinergi Riset

Kerjasama Kelitbang saat ini masih terbatas pada membangun kemitraan lembaga Litbang pada tingkat lokal di Papua Barat. Kerjasama dibangun untuk melihat kekuatan dan kekhususan bidang fokus riset yang melekat pada lembaga Litbang masing-masing. Lembaga Litbang yang dimaksud meliputi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Papua, Litbang Kehutanan, Litbang Pertanian, BP-DAS Papua Barat, STPP, dan lembaga lain. Kerjasama juga dilakukan dengan Kelitbang pada tingkat kabupaten/kota terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah riset dan pengembangan, serta mendorong kerjasama yang lebih luas dalam memanfaatkan hasil riset Kelitbang Papua Barat.

2.8 Kerangka Riset

Kerangka konseptual riset ini dibangun dari berbagai sumber literatur sebagai acuan dalam analisis dan sintesa riset (**Gambar 2.4**). Kerangka konseptual diawali dengan melihat inovasi riset pada berbagai layanan publik/birokrasi dan lembaga-lembaga riset (perguruan tinggi dan Litbang kementerian dan lembaga serta mitra pembangunan).

Berbagai faktor makro dan mikro seperti letak geografi daerah, penduduk (demografi), sosial-ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan sumber daya alam akan sangat mempengaruhi pengembangan riset, kegiatan riset dan inovasi yang dibutuhkan. Fase transformasi yang melahirkan permintaan publik membutuhkan sinergitas interaksi antar riset, inovasi, pengembangan dan desain. Pada tahap ini akan dihasilkan inovasi pada berbagai bidang riset sebagaimana tertuang dalam agenda riset nasional. Perubahan transformasi inovasi yang dihasilkan akan mempengaruhi modal sosial, modal manusia, modal alam, dan modal ekonomi. Proses-proses ini akan mempengaruhi penemuan-penemuan inovasi yang dapat digunakan pada berbagai bidang pembangunan guna mendukung pelayanan publik yang baik dan peningkatan kesejahteraan manusia.



Gambar 2.4. Model konseptual riset

Strategi pencapaian konsepsi ditempuh sesuai dengan arah kebijakan nasional maupun daerah, yang terfokus pada kemandirian daerah dalam meningkatkan daya saing untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat diperlukan dalam menumbuhkan aset dan kapabilitas masyarakat. Kondisi ini dapat terjadi melalui pengaturan pemanfaatan modal alam, modal buatan manusia (Iptek dan Inovasi), dan penghargaan yang tinggi terhadap modal sosial dan modal manusia.

Secara kolektif pengapresiasian modal-modal tersebut dapat menghasilkan sumber daya maupun produk keunggulan daerah melalui aplikasi teknologi dan inovasi. Produk keunggulan daerah dapat memperkuat rantai pertambahan nilai produksi agar citra dan pangsa pasar produk yang ditopang hasil Litbang memiliki daya saing di pasar nasional maupun global, juga sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi berbagai bentuk persaingan yang melemahkan posisi tawar, sehingga secara berkelanjutan dapat memperbarui sumber keunggulan daerah.

Iptek dan inovasi yang dikembangkan selain relevan dengan kebutuhan dan/atau persoalan rakyat dan bangsa, juga handal secara teknis, kompetitif secara ekonomis, dan sesuai dengan kapasitas adopsi para (calon) pengguna

potensial di dalam negeri, baik itu pelaku industri besar, usaha kecil dan menengah (UKM), maupun masyarakat. Pengembangan teknologi dan inovasi akan menjadi modal dasar untuk mewujudkan sistem inovasi di semua sektor pembangunan, tentu dengan adaptasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor atau bidang kajian.



BAB III **INOVASI DI PROVINSI** **PAPUA BARAT**

3.1. Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat

Jumlah inovasi yang berhasil teridentifikasi di Kabupaten/Kota di Papua Barat adalah sebanyak 227 inovasi. Kabupaten Manokwari menempati jumlah terbanyak, yakni 94 inovasi, diikuti Kabupaten Kaimana 23 inovasi, Kabupaten Sorong 18 Inovasi, Kabupaten Sorong Selatan 17 Inovasi, Kabupaten Fakfak 16 inovasi, Kota Sorong 14 inovasi, Kabupaten Teluk Wondama 12 inovasi, Kabupaten Manokwari Selatan 9 inovasi, Kabupaten Raja Ampat 8 inovasi, Kabupaten Teluk Bintuni 5 inovasi, dan Kabupaten Pegunungan Arfak 1 inovasi (**Tabel 3.1** dan **Gambar 3.1**).

TABEL 3.1. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT

Kab/Kota	Jumlah Inovasi
Kabupaten Fakfak	16
Kabupaten Kaimana	23
Kabupaten Manokwari	94
Kabupaten Manokwari Selatan	9
Kabupaten Pegunungan Arfak	1
Kabupaten Raja Ampat	8
Kabupaten Sorong	18
Kabupaten Sorong Selatan	17
Kabupaten Tambrau	10
Kabupaten Teluk Bintuni	5
Kabupaten Teluk Wondama	12
Kota Sorong	14
Grand Total	227

Sumber: Data Primer, 2019

3.2. Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Kelompok Sumber Inovasi Kabupaten/Kota di Papua Barat

Sumber inovasi di Papua Barat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sumber inovasi, yaitu: Litbang (Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO). Hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik langsung yang umumnya melekat pada institusi organisasi perangkat daerah (OPD), dan inovasi yang berkaitan dengan nilai tambah produk dan daya saing yang biasanya dilakukan di Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi melalui kegiatan riset dan pengembangan (R & D), serta inovasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang biasanya dihasilkan oleh lembaga swadaya masyarakat (NGO).

Berdasarkan kelompok sumber inovasi, kelompok litbang yang mencakup Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi menghasilkan sebanyak 69 inovasi. Sedangkan kelompok OPD menghasilkan 136 inovasi dan kelompok NGO menghasilkan 22 inovasi (**Tabel 3.2**).

TABEL 3.2. JUMLAH INOVASI MENURUT KELOMPOK SUMBER INOVASI DI PAPUA BARAT	
Kelompok	Total
Litbang	69
NGO	22
OPD	136
Grand Total	227

Sumber : Data primer, 2019

Kelompok Litbang yang menghasilkan Inovasi berada di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Hal ini berkaitan dengan kedudukan lembaga riset dan Perguruan Tinggi di Manokwari dan keberadaan Perguruan Tinggi di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Sementara kelompok OPD yang menghasilkan inovasi tersebar di semua kabupaten/kota di Papua Barat. Sedangkan NGO yang menghasilkan inovasi

tersebar di Kabupaten Fakfak, Kaimana, Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Informasi rinci disajikan pada **Tabel 3.3**.

Jumlah inovasi yang tinggi di Kabupaten Manokwari lebih dominan, kontribusinya berasal dari lembaga riset dan perguruan tinggi, yaitu sebanyak 55 Inovasi dari 94 inovasi (58,5%). Sisanya dihasilkan oleh NGO 15 inovasi dan OPD 24 inovasi. Demikian halnya Kabupaten Sorong, yaitu sebanyak 12 inovasi, sedangkan OPD dan NGO masing-masing 5 dan 1 inovasi.

TABEL 3.3. RINCIAN JUMLAH INOVASI MENURUT KELOMPOK SUMBER INOVASI DI KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT

Kab/Kota	Kelompok	Total
Kabupaten Fakfak	NGO	3
	OPD	13
Kabupaten Fakfak Total		16
Kabupaten Kaimana	NGO	1
	OPD	22
Kabupaten Kaimana Total		23
Kabupaten Manokwari	Litbang	55
	NGO	15
	OPD	24
Kabupaten Manokwari Total		94
Kabupaten Manokwari Selatan	OPD	9
Kabupaten Manokwari Selatan Total		9
Kabupaten Pegunungan Arfak	OPD	1
Kabupaten Pegunungan Arfak Total		1
Kabupaten Raja Ampat	OPD	8
		8
Kabupaten Raja Ampat Total		8
Kabupaten Sorong	Litbang	12
	NGO	1
	OPD	5
Kabupaten Sorong Total		18

TABEL 3.3. RINCIAN JUMLAH INOVASI MENURUT KELOMPOK SUMBER INOVASI DI KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT

Kab/Kota	Kelompok	Total
Kabupaten Sorong Selatan	NGO	2
	OPD	15
Kabupaten Sorong Selatan Total		17
Kabupaten Tambrauw	OPD	10
Kabupaten Tambrauw Total		10
Kabupaten Teluk Bintuni	OPD	5
Kabupaten Teluk Bintuni Total		5
Kabupaten Teluk Wondama	OPD	12
Kabupaten Teluk Wondama Total		12
Kota Sorong	Litbang	2
	OPD	12
Kota Sorong Total		14
Grand Total		227

Sumber: data primer, 2019

3.3. Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Instansi di Papua Barat

Terdapat sebanyak 65 instansi di Papua Barat yang teridentifikasi sebagai penghasil inovasi. Instansi penghasil inovasi terbanyak adalah: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat, yaitu dengan jumlah inovasi sebanyak 25 inovasi, diikuti Universitas Papua (UNIPA) 16 inovasi (UNIPA 9 inovasi & LPPM UNIPA 7 Inovasi), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari 14 inovasi, Universitas Muhamadiyah Sorong 12 inovasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 12 inovasi, Industri Mikro Pengolahan Pangan Berbasis Kearifan Lokal 10 inovasi, Bappeda 10 inovasi, Dinas Perhubungan 6 inovasi, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP 5 Inovasi. Sementara Instansi lainnya (55 instansi) hanya berkisar 1-3 inovasi **(Tabel 3.4)**.

Posisi Litbang dan Perguruan Tinggi sebagai penghasil inovasi masih menempati jumlah tertinggi dalam menghasilkan inovasi di Papua Barat. Umumnya inovasi yang dihasilkan oleh Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi adalah berbasis pada riset dan development (R & D) atau kegiatan alih teknologi. Oleh karena itu, sebagian besar inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset dan perguruan tinggi berada pada area inovasi teknologi bagi penciptaan nilai tambah produk dan daya saing. Sementara inovasi yang ada di OPD pelayanan publik secara langsung yang umumnya tidak dihasilkan melalui kegiatan riset dan development (R & D).

TABEL 3.4. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT INSTANSI DI KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT

No	Nama Instansi	Total
1	Badan Organisasi Setda	1
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
4	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4
6	Balai Penyuluhan Pertanian Distrik Prafi	7
7	BAPPEDA	10
8	Bappeda Kota Sorong	3
9	Bidang Organisasi Sekda	2
10	Biro Organisasi Setda	1
11	BPKAD	1
12	BPTP Papua Barat	25
13	Dinas BKPSDM	2
14	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	2
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	3
16	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	2
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	12
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	2
19	Dinas Kesehatan	11

TABEL 3.4. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT INSTANSI DI KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT

No	Nama Instansi	Total
20	Dinas Ketahanan Pangan	4
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2
22	Dinas Kominfo	2
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	1
24	Dinas Lingkungan Hidup	5
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (KB)	2
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5
29	Dinas Pendidikan	1
30	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	2
31	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1
32	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1
33	Dinas Perdagangan Koperasi dan Perindustrian	1
34	Dinas Perhubungan	6
35	Dinas Perhubungan dan Perikanan	2
36	Dinas Perikanan	1
37	Dinas Pertanian ,Tanaman Pangan Dan Perkebunan	3
38	Dinas Pertanian dan Pangan	1
39	Dinas Peternakan	2
40	Dinas PMP2TSP	1
41	Dinas PPA dan KB	4
42	Dinas Sosial	1
43	Industri Mikro Produk Olahan Pangan berbasis kearifan lokal	10
44	Inspektorat	4
45	Kehutanan (CDK)	1
46	Kelompok Perempuan Pokja "VIVA"	1

TABEL 3.4. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT INSTANSI DI KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT

No	Nama Instansi	Total
47	KOMINFO	1
48	Lembaga Masyarakat Adat Malamoi AIMAS Sorong	1
49	LPPM Universitas Papua	7
50	Murtihapsari,DKK	3
51	Perawatan Luka Modern Manokwari	1
52	Perkebunan	3
53	Plt.Kepala Dinas	1
54	Politeknik Pembangunan Pertanian	14
55	PTSP	1
56	Puskesmas Wasior	1
57	SATPOL PP Prov. Papua Barat	1
58	Unimuda Sorong	12
59	Universitas Muhammadiyah Sorong	2
60	Universitas Papua	9
61	UPDT Samsat	1
62	UPT Samsat	1
63	UPTD Samsat	2
64	Yayasan 1001 Senja	1
65	Yayasan Insan Cita	2
Grand Total		227

3.4. Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Fokus Bidang Riset Nasional di Papua Barat

Terdapat 10 fokus bidang riset nasional, yaitu (a) Pangan-Pertanian; (Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan), (b) Energi-Energi Baru dan Terbarukan, (c) Kesehatan-Obat, (d) Transportasi; (e) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (f) Pertahanan dan Keamanan; (g) Material Maju; (h) Kemaritiman; (bioteknologi, zonasi, konservasi), (i) Kebencanaan; dan (j) Sosial Humaniora-Seni Budaya - Pendidikan.

Tabel 3.5 dan **Gambar 3.5** menyajikan pengelompokan 227 inovasi di Papua Barat berdasarkan fokus bidang riset nasional. Bidang perkebunan menduduki peringkat pertama dalam jumlah inovasi, yaitu 52 inovasi diikuti oleh bidang teknologi informasi dan komunikasi 45 inovasi; bidang pangan pertanian dan humaniora sosial, masing-masing 30 inovasi; bidang humaniora pendidikan 17 inovasi; bidang kesehatan-obat 16 inovasi, bidang humaniora ekonomi dan bidang transportasi, masing-masing 8 inovasi; bidang energi terbarukan 5 inovasi; bidang pangan kehutanan dan bidang pangan perikanan, masing-masing 3 inovasi; bidang pangan-peternakan, bidang hankam; bidang kemaritiman-bioteknologi dan bidang kebencanaan, masing-masing 2 inovasi; bidang material maju dan bidang humaniora budaya, masing-masing 1 inovasi.

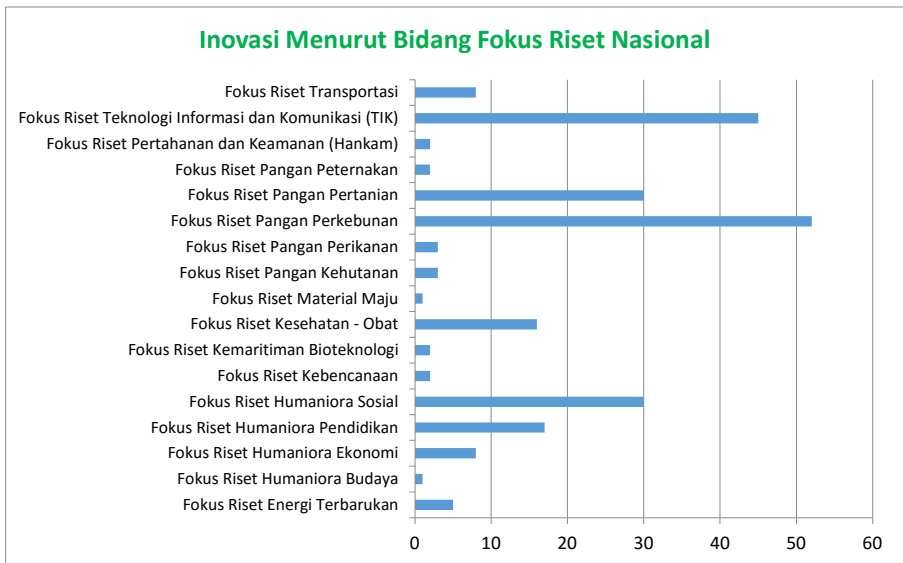
TABEL 3.5. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT FOKUS BIDANG RISET NASIONAL DI PAPUA BARAT

FOKUS RISET NASIONAL	TOTAL
Fokus Riset Energi Terbarukan	5
Fokus Riset Humaniora Budaya	1
Fokus Riset Humaniora Ekonomi	8
Fokus Riset Humaniora Pendidikan	17
Fokus Riset Humaniora Sosial	30
Fokus Riset Kebencanaan	2
Fokus Riset Kemaritiman Bioteknologi	2
Fokus Riset Kesehatan – Obat	16

TABEL 3.5. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT FOKUS BIDANG RISET NASIONAL DI PAPUA BARAT

FOKUS RISET NASIONAL	TOTAL
Fokus Riset Material Maju	1
Fokus Riset Pangan Kehutanan	3
Fokus Riset Pangan Perikanan	3
Fokus Riset Pangan Perkebunan	52
Fokus Riset Pangan Pertanian	30
Fokus Riset Pangan Peternakan	2
Fokus Riset Pertahanan dan Keamanan (Hankam)	2
Fokus Riset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	45
Fokus Riset Transportasi	8
Grand Total	227

Sumber: Data primer, 2019



Gambar 3.5. Jumlah dan sebaran inovasi menurut fokus bidang riset nasional di Papua Barat

3.5 Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Kategori Riset

Terdapat 4 kategori riset secara nasional, yaitu: (i) penelitian dasar, (ii) penelitian terapan, (iii) penelitian pengembangan, dan (iv) pengkajian. Di mana berdasarkan kategori riset tersebut, riset pengembangan mendominasi jumlah inovasi, yaitu sebanyak 87 inovasi dengan sebaran: Kabupaten Manokwari 26 inovasi; Kabupaten Sorong Selatan 17 inovasi; Kabupaten Teluk Wondama 12 inovasi; Kabupaten Fakfak 10 inovasi; Kabupaten Tambrau 8 inovasi; Kabupaten Raja Ampat 7 inovasi; Kabupaten Sorong Selatan 6 inovasi; Kabupaten Teluk Bintuni 5 inovasi.

Kategori riset terapan menduduki urutan kedua, yaitu: 82 inovasi dengan sebaran: Kabupaten Manokwari 26 inovasi; Kabupaten Kaimana 23 inovasi; Kota Sorong 14 inovasi; Kabupaten Manokwari Selatan 7 inovasi; Kabupaten Sorong 6 inovasi; Kabupaten Tambrau 2 inovasi; Kabupaten Raja Ampat 1 inovasi. Kategori pengkajian menduduki peringkat ketiga, yaitu sebanyak 25 inovasi, dengan sebaran hanya di Kabupaten Manokwari. Kategori riset dasar menempati posisi terakhir dengan jumlah inovasi sebanyak 16 inovasi, yaitu 7 inovasi di Kabupaten Manokwari; 6 inovasi di Kabupaten Sorong; 3 inovasi di Kabupaten Fakfak (**Tabel 3.6** dan **Gambar 3.6**).

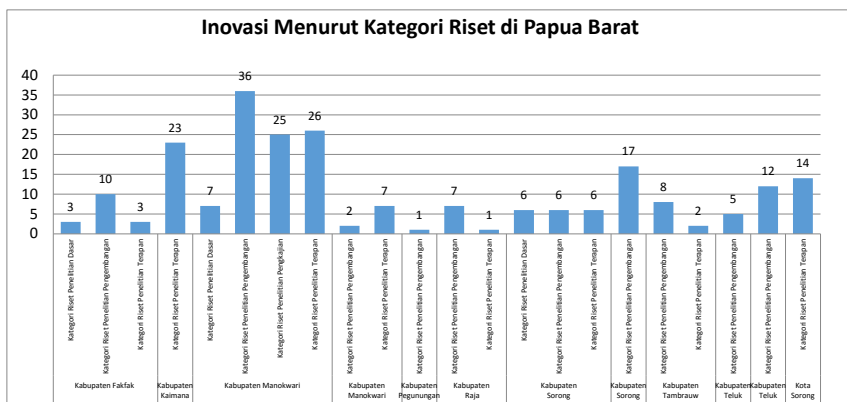
Kabupaten Manokwari menempati posisi pertama dalam semua pelaksanaan semua kategori riset untuk menghasilkan inovasi. Diikuti oleh Kabupaten Sorong dan Kabupaten Fakfak. Kedua wilayah ini belum menghasilkan inovasi melalui tiga kategori riset, yaitu penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan, tetapi belum menghasilkan inovasi melalui kategori riset pengkajian. Kabupaten lainnya umumnya menghasilkan inovasi melalui riset pengembangan dan riset terapan.

**TABEL 3.6. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT KATEGORI RISET
 DI KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT**

Kab/Kota	Kategori Riset	Total
Kabupaten Fakfak	Kategori Riset Penelitian Dasar	3
	Kategori Riset Penelitian Pengembangan	10
	Kategori Riset Penelitian Terapan	3
Kabupaten Fakfak Total		16
Kabupaten Kaimana	Kategori Riset Penelitian Terapan	23
Kabupaten Kaimana Total		23
Kabupaten Manokwari	Kategori Riset Penelitian Dasar	7
	Kategori Riset Penelitian Pengembangan	36
	Kategori Riset Penelitian Pengkajian	25
	Kategori Riset Penelitian Terapan	26
Kabupaten Manokwari Total		94
Kabupaten Manokwari Selatan	Kategori Riset Penelitian Pengembangan	2
	Kategori Riset Penelitian Terapan	7
Kabupaten Manokwari Selatan Total		9
Kabupaten Pegunungan Arfak	Kategori Riset Penelitian Pengembangan	1
Kabupaten Pegunungan Arfak Total		1
Kabupaten Raja Ampat	Kategori Riset Penelitian Pengembangan	7
	Kategori Riset Penelitian Terapan	1
Kabupaten Raja Ampat Total		8
Kabupaten Sorong	Kategori Riset Penelitian Dasar	6
	Kategori Riset Penelitian Pengembangan	6
	Kategori Riset Penelitian Terapan	6
Kabupaten Sorong Total		18
Kabupaten Sorong Selatan	Kategori Riset Penelitian Pengembangan	17
Kabupaten Sorong Selatan Total		17
Kabupaten Tambrauw	Kategori Riset Penelitian Pengembangan	8
	Kategori Riset Penelitian Terapan	2
Kabupaten Tambrauw Total		10

Kabupaten Teluk Bintuni	Kategori Riset Penelitian Pengembangan	5
Kabupaten Teluk Bintuni Total		5
Kabupaten Teluk Wondama	Kategori Riset Penelitian Pengembangan	12
Kabupaten Teluk Wondama Total		12
Kota Sorong	Kategori Riset Penelitian Terapan	14
Kota Sorong Total		14
Grand Total		227

Sumber: Data primer, 2019



Gambar 3.6. Jumlah dan sebaran inovasi menurut kategori riset di Kabupaten/Kota di Papua Barat

3.6 Jumlah dan Sebaran Inovasi Menurut Area Inovasi

Berdasarkan area inovasi, maka 227 inovasi di Papua Barat, terdiri atas: inovasi teknologi sebanyak 113 inovasi; inovasi di area administrasi sebanyak 41 inovasi; inovasi di area sosial 27 inovasi; inovasi di area kebijakan sebanyak 26 inovasi; dan inovasi di area manajemen sebanyak 20 inovasi (**Tabel 3.7**).

**TABEL 3.7. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT AREA INOVASI
 DI KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT**

Area Inovasi	Total
Administrasi	41
Kebijakan	26
Manajemen	20
Sosial	27
Teknologi	113
Grand Total	227

Sumber. Data primer, 2019

113 inovasi teknologi tersebar di Kabupaten Manokwari 73 inovasi teknologi; Kabupaten Fakfak 10 inovasi teknologi; Kabupaten Sorong Selatan 10 inovasi teknologi; Kabupaten Sorong 6 inovasi teknologi; Kabupaten Raja Ampat 5 teknologi; Kabupaten Kaimana 4 inovasi teknologi; Kota Sorong dan Teluk Wondama, masing-masing 1 inovasi teknologi (**Tabel 3.8** dan **Gambar 3.7**).

Terdapat 41 inovasi administrasi tersebar di Kota Sorong 8 inovasi; Kabupaten Manokwari 7 inovasi; Kabupaten Teluk Wondama 6 inovasi; Kabupaten Manokwari Selatan 5 inovasi; Kabupaten Sorong Selatan 5 inovasi; Kabupaten Kaimama 4 inovasi; Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Teluk Bintuni, masing-masing 2 inovasi (**Tabel 3.8** dan **Gambar 3.7**).

Sedangkan inovasi sosial terdiri dari 27 inovasi yang tersebar di Kabupaten Manokwari 7 inovasi; Kabupaten Kaimana 4 inovasi; Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Wondama, masing-masing 2 inovasi; Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, masing-masing 2 inovasi; Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak, masing-masing 1 inovasi (**Tabel 3.8** dan **Gambar 3.7**).

26 Inovasi di area kebijakan tersebar di Kabupaten Kaimana 9 inovasi; Kabupaten Manokwari 5 inovasi; Kabupaten Fakfak dan Tambrau, masing-masing 4 inovasi; Kabupaten Teluk Bintuni 2 inovasi; Kota Sorong 1 inovasi (**Tabel 3.8** dan **Gambar 3.7**).

20 Inovasi di area manajemen tersebar di Kabupaten Sorong 7 inovasi; Kabupaten Manokwari Selatan 3 inovasi; Kabupaten Kaimana, Kab Manokwari, Kabupaten Wondama, dan Kota Sorong, masing-masing 2 inovasi; Kabupaten Bintuni dan Raja Ampat, masing-masing 1 inovasi (**Tabel 3.8** dan **Gambar 3.7**).

TABEL 3.8. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT AREA INOVASI DI KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT

Kab/Kota	Area Inovasi	Total
Kabupaten Fakfak	Kebijakan	4
	Sosial	2
	Teknologi	10
Kabupaten Fakfak Total		16
Kabupaten Kaimana	Administrasi	4
	Kebijakan	9
	Manajemen	2
	Sosial	4
	Teknologi	4
Kabupaten Kaimana Total		23
Kabupaten Manokwari	Administrasi	7
	Kebijakan	5
	Manajemen	2
	Sosial	7
	Teknologi	73
Kabupaten Manokwari Total		94

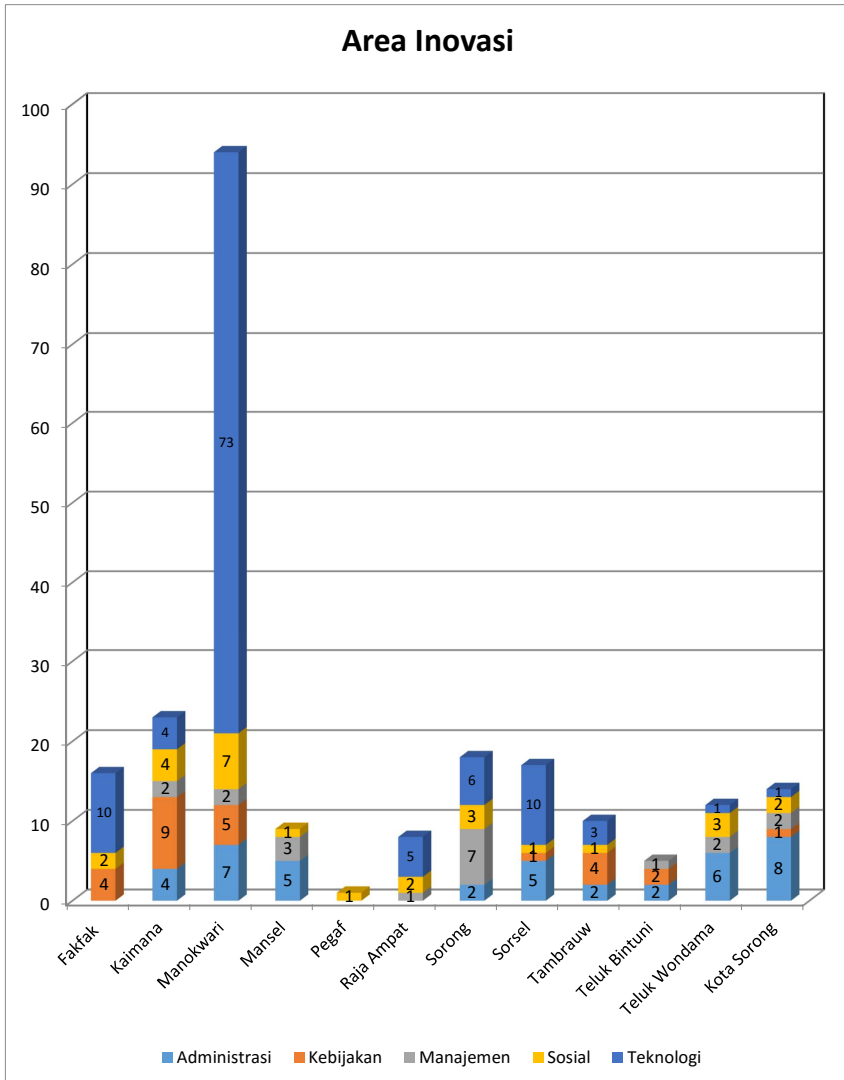
**TABEL 3.8. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT AREA INOVASI
 DI KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT**

Kab/Kota	Area Inovasi	Total
Kabupaten Manokwari Selatan	Administrasi	5
	Manajemen	3
	Sosial	1
Kabupaten Manokwari Selatan Total		9
Kabupaten Pegunungan Arfak	Sosial	1
Kabupaten Pegunungan Arfak Total		1
Kabupaten Raja Ampat	Manajemen	1
	Sosial	2
	Teknologi	5
Kabupaten Raja Ampat Total		8
Kabupaten Sorong	Administrasi	2
	Manajemen	7
	Sosial	3
	Teknologi	6
Kabupaten Sorong Total		18
Kabupaten Sorong Selatan	Administrasi	5
	Kebijakan	1
	Sosial	1
	Teknologi	10
Kabupaten Sorong Selatan Total		17
Kabupaten Tambrauw	Administrasi	2
	Kebijakan	4
	Sosial	1
	Teknologi	3
Kabupaten Tambrauw Total		10

**TABEL 3.8. JUMLAH DAN SEBARAN INOVASI MENURUT AREA INOVASI
 DI KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT**

Kab/Kota	Area Inovasi	Total
Kabupaten Teluk Bintuni	Administrasi	2
	Kebijakan	2
	Manajemen	1
Kabupaten Teluk Bintuni Total		5
Kabupaten Teluk Wondama	Administrasi	6
	Manajemen	2
	Sosial	3
	Teknologi	1
Kabupaten Teluk Wondama Total		12
Kota Sorong	Administrasi	8
	Kebijakan	1
	Manajemen	2
	Sosial	2
	Teknologi	1
Kota Sorong Total		14
Grand Total		227

Kabupaten Manokwari dominan dalam jumlah inovasi teknologi, demikianpun Kabupaten Fakfak dan Sorong Selatan. Kabupaten Kaimana dan Tambrauw lebih banyak menghasilkan inovasi kebijakan. Di mana Kabupaten Kaimana menduduki posisi tertinggi dalam inovasi kebijakan. Kabupaten Sorong lebih banyak menghasilkan inovasi manajemen. Kota Sorong lebih banyak menghasilkan inovasi administrasi. Kabupaten Manokwari masih tertinggi dalam menghasilkan inovasi sosial dibanding kabupaten/kota lainnya di Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni relatif seimbang jumlah inovasi kebijakan, administrasi dan manajemen. Pegunungan Arfak sangat rendah dalam menghasilkan inovasi, hanya memiliki satu inovasi sosial (**Gambar 3.7**).



Gambar 3.7. Jumlah dan sebaran inovasi menurut area inovasi di Kabupaten/Kota di Papua Barat

3.7 Deskripsi Inovasi

Deskripsi inovasi yang dimaksudkan disini adalah mencakup nama inovasi, bentuk inovasi, dan kegunaan inovasi, serta lembaga inventor. Nama sebuah inovasi biasanya ikonik, terutama inovasi dalam konteks pelayanan publik. Bentuk suatu inovasi dapat berupa ide/gagasan, produk (barang dan jasa), atau metode (cara atau praktek). Sementara kegunaan inovasi terkait dengan penciptaan nilai tambah, daya saing, peningkatan produktivitas ataupun terkait dengan pemberdayaan. Tentunya sebuah inovasi di hari ini lebih baik dari inovasi sebelumnya. Informasi lengkap dari 227 inovasi yang diinventarisir di Papua Barat disajikan pada **Lampiran**. Berikut disajikan beberapa contoh deskripsi inovasi di Papua Barat, yaitu pada area inovasi: teknologi, kebijakan, manajemen, dan administrasi.

Contoh Deskripsi Inovasi

1. Provinsi Papua Barat Sebagai Provinsi Berkelanjutan

- Area Inovasi : Inovasi Kebijakan
- Bentuk Inovasi : Produk Kebijakan
- Lembaga Inventor : Pemerintah Provinsi Papua Barat

Inovasi kebijakan Papua Barat sebagai provinsi berkelanjutan (konservasi) dideklarasikan sejak 12 Oktober 2015. Kemudian pada Oktober 2018 dicetuskan deklarasi Manokwari yang berisi 14 kesepakatan penting sebagai agenda provinsi berkelanjutan pada *international Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) 2018* atau Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif, yang digelar di Manokwari, Papua Barat, 7-10 Oktober 2018. Tema pertemuan ini adalah Provinsi Berkelanjutan Solusi Cerdas Pembangunan di Tanah Papua.

Inovasi dalam aspek kebijakan ini bertujuan meningkatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan di Papua Barat. Dimana pembangunan ekonomi dan teknologi harus selaras dan harmoni dengan alam dan budaya Papua Barat. Alam dan budaya Papua Barat harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara bijaksana. Inovasi Provinsi Berkelanjutan kemudian didasari dengan produk hukum berupa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Berkelanjutan, dan perda terkait lainnya seperti Perda Kelitbangan dan Inovasi daerah.

Perdasus Provinsi berkelanjutan selanjutnya dijadikan sebagai landasan inisiatif kaji ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Papua Barat yang sedang dilakukan tim Provinsi Papua Barat. Tujuannya, mengatur ulang proporsi kawasan lindung dan budidaya hutan Papua Barat yang saat ini komposisinya 36 persen berbanding 64 persen. “Target yang diusung kebalikannya, 70 persen wilayah Papua Barat merupakan kawasan konservasi dan lindung.” Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua adalah kebahagiaan dan kualitas hidup seluruh rakyat Papua berada pada tingkat setinggi-tingginya secara adil dan merata. Inovasi ini kedepan merubah/merenovasi semua sistem perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di Papua Barat dalam rangka perwujudan Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan.



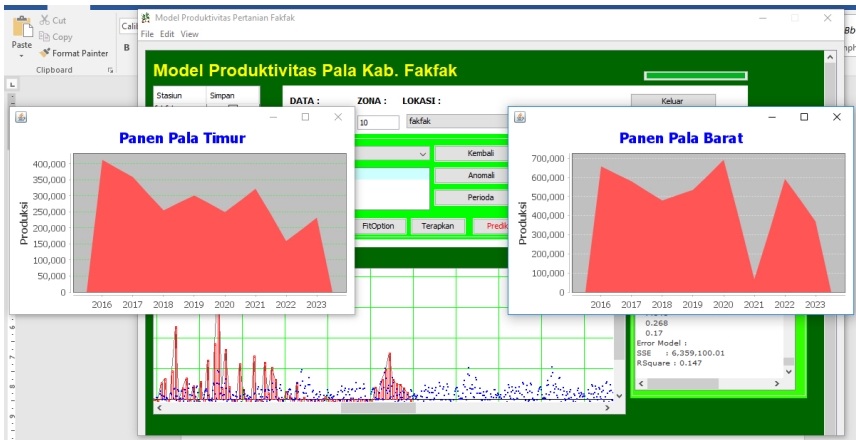
Gambar 3.8. Hutan dataran rendah dan Budaya Papua Barat yang merupakan bagian dari kekayaan Papua Barat yang perlu dilestarikan

2. Model Prediksi Iklim dan Produksi Pala Fakfak

- Area Inovasi : Inovasi Teknologi
- Bentuk Inovasi : Model Berbasis Penggunaan Komputer
- Lembaga Inventor : BPTP Papua Barat

Model ini berguna untuk memprediksi produksi pala Fakfak terkait dengan variabilitas iklim musim baratan dan timuran di Fakfak. Bersifat peringatan dini (*early warning system*), sehingga pihak pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan antisipatif terhadap kemungkinan kerugian yang dialami petani terkait penurunan/stagnasi produksi pala akibat variabilitas iklim. Inovasi tersebut dihasilkan dari kegiatan riset dan pengembangan (R & D) oleh BPTP Papua Barat selama dua tahun. Model ini dibangun menggunakan persamaan dasar yang dapat memprediksi variabilitas iklim berdasarkan data historis dan kemudian menghitung keragaan produksi pala pada musim timuran dan baratan berdasarkan persamaan hubungan iklim dan produksi pala yang juga dibangun berdasarkan persamaam empiris hubungan data iklim dan produksi pala secara historis.

Input yang dilakukan pada model ini, yaitu hanya data curah hujan bulanan yang terukur di permukaan (stasiun klimatologi). Simulasi dilakukan berdasarkan input curah hujan dan model hubungan yang telah terbagun. Cara pengoperasian model ini sangat mudah. Model ini sudah divalidasi di lapangan dan menunjukkan akurasi yang tinggi (>60%). Dengan model prediksi ini, dapat diketahui keragaan produksi pala Fakfak pada setiap musim kedepan, bahkan beberapa tahun kedepan (**Gambar 3.9**).



Gambar 3.9. Tampilan inovasi teknologi: Model prediksi variabilitas iklim dan produksi Pala Fakfak (BPTP Papua Barat, 2019)

3. Laki Sejati (Pelayanan Kilat Sehari Jadi Pasti)

- Area Inovasi : Manajemen
- Bentuk Inovasi : Jasa layanan publik berbasis Informasi Teknologi
- Lembaga Inventor : Dinas PMP2TSP Kabupaten Sorong

Inovasi Laki Sejati (Pelayanan Kilat Sehari Jadi Pasti) digunakan oleh Dinas PMP2TSP Kabupaten Sorong dalam proses administrasi untuk memberikan izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) kepada publik di Kabupaten Sorong. Dengan inovasi ini masyarakat mengurus ijin dari jam 8.00 – 11.00 WIT, maka surat izin tersebut akan selesai dan diambil pada hari yang sama. Lewat dari jam 12 maka surat izin tersebut dapat diambil pada hari berikutnya. Sebelumnya, tanpa inovasi ini, masyarakat mengurus izin melewati beberapa prosedur dan pelayanan memakan waktu yang cukup lama, sehingga surat izin akan bisa selesai dalam waktu 2-3 hari. Inovasi ini diluncurkan pada tanggal 24 Oktober 2019 (**Gambar 3.10**).



Gambar 3.10. Launching inovasi pelayanan publik dinas pelayanan terpadu satu pintu (DPMP2TSP) oleh Wakil Wali Kota Sorong (24 Oktober 2019)

4. Pos Dugem Liku (Pos Pengaduan Penyelesaian dan Pelayanan Dugaan Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup)

- Area Inovasi : Sosial
- Bentuk Inovasi : Jasa layanan berbasis penggunaan media sosial
- Lembaga Inventor : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong

Pos Pengaduan dugaan pencemaran Lingkungan Hidup (LH) di Kabupaten Sorong. Dimana masyarakat dari semua Distrik di Kabupaten Sorong dapat melaporkan atau memberi informasi secara cepat melalui media sosial: Whatsapp, Email: pospel.dugemliku@gmail.com, Facebook, dan Twitter: Pos pengaduan dugaan pencemaran LH Kabupaten Sorong @ih_kabsorong. Inovasi ini memiliki manfaat diantaranya mengatur masyarakat untuk fungsi kontrol lingkungan, kebijakan strategis lebih cepat, tetap untuk menjaga lingkungan, menerima informasi dari masyarakat secara akurat dan mengatur menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan dengan cepat (pada hari yang sama).

5. Pentas Adu Badan (Penataan Arsip Secara Terpadu Dengan Menata Secara Manual Dan Digital)

- Area Inovasi : Administrasi
- Bentuk Inovasi : Jasa layanan Pengarsipan Administrasi
- Lembaga Inventor : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Teluk Wondama

Penataan arsip secara terpadu dengan menata secara manual dan digital. Di mana dengan inovasi ini dapat mempermudah keuangan dalam menyusun setiap arsip dari masing-masing OPD di Kabupaten Teluk Wondama, sehingga dalam pemeriksaan dari 5 tahun sebelumnya dapat ditemukan arsip mana yang dibutuhkan dengan cepat. Sebelumnya arsip dari berbagai OPD belum tersimpan secara teratur, baik secara manual dan secara digital, sehingga sangat sulit untuk mencari berkas OPD, jika dibutuhkan pasti memakan waktu yang lama.

6. Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Penyaluran Dana Kampung Yang Sesuai Dengan Kondisi Lokal

- Area Inovasi : Kebijakan
- Bentuk Inovasi : Produk Peraturan Bupati
- Lembaga Inventor : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana

Kebijakan Bupati dengan menerbitkan 13 Perbup untuk pengaturan penyaluran dana desa yang mencakup, pembuatan klinik pendampingan, teknis pelaporan, pengadaan barang/jasa, perencanaan, pemilihan kepala kampung, pencairan dana, dan pertanggung jawaban. Adanya dasar hukum yang dibuat sesuai dengan kondisi lokal sehingga penggunaan dana kampung lebih terarah, tepat sasaran, memperkecil potensi konflik dan mencegah kerugian negara akibat penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara.

7. Isotonik Akwai Sehat

- Area Inovasi : Teknologi
- Bentuk Inovasi : Produk
- Lembaga Inventor : Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari

Isotonik Akwai Sehat adalah inovasi berupa produk olahan minuman sehat dengan bahan utama kulit kayu tanaman endemik Pegunungan Arfak, kayu akwai (*Drymis peperita hook*) yang memiliki kandungan: alkaloid, flavonoid, steroid, tannin, saponik, dan fenolik. Diracik dengan ditambahkan rempah-rempah: Kayu Manis, Cengkeh, Sere, Merica, Madu, dan Gula aren. Sehingga dapat memungkinkan untuk meningkatkan stamina, dapat mengobati asma, demam karena malaria, dan lain-lain. Isotonik Akwai Sehat dikemas dalam botol plastik ukuran 250 ml dan 500 ml (**Gambar 3.11**). Sedang dilakukan proses uji sertifikasi di BPPM Manokwari dan BPOM Jakarta Pusat untuk pendaftaran Obat tradisional. Hak Paten dan Merek sudah didaftarkan di Dirjen HAKI Kemenkumham.



Gambar 3.11. Inovasi Isotonik Akwai Sehat, kemasan 250 ml dan 500 ml (Inventor: Polbangtan Manokwari, 2016)

8. Mikro Produk Olahan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

Area Inovasi	: Teknologi
Bentuk Inovasi	: Produk
Lembaga Inventor	: Industri Mikro Produk Olahan Pangan Berbasis Kearifan Lokal di Manokwari

Mikro produk olahan pangan berbasis kearifan lokal lahir dari sebuah industri mikro di Manokwari, Papua Barat yang dibina oleh Universitas Papua (UNIPA) dan Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat. Semua produk olahan berbahan baku sagu dan buah merah. Terdapat 10 produk inovasi yang dihasilkan oleh industri mikro produk olahan pangan berbasis kearifan lokal, yaitu: Tepung Sagu Organik, Molen Papeda, Vencake Sago/Brownes Sagu, Various Taste of Sagu Cake, Bola Sagu Pelangi, Ring Red and Cocoa Sago, Kue Bangket Papua, Pasta Buah Merah, Lapis Buah Merah, Rednies Pie Buah Merah. **Gambar 3.12** memperlihatkan aneka produk olahan pangan yang dihasilkan oleh Industri Mikro Produk Olahan Pangan berbasis kearifan lokal.



Gambar 3.12. Aneka produk makanan berbahan baku sagu dan buah merah yang dihasilkan oleh Industri Mikro Produk Olahan Pangan Berbasis Kearifan Lokal di Manokwari

3.8. Penilaian Kualitas Inovasi

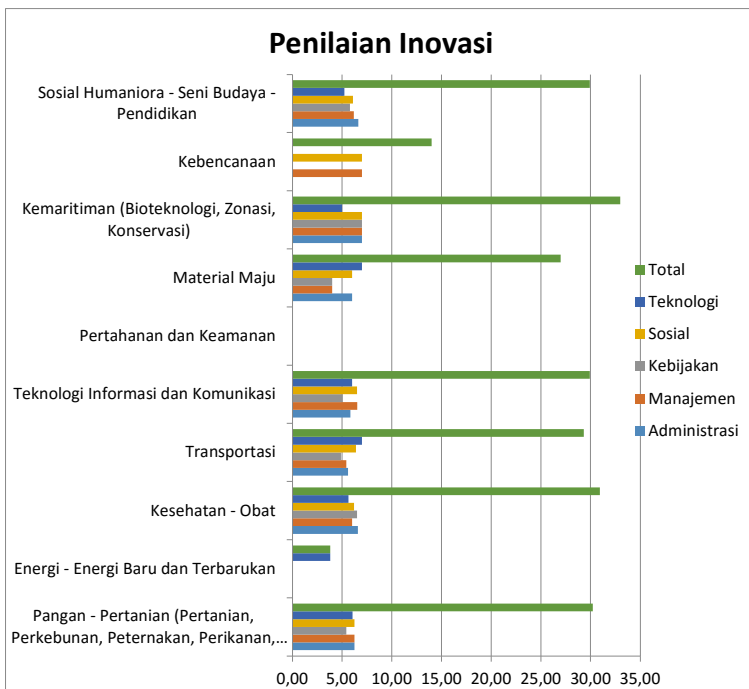
Penilaian kualitas inovasi dilakukan berdasarkan tujuh variabel dengan berbagai kriteria/ciri inovasi, seperti memangkas biaya, memangkas jalur birokrasi, meningkatkan kinerja dan produktivitas dan meminimalkan resiko. Skala Liker digunakan dengan interval 1 (buruk) hingga 7 (sangat baik). Skor 1 sangat buruk, skor 2 biaya lebih rendah, skor 3 biaya lebih rendah dan memangkas jalur birokrasi, skor 4 biaya lebih rendah, memangkas jalur birokrasi dan waktu lebih pendek, skor 5 biaya lebih rendah, memangkas jalur birokrasi, waktu lebih pendek dan meningkatkan kinerja, skor 6 biaya lebih rendah, memangkas jalur birokrasi, waktu lebih pendek, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan produktivitas, dan skor 7 biaya lebih rendah, memangkas jalur birokrasi, waktu lebih pendek, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, dan meminimalisir resiko.

Tabel 3.9 dan **Gambar 3.13** memperlihatkan bahwa kualitas inovasi di Papua Barat berada pada skor 3 hingga skor 7. Dimana skor terendah ada pada area inovasi teknologi dari bidang terbarukan. Hal ini tentunya karena inovasi teknologi pada bidang tersebut masih membutuhkan tahapan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi yang matang.

TABEL 3.9 PENILAIAN KUALITAS INOVASI						
Agenda Riset	Administrasi	Manajemen	Kebijakan	Sosial	Teknologi	Total
Pangan-Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan)	6.25	6.25	5.43	6.25	6.06	30.24
Energi-energi Baru dan Terbarukan					3.80	3.80
Kesehatan - Obat	6.60	6.00	6.50	6.20	5.64	30.94
Transportasi	5.60	5.43	4.89	6.40	7.00	29.32
Teknologi informasi dan Komunikasi	5.83	6.52	5.07	6.50	6.00	29.92

TABEL 3.9 PENILAIAN KUALITAS INOVASI

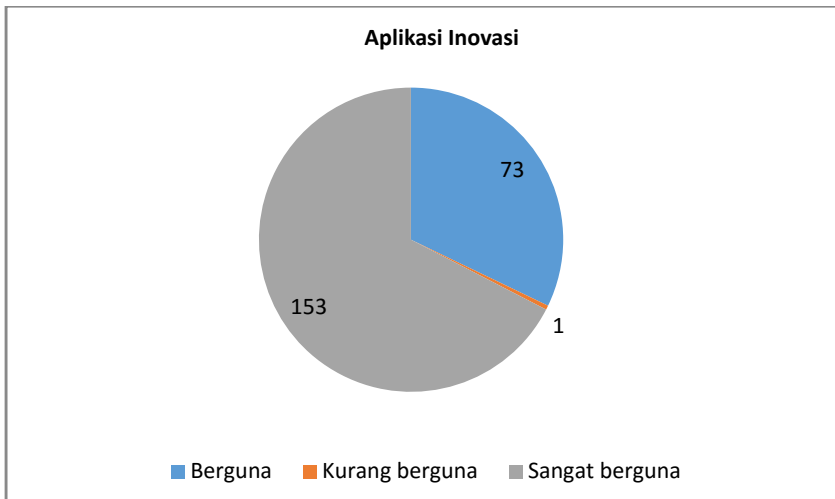
Agenda Riset	Administrasi	Manajemen	Kebijakan	Sosial	Teknologi	Total
Pertahanan dan Keamanan					-	0.00
Material Maju	6.00	4.00	4.00	6.00	7.00	27.00
Kemaritimam (Bioteknologi, Zonasi, Konservasi)	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	33.00
Kebencanaan		7.00		7.00		14.00
Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	6.63	6.19	5.79	6.09	5.23	29.92


Gambar 3.13. Penilaian kualitas inovasi

3.9 Aplikasi (Penerapan) Inovasi

Secara operasional, penerapan inovasi pada berbagai bidang kajian dan lembaga mempertimbangkan aspek seperti: (1) inovasi yang sudah diaplikasikan secara luas dalam konteks pelayanan publik; (2) inovasi yang diaplikasikan secara terbatas (internal instansi); (3) inovasi yang belum diaplikasikan, dan (4) inovasi masih merupakan hasil penelitian dasar (*invention*). Di mana aplikasi inovasi pada masing-masing area penggunaan inovasi tersebut dinilai dengan kriteria kurang berguna, berguna, dan sangat berguna.

Gambar 3.14 menunjukkan bahwa dari total 227 inovasi yang terinventarisir di Papua Barat, sebanyak 153 inovasi dinilai sangat berguna, 73 inovasi dinilai berguna, dan 1 inovasi kurang berguna.

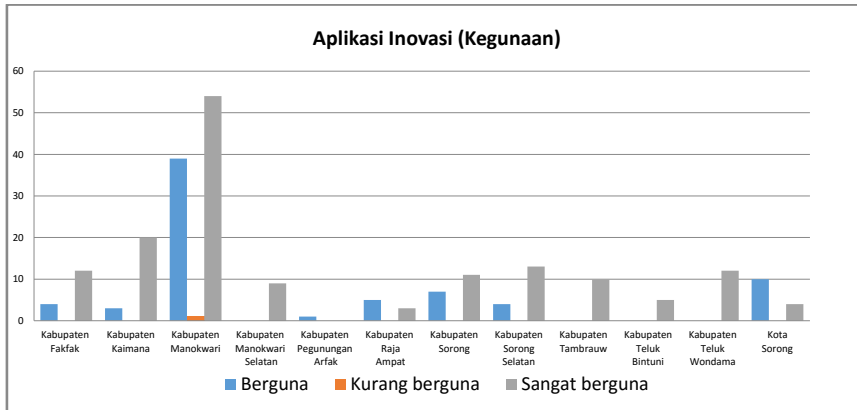


Gambar 3.14. Aplikasi (Penerapan) inovasi

Kabupaten Manokwari paling banyak inovasinya yang dinilai sangat berguna, yaitu dari sebanyak 54 inovasi, 39 diantaranya dinilai berguna, sementara 1 inovasi dianggap kurang berguna. Posisi berikutnya adalah Kabupaten Kaimana, yaitu memiliki 20 inovasi yang dinilai sangat berguna dan 3 inovasi dinilai berguna. Selanjutnya Kabupaten Sorong Selatan, yaitu memiliki 13 inovasi yang dinilai sangat berguna dan 4 inovasi yang dinilai berguna (**Tabel 3.10** dan **Gambar 3.15**). Jika ditinjau dari area inovasi, maka teridentifikasi bahwa area inovasi manajemen yang paling banyak terdapat inovasi yang dinilai sangat berguna, kemudian area inovasi teknologi, administrasi, kebijakan, dan sosial.

TABEL 3.10. APLIKASI (PENERAPAN) INOVASI DI MASING-MASING KABUPATEN/KOTA DI PAPUA BARAT

Kab/Kota	Berguna	Kurang Berguna	Sangat berguna	Total
Kabupaten Fakfak	4		12	16
Kabupaten Kaimana	3		20	23
Kabupaten Manokwari	39	1	54	94
Kabupaten Manokwari Selatan			9	9
Kabupaten Pegunungan Arfak	1			1
Kabupaten Raja Ampat	5		3	8
Kabupaten Sorong	7		11	18
Kabupaten Sorng Selatan	4		13	17
Kabupaten Tambrau			10	10
Kabupaten Teluk Bintuni			5	5
Kabupaten Teluk Wondama			12	12
Kota Sorong	10		4	14
Gran Total	73	1	153	227



Gambar 3.15. Aplikasi (Penerapan) Inovasi di masing-masing kabupaten/Kota di Papua Barat

3.10. Penciptaan Inovasi di Papua Barat

1. Budaya Inovasi

Kesan rigid, prosedural, statis, formal dalam sektor pelayanan publik oleh pemerintah, seringkali menjadi tantangan/penghambat dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Keadaan ini hanya mampu dieliminir melalui budaya inovasi. Filosofi inovasi pelayanan publik, yakni: inovasi dapat memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*) dan memangkas waktu yang panjang (*cut off the time*), harus mewarnai semangat berinovasi di Papua Barat.

Budaya inovasi tidak terlepas dan tuntutan publik dan dinamika perubahan eksternal yang cepat sekali terjadi di luar organisasi publik. Juga adanya perubahan yang terjadi di masyarakat dengan tingkat literasi yang baik, mempunyai kesadaran yang baik akan haknya. Dengan demikian, sektor publik harus dapat menjadi sektor yang paling cepat merespon setiap perubahan yang terjadi.

Sinyal perubahan ke arah budaya inovasi sudah mulai tampak di Papua Barat. Keadaan ini mulai terlihat di Kota Sorong, di mana sejak tahun 2018 pemerintah Kota Sorong sudah melakukan inovasi dan melakukan launching inovasi yang dihasilkan bagi kepentingan pelayanan publik di Kota Sorong. Dan setelah itu, setiap tahun kota Sorong melaunching inovasi yang dihasilkan kepada publik. Beberapa wilayah lainnya seperti Bintuni mampu tampil dengan inovasi yang unggul di tingkat nasional. Ini merupakan sebuah contoh untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan pelayanan publik di Papua Barat.

Disisi lain lembaga riset dan perguruan tinggi di Papua Barat sebagai sumber inovasi, sejauh ini sudah memiliki pola menghasilkan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Di perguruan tinggi dengan tri dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (LPPM) tidak hanya berperan dalam menghasilkan inovasi yang dapat diaplikasikan, tetapi cukup dapat menghasilkan inovasi yang bernilai strategis bagi Papua Barat. Demikian halnya lembaga riset (BPTP Papua Barat dan Balai Penelitian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (BPKL) banyak menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi. Aspek diseminasi yang harus diperkuat agar inovasi yang dihasilkan dapat diadopsi dan dimanfaatkan oleh publik.

Kehadiran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat yang telah memulai perannya di Papua Barat memperkuat budaya inovasi di Papua Barat melalui berbagai kajian dan diseminasi hasil kajian kepada publik. Gagasan perlombaan inovasi yang secara rutin dijalankan baik oleh Balitbangda dan Biro Organisasi Pemerintah Daerah Papua Barat selama ini ikut mendorong terbangunnya budaya inovasi pada OPD di Papua Barat. Pada level nasional, Papua Barat berkeinginan untuk dapat mengikutsertakan inovasi unggulannya dalam ajang IGA (*Innovative Government Award*) oleh Kementerian Dalam Negeri, maupun oleh Kementerian PANRB. Hal ini semua ikut mendorong meningkatnya budaya inovasi di Papua Barat.

Dimasa yang akan datang, diharapkan adanya implementasi berbagai ide kreatif dan inovatif untuk dapat meningkatkan budaya inovasi di Papua Barat. Pemberian penghargaan kepada mereka yang menghasilkan inovasi perlu dilakukan untuk mendorong motivasi para ASN untuk berinovasi. Para pimpinan OPD diharuskan untuk dapat menghasilkan inovasi bagi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang pelayanannya. Dan hal ini harus menjadi salah satu kriteria penilaian promosi jabatan ASN.

2. Pihak yang Menginisiasi Inovasi (*Top down Innovations-Bottom up Innovations*)

Siapa yang memimpin perubahan perilaku, perubahan inovasi. Top manajemen adalah hirarki yang lebih tinggi. Sedangkan *bottom up innovations* merujuk pada pekerja atau pegawai pemerintah dan pengambil keputusan pada pada tingkat unit (*mid-level policy makers*). Dalam kasus iniasiasi inovasi di Papua Barat, umumnya berasal dari *mid-level policy*. Inisiatif untuk memulai inovasi dimotivasi oleh efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas layanan. Sebagian kecil inovasi yang dihasilkan merupakan bagian dari tugas akhir diklat kepemimpinan melalui pengajuan proyek perubahan. Banyak juga inovasi yang dihasilkan dalam pengajuan proyek perubahan, namun tidak dimanfaatkan pada instansi yang bersangkutan karena berbagai alasan, seperti: atasan kurang mendukung, orang yang menghasilkan inovasi pindah instansi sehingga tidak ada yang bisa melaksanakan inovasi yang dihasilkan, dan lain sebagainya.

Dari hasil identifikasi terlihat bahwa 5% dari jumlah inovasi yang digunakan bagi kepentingan pelayanan publik di Papua Barat berasal dari Instansi Pusat yang merupakan *top down innovation*. Inovasi ini umumnya yang dipakai di beberapa instansi, seperti: Dinas Kependudukan dan catatan sipil, SAMSAT, Statistik, Badan Keuangan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain.

Keadaan yang relatif sama berlaku bagi lembaga riset dari kementerian teknis yang ada di Papua Barat, yaitu bersifat *top down* dan *bottom up innovations*. Untuk melaksanakan program nasional di daerah, maka inisiatif program riset inovasi ditetapkan di tingkat kementerian. Sebagai contoh di kementerian

pertanian, menetapkan tujuh komoditas strategis: bawang merah, padi, jagung, kedelai, cabai, daging sapi, dan gula untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kementerian pertanian menetapkan pula target output dan outcome yang akan dicapai. Riset inovasi diarahkan untuk mendukung program dan target yang telah ditetapkan. Secara hirarki mulai dari riset dasar oleh Balai-Balai Penelitian Komoditas yang menghasilkan komponen teknologi, yang kemudian diadaptasikan secara luas untuk menghasilkan paket teknologi spesifik lokasi sesuai kondisi agroekosistem setempat oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang ada di daerah.

Selain itu, lembaga riset di level daerah diberi ruang untuk merencanakan dan melaksanakan kajian untuk menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi. Paradigma riset-inovasi *bottom up* ini diawali dengan identifikasi permasalahan riset dan kebutuhan inovasi secara langsung di lapangan dan kemudian menyusun dan melaksanakan riset inovasi. Sebagian besar penelitian bersifat partisipatif, sehingga pengguna inovasi dapat melihat dan mengukur secara langsung manfaat inovasi bagi penerima inovasi. Dapat juga dilakukan pendekatan diseminasi melalui berbagai media diseminasi agar inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Paradigma ini merupakan sebuah proses yang lazim dilaksanakan dalam riset dan pengembangan di lingkup Badan Litbang Pertanian.

3. Inovasi yang didasarkan atas Kebutuhan-Efisiensi (Need-led Innovations and Efficiency-Led Innovation)

Sebagian besar inovasi yang dihasilkan di Papua Barat didasarkan atas kebutuhan pelayanan publik, yakni dalam konteks pelayanan, prosedur, dan produk. Persyaratan kelulusan dalam diklat kepemimpinan ASN menyebabkan seorang ASN mengerjakan proyek perubahan yang diharapkan menghasilkan sebuah inovasi bagi pelayanan publik. Namun dari hasil identifikasi lapangan tergambar bahwa sebagian besar proyek perubahan yang dikerjakan belum didasarkan atas pertimbangan kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini juga merupakan salah satu sebab tidak termanfaatkannya inovasi yang dihasilkan. Dari hasil analisis, sebagaimana tersaji pada bagian pembahasan penggunaan inovasi bagi pelayanan publik, tergambar bahwa semua inovasi yang telah

diaplikasikan, proses inisasinya didasarkan atas kebutuhan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kebutuhan inilah yang lebih mendorong penggunaan sebuah inovasi.

Dalam konteks inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, teridentifikasi masih banyak riset belum didasarkan pada kebutuhan publik, sehingga banyak penelitian yang hanya sampai pada menghasilkan invensi dan belum menghasilkan inovasi yang dapat digunakan publik. Sebaliknya, ada juga inovasi di perguruan tinggi dan lembaga riset yang dihasilkan berdasarkan kebutuhan lokal/spesifik. Akan tetapi, belum diketahui dan digunakan oleh publik yang membutuhkan. UNIPA sudah menghasilkan peralatan rekayasa pengolahan dan ekstrak tepung sagu, namun belum banyak diketahui dan digunakan oleh petani sagu. Diseminasi secara masif melalui berbagai pendekatan sangat dibutuhkan untuk akselerasi pemanfaatan inovasi.

4. Keaslian (*Novelty*) Inovasi

Sangat jarang dijumpai bahwa suatu inovasi itu benar-benar baru. Umumnya suatu inovasi merupakan perbaikan dari inovasi sebelumnya. Semua penelitian untuk menghasilkan inovasi biasanya berdiri atas pengetahuan sebelumnya. Terkait dengan sifat kebaruan (*novelty*), dunia riset mengenal “*front line*”, yaitu sesuatu yang baru dan berada di depan dari penemuan pada bidang tersebut. Hal ini dapat dikonfirmasi melalui publikasi ilmiah pada bidang yang bersangkutan. Dengan publikasi ilmiah, sebuah inovasi yang dihasilkan dapat dinilai oleh mereka yang terkemuka di bidangnya, sehingga dapat menilai sejauhmana kebaruan sebuah inovasi. Aspek ini lebih banyak terjadi pada inovasi teknologi yang umumnya dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga riset.

5. Perbaikan Inovasi-Perubahan Radikal Inovasi (*Inovasi Incremental Innovation-Radical Innovation*)

Inovasi yang sifatnya perbaikan-incremental dan Inovasi yang berhubungan dengan tingkat keaslian (*novelty*). Berdasarkan hasil analisis 227 inovasi di Papua Barat, teridentifikasi sekitar 69 inovasi dari 277 merupakan perbaikan, incremental dari inovasi sebelumnya, 110 inovasi dikategorikan pelayanan

baru atau pelayanan yang diperbaiki, 6 inovasi yang masuk dalam kategori inovasi administratif, penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan. Sementara itu, terdapat 1 inovasi yang masuk dalam kategori inovasi sistem, yakni sistem baru atau perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau bentuk baru kerjasama interaksi, maupun masuk dalam kategori inovasi konseptual, perubahan dalam *outlook* (cara pandang).

Sementara itu teridentifikasi pula tiga inovasi yang memiliki tingkat keaslian (*novelty*) yang cukup tinggi. Inovasi tersebut adalah:

- a. Senyawa baru "Kaimanol" Senyawa baru antiplasmodium (anti malaria) yang potensial bagi pengembangan farmasi menjadi obat.
- b. Akwai Sehat "Isotonik" produk minuman suplemen yang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi tubuh.
- c. Model Prediksi Iklim dan Produksi Pala Papua.
- d. Kebijakan Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan
- e. Deklarasi Manokwari

➤ *Senyawa baru "Kaimanol"*

Senyawa baru "Kaimanol" merupakan suatu temuan baru (*discovery*) yang berpotensi dikembangkan di bidang farmasi.

➤ Akwai Sehat Isotonik

Akwai Sehat Isotonik menggunakan ekstrak kulit kayu Akwai yang mana dari sisi ide adalah bagaimana mengangkat keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui pengolahan dan packaging yang baik dan menarik.

➤ Model Prediksi Iklim dan produksi Pala Papua

Model prediksi iklim dan produksi pala dikembangkan berdasarkan fakta empiris variabilitas iklim dan produksi pala Fakfak. Persamaan empiris dibangun dari hubungan tersebut dan digunakan dalam algoritma dan *soft computing*. Model ini digunakan oleh Dinas Perkebunan dalam memprediksi perubahan produksi akibat anomali iklim dan beberapa musim kedepan.

Hasil ini menjadi acuan dalam kebijakan antisipatif (*early warning system*) terhadap kehilangan hasil dan kerugian ekonomi yang dialami oleh petani pala.

➤ Kebijakan Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan

Inovasi kebijakan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi berkelanjutan dapat dianggap sebagai sebuah perubahan yang cukup radikal dalam kebijakan pembangunan di Papua Barat. Secara nasional, Papua Barat mengambil posisi pertama dan terdepan dalam inovasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan yang menitik beratkan pada penggunaan sumberdaya alam dan sosial budaya masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan ini dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan nama Provinsi Konservasi yang dilanjutkan dengan pembentukan Pokja yang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RANPERDASUS) Provinsi Konservasi melalui Surat Keputusan Gubernur No.522.5/123/6/2015.

Dalam konteks mewujudkan provinsi berkelanjutan, banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah Papua Barat dan melibatkan berbagai pihak di daerah dan pusat dengan proses dan mekanisme yang cukup sulit. Perubahan/penambahan dalam peraturan daerah dan penyesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi, hingga perencanaan dan pelaksanaan program oleh instansi di Papua Barat. Setelah melewati proses yang panjang akhirnya tanggal 25 September 2020, Perdasus Pembangunan Berkelanjutan No. 10 Tahun 2019 dapat diluncurkan.

➤ Deklarasi Manokwari

Deklarasi Manokwari merupakan gagasan-gagasan pokok yang terdiri 14 kesepakatan yang dicetuskan untuk memperkuat pelaksanaan Papua Barat sebagai provinsi berkelanjutan pada tanggal 10 Oktober 2018. Deklarasi ini didasarkan atas hasil Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) dan merujuk pada Nota Kesepahaman antara Provinsi Papua dan Papua Barat yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2018 tentang pembangunan berkelanjutan berbasis

wilayah adat di Tanah Papua. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menyatakan deklarasi Manokwari yang berisi 14 point kesepakatan penting sebagai berikut:

Pertama, menegaskan kembali komitmen pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan menuangkannya melalui Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua Barat, revisi atau peninjauan RTRWP Papua dan RTRWP Papua Barat yang mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung, RZWP3K dan revisi serta kajian paruh waktu RPJMD Provinsi Papua Barat dengan mengintegrasikan wilayah masyarakat adat, penguatan implementasi Visi 2100 Provinsi Papua dan penyusunan RPJMD 2019-2023 Provinsi Papua yang berkelanjutan dan kontekstual Papua.

Kedua, berkomitmen untuk melindungi hak dan memperkuat peran masyarakat adat melalui Perdasus Provinsi dan Perda Kabupaten yang mengakui keberadaan masyarakat adat, nilai budayanya, wilayah adat dan tata kelola dan kelembagaannya, termasuk di dalamnya wilayah hutan dan perairan adat berdasarkan kearifan lokal dan pemanfaatan berkelanjutan. Pembiayaan pemetaan wilayah adat dan mendorong pembentukan tata layanan pendaftaran tanah-tanah masyarakat adat dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah adat.

Ketiga, berkomitmen kuat untuk menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan terkait sumber daya alam dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan, menerapkan moratorium izin-izin baru perkebunan skala besar, pertambangan dan industri berbasis lahan, serta meninjau ulang izin-izin yang telah terbit dengan membentuk tim kerja khusus untuk itu.

Keempat, bersama dengan pemerintah pusat berkomitmen untuk mengatur skema pendanaan berkelanjutan dan insentif fiskal ekologis, yang ditegaskan melalui peraturan perundang-undangan, kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota baik melalui DAU, DAK, DID, Dana Otsus, dan/atau Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, serta mempercepat Peraturan Daerah Khusus tentang Dana Bagi Hasil (DBH) dan implementasinya.

Kelima, berkomitmen untuk segera membentuk Komisi Informasi Provinsi Papua Barat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data dan informasi melalui peningkatan sistem informasi yang terintegrasi, baik secara lokal maupun lintas sektor termasuk dengan pusat.

Keenam, berkomitmen untuk mengembangkan Museum Sejarah Alam dan Kebun Raya di Tanah Papua yang menunjang upaya konservasi dan penampungan koleksi, penelitian dan peningkatan pemahaman dan apresiasi tentang keanekaragaman hayati alam dan budaya Papua.

Ketujuh, berkomitmen untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan, termasuk masyarakat adat dalam berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan penting untuk mendukung proses perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, manajemen kawasan lindung, ekowisata dan perikanan berkelanjutan. Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan serta mengembangkan sistem manajemen informasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Kedelapan, mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan produk-produk bernilai ekonomis tinggi untuk kemudian dikelola oleh masyarakat adat dengan dukungan akses pasar dan pendanaan atau pembiayaan yang sesuai.

Kesembilan, Mendorong pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan sesuai amanat pasal 64 UU 21/2001, serta berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan SDA berkelanjutan dan akses manfaat oleh masyarakat adat yang juga menjadi amanat dari UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua provinsi juga berkomitmen mendorong adanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan pembangunan di Tanah Papua melalui upaya konsultasi aktif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai mana diamanatkan oleh INPRES 9/2017.

Kesepuluh, berkomitmen untuk menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi daratan, perairan baru di Tanah Papua, kawasan konservasi esensial, pengelolaan mangrove, rawa gambut, rawa sagu, penetapan kawasan strategis setempat, perlindungan sumber daya genetik dan spesies endemik dan terancam punah dan perlindungan kawasan karst serta meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan yang memiliki legalitas agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kesebelas, berkomitmen untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan terhadap infrastruktur yang sudah terbangun dan memfokuskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan antara kampung, distrik dan kabupaten yang mendekatkan Orang Asli Papua (OAP) dengan layanan dasar dan pasar lokal.

Kedua belas, berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi percepatan peraturan Gubernur terkait ketahanan pangan di Tanah Papua dengan pelibatan penuh pemerintah, DPR, MRP dan Masyarakat Adat.

Ketiga belas, mendorong kemitraan global, nasional dan lokal serta membentuk platform multipihak untuk mendorong terbangunnya model-model investasi/pembiayaan yang mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang bertujuan bagi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Keempat belas, melanjutkan kerja sama yang sudah terbangun antara masyarakat sipil, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga pendidikan, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kedua provinsi berkomitmen untuk meningkatkan peran dan pengembangan kapasitas perempuan dalam diskusi dan kerja-kerja tentang hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Tanah Papua.

3.11. Tantangan dan Upaya Penciptaan Inovasi di Papua Barat

Dari hasil wawancara dan observasi langsung dijumpai bahwa tidak semua inovasi yang dihasilkan di Papua Barat, dihasilkan secara mulus tanpa resistensi. Banyak dari inovasi yang terkendala oleh berbagai faktor seperti kebijakan atasan, dan penataan organisasi, juga termasuk faktor penghargaan dan insentif merupakan penghambat terbesar dalam mengaplikasikan sebuah inovasi.

Banyak atasan yang masih kurang mendukung pelaksanaan inovasi dalam tugas pelayanannya. Masih banyak atasan yang kurang merasa nyaman, karena inisiasi pelaksanaan inovasi datang dari bawahan. Keadaan ini terutama terjadi pada atasan yang kurang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas tugas layanan melalui dukungan inovasi. Ada juga atasan mungkin belum memahami baik tentang inovasi yang dihasilkan bawahan, sehingga tidak mendorong penggunaan inovasi. Ada juga kasus di mana pergantian unsur pimpinan, di mana pimpinan baru tidak memahami, bahkan tidak mau menggunakan inovasi yang diterapkan oleh pipinanan sebelumnya. Hal ini lebih disebabkan oleh faktor ketidakpahaman atau faktor gengsi.

Banyak instansi yang sangat tergantung pada terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor pelayanan publik hanya menjadi pengikut (*follower*). Ketika figur tersebut pindah, maka yang terjadi adalah stagnasi kerja, terutama dalam aplikasi sebuah inovasi.

Hambatan lain, anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi tidak fleksibel. Sejalan dengan itu juga biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit.

Masih sering terjadi overlap kegiatan penciptaan inovasi, terutama lembaga riset dan perguruan tinggi. Hal ini terutama karena kurangnya sinergi, bahkan belum ada jejaring kemitraan penciptaan inovasi di Papua Barat. Inovasi tertentu yang sudah dihasilkan oleh lembaga riset, dapat pula dihasilkan di perguruan tinggi. Hal ini berbeda dengan kemungkinan duplikasi inovasi dalam konteks pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik yang baik di suatu daerah, dapat diduplikasi dan digunakan di tempat lain.

Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan Balitbangda melalui pelaksanaan riset inovasi dengan menginisiasi lomba inovasi antar ASN di Papua Barat dalam rangka menyongsong hari KORPRI. Selain itu, Biro Organisasi Pemerintah Daerah Papua Barat mulai rutin menyelenggarakan pameran inovasi di Papua Barat. Perda Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang dihasilkan oleh Balitbangda Papua Barat sejak tahun 2018 kedepan jika disahkan maka dapat mengakomodir sinergi antar instansi litbang-perguruan tinggi dan pembiayaan pelaksanaan riset strategis bagi penciptaan daya saing Papua Barat.



BAB IV **PENUTUP**

PENUTUP

Inovasi Daerah di Provinsi Papua Barat diidentifikasi sebanyak 227 inovasi. Berdasarkan sumber inovasi, kelompok litbang (Litbang Teknis dan Perguruan Tinggi) menghasilkan sebanyak 69 inovasi, kelompok OPD menghasilkan 136 inovasi, dan kelompok NGO menghasilkan 22 inovasi. Kelompok Litbang yang menghasilkan inovasi berada di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. NGO yang menghasilkan inovasi adalah NGO yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Fakfak, dan Kaimana.

Kabupaten Manokwari menduduki posisi tertinggi dalam menghasilkan inovasi, yaitu sebanyak 94 inovasi, diikuti oleh Kaimana 23 inovasi, kabupaten Sorong 18 inovasi, Kabupaten Sorong Selatan 17 inovasi, Kabupaten Fakfak 16 inovasi, Kota Sorong 14 inovasi, Kabupaten Teluk Wondama 12 inovasi, Kabupaten Tambrauw 10 inovasi, Kabupaten Manokwari Selatan 9 inovasi, Kabupaten Raja Ampat 8 inovasi, Kabupaten Teluk Bintuni 5 inovasi, dan Kabupaten Pegunungan Arfak 1 inovasi.

Dari sisi instansi, terdapat 65 instansi yang teridentifikasi sebagai penghasil inovasi. Instansi penghasil inovasi terbanyak adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat dengan jumlah inovasi sebanyak 25 inovasi, diikuti oleh Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari 14 inovasi, Universitas Muhamadiyah Sorong 12 inovasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 12 inovasi, Industri Mikro Pengolahan Pangan Berbasis Kearifan Lokal 10 inovasi, Bappeda 10 inovasi, Universitas Papua 9 inovasi, LPPM Universitas Papua 7 inovasi, Dinas Perhubungan 6 inovasi, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP 5 Inovasi. Sebanyak 55 Instansi lainnya umumnya berkisar 1-3 inovasi.

Berdasarkan fokus bidang riset nasional, bidang perkebunan menduduki peringkat pertama dalam jumlah inovasi, yaitu 52 inovasi diikuti oleh bidang teknologi informasi dan komunikasi 45 inovasi; pangan pertanian dan humaniora sosial, masing-masing 30 inovasi; Humaniora pendidikan 17 inovasi; kesehatan-obat 16 inovasi, humaniora ekonomi dan transportasi, masing-masing 8 inovasi; energi terbarukan 5 inovasi; pangan kehutanan

dan pangan perikanan, masing-masing 3 inovasi, peternakan, hankam, kemaritiman-bioteknologi, dan kebencanaan, masing-masing 2 inovasi; material maju dan humaniora budaya, masing-masing 1 inovasi.

Berdasarkan kategori riset, riset pengembangan mendominasi jumlah inovasi, yaitu sebanyak 87 inovasi dengan sebaran: Kabupaten Manokwari 26 inovasi; Kabupaten Sorong Selatan 17 inovasi; Kabupaten Teluk Wondama 12 inovasi; Kabupaten Fakfak 10 inovasi; Kabupaten Tambrau 8 inovasi; Kab Raja Ampat 7 inovasi; Kabupaten Sorong Selatan 6 inovasi; Kabupaten Teluk Bintuni 5 inovasi. Kategori riset terapan menduduki urutan kedua, yaitu: 82 inovasi dengan sebaran: Kabupaten Manokwari 26 inovasi; Kabupaten Kaimana 23 inovasi; Kota Sorong 14 inovasi; Kab Manokwari Selatan 7 inovasi; Kabupaten Sorong 6 inovasi; Kabupaten Tambrau 2 inovasi; Kabupaten Raja Ampat 1 inovasi. Sisanya termasuk kategori riset dasar berjumlah 16 inovasi dengan sebaran: Kabupaten Manokwari 7 inovasi; Kabupaten Sorong 6 inovasi; Kabupaten Fakfak 3 inovasi.

Berdasarkan area inovasi, inovasi teknologi sebanyak 113 inovasi; inovasi di area administrasi sebanyak 41 inovasi; inovasi di area sosial 27 inovasi; inovasi di area kebijakan sebanyak 26 inovasi; dan inovasi di area manajemen sebanyak 20 inovasi. 113 inovasi teknologi tersebar di Kabupaten Manokwari 73 inovasi teknologi; Kabupaten Fakfak 10 inovasi teknologi; Kabupaten Sorong Selatan 10 inovasi teknologi; Kabupaten Sorong 6 inovasi teknologi; Kabupaten Raja Ampat 5 teknologi; Kabupaten Kaimana 4 inovasi teknologi; Kabupaten Sorong dan Teluk Wondama, masing-masing 1 inovasi teknologi. 41 inovasi administrasi tersebar di Kota Sorong 8 inovasi; Kabupaten Manokwari 7 inovasi; Kabupaten Teluk Wondama 6 inovasi; Kabupaten Manokwari Selatan 5 inovasi; Kabupaten Sorong Selatan 5 inovasi; Kabupaten Kaimana 4 inovasi; Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Teluk Bintuni, masing-masing 2 inovasi. 27 inovasi sosial tersebar di Kabupaten Manokwari 7 inovasi; Kabupaten Kaimana 4 inovasi; Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Wondama, masing-masing 2 inovasi; Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, masing-masing 2 inovasi; Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan

Arfak, masing-masing 1 inovasi. 26 Inovasi kebijakan tersebar di Kabupaten Kaimana 9 inovasi; Kabupaten Manokwari 5 inovasi; Kabupaten Fakfak dan Tambrau, masing-masing 4 inovasi; Kabupaten Teluk Bintuni 2 inovasi; Kota Sorong 1 inovasi. 20 Inovasi di area manajemen tersebar di Kabupaten Sorong 7 inovasi; Kabupaten Manokwari Selatan 3 inovasi; Kabupaten Kaimana, Kab Manokwari, Kabupaten Wondama, dan Kota. Sorong, masing-masing 2 inovasi; Kabupaten Teluk Bintuni dan Raja Ampat, masing-masing 1 inovasi.

Berdasarkan sisi kepentingan pelayanan publik dan penciptaan nilai tambah produk, maka 227 inovasi yang dihasilkan di Papua Barat, terdiri atas 114 inovasi bagi kepentingan pelayanan publik dalam ranah pelayanan publik, dan 113 inovasi teknologi bagi penciptaan nilai tambah dan daya saing produk. Inovasi layanan publik umumnya dihasilkan oleh OPD dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sementara inovasi teknologi lebih banyak dihasilkan oleh lembaga riset dan perguruan tinggi, yang umumnya di hasilkan di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong di mana terdapat Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset. Beberapa inovasi bersifat *topdown* terutama inovasi pelayanan publik, dihasilkan oleh instansi pusat dan digunakan oleh instansi daerah dalam proeses pelayanan publik.

Berdasarkan tipologi inovasi di sektor publik, 69 inovasi masuk dalam kategori: pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki, 110 inovasi masuk dalam kategori inovasi proses, perubahan dalam proses penyediaan pelayanan atau produk. 6 inovasi yang masuk dalam kategori inovasi administratif, penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan. Sementara itu, terdapat 1 inovasi yang masuk dalam kategori inovasi sistem, yakni sistem baru atau perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau bentuk baru kerjasama interaksi, maupun masuk dalam kategori inovasi konseptual, perubahan dalam outlook.

Berhubungan dengan tingkat keaslian (*novelty*) dari inovasi itu sendiri, maka berdasarkan hasil sintesa teridentifikasi: (1) Senyawa baru "Kaimanol" Senyawa baru antiplasmodium (anti malaria) yang potensial bagi

pengembangan farmasi menjadi obat, (2) Akwai Sehat "Isotonik" produk minuman suplemen yang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi tubuh, dan (3) model prediksi iklim dan keragaan produksi Pala Papua, (4) kebijakan Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan, dan (5) Deklarasi Manokwari. Inovasi tersebut jika dikembangkan, tentunya berpotensi meningkatkan daya saing Papua Barat.

Dari hasil wawancara dan observasi langsung dijumpai bahwa tidak semua inovasi dihasilkan secara mulus tanpa resistensi. Banyak dari inovasi yang terkendala oleh berbagai faktor. Kebijakan atasan, dan penataan organisasi, juga termasuk faktor penghargaan dan insentif merupakan penghambat terbesar dalam mengaplikasikan sebuah inovasi. Banyak atasan yang masih kurang mendukung pelaksanaan inovasi dalam tugas pelayanannya. Ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor pelayanan publik hanya menjadi pengikut (*follower*). Ketika figur tersebut pindah, maka yang terjadi adalah stagnasi kerja, terutama dalam aplikasi sebuah inovasi. Hambatan lain, anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi tidak fleksibel. Sejalan dengan itu juga biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit.

Inovasi pelayanan publik dan inovasi nilai tambah produk yang telah dihasilkan dan berhasil diinventarisir di Papua Barat merupakan modal bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penciptaan daya saing daerah. Namun demikian, inovasi hanya akan berhasil apabila masyarakat banyak memiliki kemampuan untuk menjaungkaunya. Inovasi menjadi tidak memiliki arti apa-apa, dan tidak membuat perbedaan apabila tidak dimanfaatkan oleh publik secara luas. Inovasi juga harus memperhatikan budaya dan identitas lokal, sebagai bagian dari proses adaptasi inovasi yang lebih baik. Pemanfaatan identitas lokal, tidak hanya strategis dalam mendekati inovasi kepada penggunannya, tetapi juga bagian dari apresiasi eksisting budaya yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, M.E. 1988. *Agricultural Extension in Developing Countries*. First Edition. Longman Singapore Publisher Pte Ltd. Singapore.
- Adnyana, M.O., Erwidodo, L.E. Amin, Soetjipto, Suwandi, E. Getarawan, dan Hermanto. 1999. *Panduan Umum Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, dan Diseminasi Teknologi Pertanian*. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Basuno, E. dan H. Supriadi. 2001. *Pengembangan teknologi pertanian secara partisipatif di tingkat regional*. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Dewan Riset Nasional 2016. *Agenda Riset Nasional 2016-2019*.
- Halvorsen and Thomas, 2005. *On the differences between publik and private sector innovations*. Publin Report. Oslo.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025)*. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2007.
- Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. 2017. *Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045*.
- Nies, Suk. 2000. *Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. LAN. Jakarta. Roger, E.M. and F.F.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64).
- Shoemaker. 1971. *Communication of Innovation: A Cross Cultural Approach*. The Free Press. New York.
- Simamora, Bilson. 2003. *Membongkar Kotak Hitam Konsumen*. PT. Gramedia. Jakarta

United Nations, 2005. Innovations in the Publik Sector: Compendium of Best Practices. UNDESA, New York.

UU No 23 Thn 2014; UU No 21 Pasal 4, 39, 44; PP No 38 Tahun 2017).

Van den ban, A.W. and Hawkins, H.S. 1996. Agricultural Extension. Second Edition. John Wiley & Son, Inc. New York.

Wiratno, U. dan Wijayanti, U. 2011. Pembangunan pertanian untuk meningkatkan ekonomi perdesaan di era otonomi daerah. <http://wiratno81.wordpress.com/2011/10/22/> [2 Febuari 2012].



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)				
NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI
			SEBELUM	SESUDAH
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	1. BELANANDA (Begitu lahir anak langsung mendapat akta)	Menyapkan dokumen akta pada saat kelahiran (Kerja sama Dinas DUKCAPIL dengan RSUD Manokwari)	Bayi yang lahir di RSUD tidak mendapatkan Akta. Akta diurus oleh orang tua di Dinas Dukcapil. Akta dapat jadi 3 hari bahkan bisa seminggu.
			2. Buku Data OAP (Orang Asli Papua) Pada Kabupaten Manokwari	Belum ada informasi dalam bentuk buku yang memuat OAP di Kab. Manokwari. Program otonomi khusus tidak didukung oleh data penduduk orang asli Papua.
2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1. PIN tolak gratifikasi	Menolak pembayaran atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengurus perizinan.	Petugas menerima bayaran atau sesuatu imbalan dari masyarakat yang mengurus perizinan.
			2. ACEMO (Aplikasi cerdas e- Perizinan Manokwari)	Petugas tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun karena telah memakai PIN dengan tulisan “ Tolak Gratifikasi” sehingga ini menjadi komitmen bersama dan petugas untuk melakukan pelayanan .
			Mempermudah masyarakat mengurus Perizinan tanpa harus datang ke kantor, karena semua informasi dan persyaratan sudah tersedia	Masyarakat tidak perlu datang ke kantor karena dapat melihat persyaratan di aplikasi serta mengurus perizinan secara online, dokumen akan selesai lebih cepat jika persyaratan sudah lengkap.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
3	SATPOL PP Prov. Papua Barat	Jemput Bola IMB	Mendatangi Distrik, sosialisasi, pendataan dan Pelayanan IMB	Masyarakat ke kantor, melengkapi persyaratan, antri, dan mengikuti prosedur yang ada. IMB dapat selesai 3-5 hari.	Petugas bekerjasama dengan Kepala Distrik, Tim mendatangi distrik yang jauh (sudah dikakan di daerah Profri), petugas sosialisasi, Petugas melakukan pendataan, masyarakat melengkapi persyaratan, petugas mengurus IMB pada hari yang sama dokumen IMB dapat diberikan kepada masyarakat.
				Semua dokumen antri untuk mendapatkan Tanda Tangan Kepala Dinas. Jika Kepala Dinas keluar daerah maka Pelayanan Perizinan akan mengalami keterlambatan.	Semua dokumen yang dapat ditandatangani secara digital. Jadi semua pengurusan dapat selesai cepat.
3	SATPOL PP Prov. Papua Barat	Gerakan bersama Komasih usibeta (Kota Manokwari bersih usaha intensif kita bersama)	Bersama berusaha menjaga kebersihan kota Manokwari	Kebersihan kota hanya menjadi tanggung jawab Dinas teknis terkait.	Tim Terpadu Manokwari bersih (terdiri dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Lurah, Distrik, RT/ RW, pihak puskesmas) bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kota Manokwari.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
4	Perawatan Luka Modern Manokwari	Home Care Manokwari	Membantu perawatan luka diabetes, luka pasca operasi, mencegah amputasi	Masyarakat datang ke RSUD, RSAL, Puskesmas, mengurus BPJS, antri dan bertemu pegugas perawat untuk membersihkan luka serta melakukan control untuk pengobatan lainnya	Perawat mendarangi rumah pasien yang sudah di data, merawat luka di rumah serta memeriksa atau control beberapa penyakit seperti Diabetes, asam urat, dan kolesterol melalui pemeriksaan darah. Petugas konsultasi ke dokter dan dapat memberikan obat sesuai keluhan pasien.
5	Kelompok Perempuan Pokja "VIVA"	Keripik Sukun Amenya	Menghasilkan satu produk makanan	Diolah menjadi gorengan biasa	Diolah mejadi 1 produk keripik yang dikemas secara baik. Terdiri dari beberapa rasa (Original, BBQ, dan Rasa Keju)
6	Dinas PPA dan KB	1. SIPIMA (Sistem Informasi Perencanaan Manajemen) 2. SIDAK PEREMPUAN (Sistem penyajian data kasus kekerasan terhadap perempuan)	Menyimpan data laporan kegiatan dan juga evaluasi	Data perencanaan diarsipkan dalam bentuk buku laporan	Data tersimpan dalam aplikasi, dapat dilihat dengan mudah ketika menggunakan aplikasi. Data tersimpan dalam bentuk aplikasi, mudah untuk mendapat informasi. Data dapat disajikan dalam bentuk grafik, sehingga mudah untuk melihat tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
3.	Perempuan	Satgas Perempuan	Menerima laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan melapor ke Dinas untuk di tindak lanjuti (Perpanjangan tangan Dinas PPA dan KB)	Korban kekerasan sendiri harus melapor mengikuti alur prosedur yang panjang dan membutuhkan waktu yang 5 – seminggu untuk di proses	Korban langsung melapor pada satgas yang berada pada masing-masing distrik juga kampung. Satgas melaporkan ke Dinas PPA dan KB, sehingga ditindaklanjuti dengan cepat. Satgas Perempuan ini menjadi perpanjangan tangan dari dinas PPA dan KB.
4.	Perempuan Mandacan Suka IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	Metode praktis untuk deteksi dini kanker serviks	Metode praktis untuk deteksi dini kanker serviks	Perempuan takut dan tidak mau melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks	Kegiatan Pemeriksaan deteksi kanker serviks ini dilaksanakan kegiatan ada kegiatan besar, seperti HUT Kartini, Hari Ibu dan HUT Nasional lainnya sehingga Ibu-ibu bersedia dan tidak takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dokter dan tenaga kesehatan pada RSUD dan Puskesmas.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
			TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM
7	UPTD Samsat	1. E-Samsat	Memudahkan pengurusan administrasi pajak	<p>Masyarakat antri di kantor Samsat, mengikuti prosedur yang ada, membayar pajak secara tunai dan menerima bukti pajak.</p> <p>Masyarakat melihat semua persyaratan dan mengikuti semua prosedur dalam aplikasi. Membayar di ATM dan kembali konformasi di UPTD Samsat setelah itu baru terima bukti pajak.</p> <p>Sejak ada aplikasi ini pada tahun 2013, wajib pajak tidak terlanjur merespon menggunakan aplikasi karena mengurus pajak secara manual ternyata lebih praktis dibandingkan E- Samsat. Ini yang membuat penggunaan tidak maksimal.</p>
		2. E- Teller	Memudahkan pengurusan administrasi pajak via teller (Non tunai)	<p>Pengguna wajib pajak bisa mengurus pada Samsat kellinging tanpa harus datang ke kantor. Namun E-Teller juga penggunaannya tidak maksimal karena pengguna lebih terbiasa dengan pengurusan di kantor UPTD Samsat.</p>

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
8	Inspektorat	Posko SABER PUNGLI (Satuan tugas sapu bersih pungutan liar)	Menerima laporan pengaduan dan menindaklanjuti terkait PUNGLI	Belum ada posko SABER PUNGLI. Pengadu melapor ke Inspektorat dan Inspektorat mengikuti tahapan panjang sesuai dengan SOP.	TIM bekerja sama dengan Kepolisian. Melakukan sosialisasi sehingga semua Pihak pemerintah dan masyarakat mengetahui adanya Posko SABER PUNGLI dan tahu prosedur pengadu. Prosedurnya: Ada laporan, lapor tim untuk penyelidikan, tindaklanjuti, proses sesuai hukum. Dapat juga menghubungi via Call Center.
9.	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)	1. VCO Byrias (Virgin Coconut Oil) 2. Teh Akwai	Menghasilkan produk minyak dengan metode pengandukan mekanik asam jeruk nipis dengan santan kelapa Menghasilkan produk Tea celup dari akwai	Menggunakan metode sentrifugasi dan pancingan minyak kelapa. Proses lama dan memakan biaya yang mahal.	Menggunakan metode pengadukan dengan asam jeruk nipis dengan santan kelapa. Metodenya praktis dan murah Kulit kayu akwai dibuat menjadi produk teh celup yang sudah dikemas, sehingga memudahkan dalam pemanfaatannya.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI		
			TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM	
			DESKRIPSI INOVASI	SESUDAH	
3.		Byrias Tea Merah	Menghasilkan produk Tea celup dari <i>Clerodendrum paniculatum</i> .	Tumbuhan <i>Clerodendrum paniculatum</i> .	Daun tumbuhan ini dijadikan produk tea celup yang sudah dikemas
4.		Brownis Buah Merah	Menghasilkan produk kue dari buah merah	Buah merah merupakan tanaman endemik tanah Papua yang kaya akan zat antioksidan, sehingga digunakan sebagai pangan sehat. Selama ini, lebih banyak diekstrak sebagai minyak, yang sering dikenal dengan minyak buah merah.	Sebagai alternatif, pasta buah merah dijadikan produk kue dalam kemasan
5.		Dodol Buah Merah	Menghasilkan produk dodol dari buah merah	Pasta buah merah	Produk Dodol dalam kemasan
6.		Sistik Buah Merah	Menghasilkan produk sistik dari buah merah	Pasta buah merah	Produk Sistik dihasilkan dari pasta buah merah. Produk ini sudah dikemas.
7.		Abon Ayam "Sa Suka"	Menghasilkan produk Abon dari ayam	Ternak ayam yang banyak	Produk Abon ayam dalam kemasan
8.		Bryas Nursery	Wadah pembelajaran (Budidaya tanaman hias "Grafting, okulasi, cangkok", Pembuatan vertical garden	Belum ada tempat pembelajaran untuk budidaya	Ada tempat pembelajaran budidaya tanaman

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
9.		Akwai Sehat "Isotonik"	Minuman Suplemen untuk kesehatan	masyarakat Pegunungan Arfak ketika berjalan jauh, yaitu hanya dengan cara direbus dengan air didinginkan lalu diminum.	Inovasi berupa produk olahan minuman sehat dengan bahan utama kulit kayu tanaman endemik Pegunungan Arfak, kayu akwai (<i>Drymis peperita hook</i>) yang memiliki kandungan: alkaloid, flavonoid, steroid, tannin, saponik, dan fenolik. Diracik dengan ditambahkan rempah-rempah: Kayu Manis, Cengkeh, Sere, Merica, Mandu, dan Gula aren. Sehingga dapat memungkinakan untuk meningkatkan stamina, dapat mengobati asma, demam karena malaria, dan lain-lain. Isotonik Akwai Sehat dikemas dalam botol plastik ukuran 250 ml dan 500 ml. Sedang dilakukan proses uji sertifikasi di BPPM Manokwari dan BPOM Jakarta Pusat untuk pendaftaran Obat tradisional. Hak Paten dan Merek sudah didaftarkan di Dirjen HAKI Kemenkumham.
10.	Papua Kebar Herbs Tea	Menghasilkan produk Tea celup dari rumput kebar	Rumput kebar		Produk minuman tea yang sudah dikemas dalam botol

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI			
			TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM	SESUDAH	
			11. Rumput Kebar kering	Mengemas rumput kebar menjadi produk	Rumput kebar basah	Dikeringkan dan sudah rapi dalam kemasan plastic dan diberi label.
		12. BB (BERAS BEJO)	Memproduksi dan mengemas beras beras sehat	-	Beras sudah dikemas dalam plastic rapi	
		13. MARON (Manisan Terong) Rasa Coklat, Original	Menghasilkan produk Manisan terong dengan rasa original dan coklat	Tanaman Terong	Produk manisan yang sudah dikemas dengan dua varian :original dan coklat.	
		14. PWMP Mart Polbangan Manokwari	Menyediakan produk-produk hasil pertanian	Tidak ada tempat praktis untuk memasarkan produk hasil pertanian	Terdapat tempat yang praktis, berada dalam lingkungan sekolah untuk menjadi wadah memasarkan produk-produk hasil pertanian.	
10.	Balai Penyuluhan Pertanian Distrik Prafi	1. Souce Cabe	Antisipasi cabe murah	Cabe melimpah dan bisa busuk	Produk saos dalam kemasan	
		2. Keripik pisang (rasa coklat, manis, asin)	Mengolah pangan lokal menjadi produk	Tanaman pisang	Tersedia Produk dalam kemasan	
		3. Keripik Keladi (berbagai rasa)	Mengolah pangan lokal menjadi produk	Tanaman keladi	Tersedia Produk dalam kemasan	
		4. Sistik Ubi ungu	Mengolah pangan lokal menjadi produk	Ubi ungu	Tersedia Produk dalam kemasan	

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
5.		Keripik ubi ungu	Mengolah pangan lokal menjadi produk	Ubi ungu	Tersedia Produk dalam kemasan
6.		Konco Tani (SP 4)	Menyediakan Alat- alat pertanian, pakan ternak, service tengki	Masyarakat di daerah SP sulit untuk mencari alat2 pertanian, pakan ternak, bibit dan lainnya. Harga mahal karena harus ke Kota Manokwari untuk membeli.	Tersedia toko tani, mudah didapat dengan harga yang murah
7.		Mayatin Tani (SP 1)	Menyediakan sarana pertanian, pestisida bibit, alat pertanian	Masyarakat di daerah SP sulit untuk mencari alat2 pertanian, pakan ternak, bibit dan lainnya. Harga mahal karena harus ke Kota Manokwari untuk membeli.	Tersedia toko tani, mudah didapat dengan harga yang murah
11	Industri Mikro Produk Olahan Pangan berbasis kearifan lokal	1. Tepung Sagu organic	Menghasilkan tepung dari pangan lokal sagu	Tanaman Sagu	Produk Tepung dalam kemasan
		2. Molen Papeda	Mengolah molen dari bahan tepung sagu	Tepung Sagu	Produk kue dalam kemasan
		3. Vencake sagoo/ Brownes sagu	Mengolah produk dari bahan tepung sagu	Tepung Sagu	Produk kue dalam kemasan
		4. Various Taste of sagu cake	Mengolah produk dari bahan tepung sagu	Tepung Sagu	Produk kue dalam kemasan

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI			
			TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM SESUDAH		
		5.	Bola sagu Pelangi	Mengolah produk dari bahan tepung sagu	Tepung Sagu	Produk kue dalam kemasan
		6.	Ring Red and Choco Sago	Mengolah produk dari bahan tepung sagu	Tepung Sagu	Produk kue dalam kemasan
		7.	Kue Bangket Papua	Mengolah produk dari bahan pangan	Tepung Sagu	Produk kue dalam kemasan
		8.	Pasta Buah Merah	Membuat pasta dari buah merah	Buah Merah	Produk Pasta
		9.	Lapis Buah Merah	Mengolah produk dari buah merah	Buah Merah	Produk Kue
		10.	Redmies pie Buah Merah	Mengolah produk dari buah merah	Buah Merah	Produk kue
12.	Pendidikan Kimia (Murtihapsari, DKK)	1.	Senyawa baru "Kaimanol"	Senyawa baru sebagai Antimalaria	Belum diketahui	Senyawa baru antiplasmodium yang pengembangan farmasi menjadi obat
		2.	Senyawa aktif asal kaimana sebagai antimalarial	Senyawa baru sebagai Antimalaria	Belum diketahui	Senyawa baru antiplasmodium yang pengembangan farmasi menjadi obat
		3.	Antimalaria dari Sponge laut	Senyawa baru sebagai Antimalaria	Belum diketahui	Senyawa baru antiplasmodium yang pengembangan farmasi menjadi obat

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
13.	LPPM Universitas Papua	1. Jaringan syaraf Tiruan	Memperdiksi waktu pengumpulan bahan pada proses pengeringan pati termodifikasi secara pneumatik	Manual	Cepat, efektif, efisien
		2. Alat pengering pneumatic convering <i>ring</i> dyer (PCRD) dilengkapi fermentor dengan lampu uvc dan <i>dawetaring rotary drum vacuum filter</i>	Alat pengering PCRD dilengkapi fermentor berpengaduk	Manual	Lebih mudah, efektif, efisien

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
14.	BPTP Papua Barat	1. Model Prediksi Iklim dan Produksi Pala Faktak	Mengetahui sedini mungkin seberapa besar variabilitas iklim dan keragaan produksi pala antar musim baratan dan timuran di wilayah Faktak, sehingga dapat diambil kebijakan penanganan yang bersifat <i>early warning system</i>	Pala Faktak mengalami dua masa panen dalam setahun, yaitu panen musim barat dan musim timur. Di mana kedua periode panen selalu mengalami variasi keragaan produksi pala sejalan dengan variabilitas iklim antar musim. Jika terjadi variabilitas iklim musiman yang cukup besar, maka selalu berdampak pada fluktuasi hasil pala yang tinggi. Pada periode El-Nino seringkali terjadi penurunan pala secara drastis, dan petani mengalami kerugian. Tidak tersedia informasi akan variabilitas iklim dan keragaan produksi pala antar musim, sehingga petani dan pemerintah daerah sulit untuk mengantisipasi melalui kebijakan daerah.	Model prediksi variabilitas iklim dan produksi Pala merupakan sebuah model yang dibangun menggunakan persamaan dasar yang dapat memprediksi variabilitas iklim berdasarkan data historis dan kemudian menghitung keragaan produksi Pala pada musim timuran dan baratan berdasarkan persamaan hubungan iklim dan produksi pala yang juga dibangun berdasarkan persamaan empiris hubungan data iklim dan produksi Pala secara historis. Model ini menggunakan program berbasis pada <i>nearbeans</i> sehingga bersifat gratis. Input model ini hanya berupa data curah hujan bulanan, kemudian dilakukan simulasi variabilitas iklim (curah hujan untuk musim timuran dan baratan kedepan, sehingga dapat diketahui sedini mungkin kemungkinan variabilitas iklim dan keragaan produksi Pala pada musim-musim berjalan. Model sudah divalidasi di lapangan dan menunjukkan akurasi yang tinggi (>60%)

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
2.		Model SMS Center Data Pala Fakkak	Untuk mendapatkan data produksi Pala, jumlah pohon Pala, jumlah pohon Pala produktif secara efisien dan efektif dari petani Pala di lapangan	Dinas Perkebunan Fakkak tidak mengkoleksi data Pala dari lapangan dengan alasan biaya operasional tinggi. Sehingga Dinas Perkebunan hanya menghitung data produksi Pala berdasarkan data-data yang dilaporkan oleh pedagang antar pulau ketika mereka mengajukan ijin mutu kepada Dinas Perkebunan. Sementara itu, hampir 90% wilayah pengembangan Pala sudah terdapat jaringan telkomsel.	Model SMS Center (<i>gateway</i>) dibangun dengan fitur sms yang dapat menginformasikan data Pala yang terdiri dari jumlah produksi permusim, jumlah pohon, dan jumlah pohon produktif. Data ini tersusun menurut kelompok tani, kampung, dan distrik. Server Model SMS Center di pasang di Dinas, sehingga dapat mengontrol data Pala pada setiap musim. Format SMS sangat sederhana, petani cukup mengetik, angka produksi, angka jumlah pohon, kode petani, dan kode musim. Sementara data nama petani, kelompok, kampung dan distrik sudah tersimpan sebagai data base. Inovasi ini juga dapat memberikan solusi kepada hitungan provitas Pala Fakkak. Hal ini karena Pala fakkak tumbuh tidak beraturan, seperti tanaman hutan sehingga sulit menghitung provitas berdasarkan luas lahan (Ha). Jauh lebih akurat jika nantinya dihitung berdasarkan data jumlah pohon.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
3.		Modifikasi Sistem Pengeringan biji Pala Fakfak	Membangun model pengeringan Pala yang dapat mengontrol temperature pengeringan secara baik, sehingga memperoleh kualitas biji Pala hasil pengeringan yang baik	Selama ini petani menggunakan rumah pengeringan Pala yang disebut dengan rumah asaran. Tungku perapian berada di tengah rumah asaran, dan biji Pala diletakkan langsung diatas para-para yang dibuat tepat di atas tungku dengan jarak ± 2 meter. Dengan sistem ini sulit mengontrol temperature, terkadang temperature sangat tinggi sehingga kualitas biji Pala rusak/rendah, bahkan ada yang tampak gosong.	Modifikasi sistem pengeringan (pengasapan Pala Fakfak) dilakukan dengan cara memodifikasi tungku perapian dan konstruksi para-para / rak pengering. Tungku perapian dipasang menempel di luar rumah pengering menyerupai oven, berbahan drum bekas dan baja. Untuk rumah pengeringan (pengasapan) sederhana atau terdiri dari satu rak pengering biji, cukup dibuatkan lubang pada bangunan ruang pengering sebagai tempat masuknya panas dan asap. Sedangkan untuk rumah pengeringan dengan beberapa rak pengering biji, maka diperlukan pipa tahan panas yang dirangkalkan tepat dibawah rak pengering agar penyebaran panas dan asap dalam ruangan dapat merata.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
				<p>Selain itu, Dinas Perkebunan Fakfak membangun rumah pengeringan dengan model, yaitu: (1) seperti model petani, tetapi menggunakan bahan konstruksi yang permanen, yaitu batu bata, semen, dan seng, dan (2) membentuk model pengeringan dengan memodifikasi sistem petani, yaitu: membuat kotak tertutup dari beton, dengan bagian depan dibuat celah tungku perapian dan atasnya dipasang dudukan para-para yang terbuat dari susunan kawat. Para-para pengeringan ini dapat digeser keluar dan kedalam kotak pengeringan guna memasukan biji pala dan mengambil hasil pengeringan. Kedua sistem inipun masih sulit mengontrol pengeringan. Pada sistem yang kedua petani menganggap tidak praktis, karena para-para yang dibuat ditambah dengan beban biji pala, berat untuk dorong masuk dan keluar. Selain itu, jarak yang dekat antara tungku dan para-para menyebabkan biji pala mudah gosong.</p>	<p>Panas dan asap untuk rumah pengeringan/pengasapan dengan beberapa rak pengering, dibantu menggunakan mesin bertenaga listrik yang menggerakkan <i>blower</i> sehingga mendorong panas dan asap menuju rumah pengeringan. Di depan pintu rumah pengering dipasang termometer dengan sensor kawat terpasang dalam ruangan, sehingga kondisi suhu di dalam dan di luar ruangan dapat terbaca. Termometer akan berfungsi sebagai pengontrol temperatur, jika sudah mencapai suhu 40 ° C maka jumlah kayu bakar dapat dikurangi atau membuka pintu tungku perapian. Para-para/rak pengeringan dalam ruangan terbuat dari papan kayu besi, sehingga mampu menampung biji pala basah dalam jumlah yang besar dan kemudian dilubangi setiap 10 cm agar panas dan asap dapat menyentuh biji pala secara merata. Pengasapan secara kontinu (tidak terputus) akan memperpendek waktu proses pengeringan, dan kualitas hasil pengeringan model ini akan jauh lebih baik</p>

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
4.	Model Pengeringan Fuli Pala Fakfak	Membangun model pengeringan fuli Pala dengan mempertahankan kualitas fuli.	Penjemuran fuli di atas terpal yang dihamparkan di halaman sehingga memudahkan tercampur dengan benda-benda asing, termasuk gangguan dari hewan piaraan.	Atap dan dinding ruang penjemuran fuli menggunakan bahan polikarbonat dengan tujuan fuli masih mendapatkan sinar matahari dalam proses pengeringannya dan terlindungi dari hujan, angin. Sebagai alternatif lain, bisa menggunakan seng transparan.	Rak pengeringan fuli Pala menggunakan seng plat dengan ketebalan 0,50 mm menggunakan rangka yang cukup kuat sehingga dapat menampung jumlah fuli basah dalam jumlah besar.
5.	Cara Pelepasan Fuli dari Biji Pala	Melepas fuli dari biji Pala tanpa merusak fuli	Selama ini, pemisahan fuli menggunakan pisau sehingga terjadi robekan sehingga terkadang banyak fuli yang cacat dan kualitasnya menurun.	Cara pelepasan fuli dari biji sangat sederhana yaitu cukup merendam biji Pala yang masih terbungkus fuli dalam baskom yang berisi air dan didiamkan sekitar ±5-15 menit (semakin matang fisiologis Pala, semakin cepat waktu perendaman) kemudian fuli dilepas dari biji dengan cara menguliti langsung pakai jari dan langsung terkelupas dari biji secara utuh, tidak cacat/robek.	

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN MANOKWARI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
6.		Teknologi perbanyak benih Pala	Metode perbanyak secara generatif	<p>Petani pada umumnya mendapatkan benih dari : 1. Bantuan pemerintah daerah. Asal benih biasanya berasal dari pengadaan dinas dengan cara perbanyak vegetatif (sambung pucuk dan sambung samping) maupun perbanyak generatif (mengumpulkan benih dari petani). 2. Kebun pribadi.</p> <p>Petani biasanya mendapatkan benih secara alami yang tumbuh dis ekitar kebun.</p>	<p>Memperkenalkan dan mendampingi petani menjadi penangkar benih pala dimulai dari cara pemilihan biji yang hanya berasal dari daerah blok penghasil tinggi dengan usia kematangan yang sama.</p> <p>Memberikan perlakuan mekanis untuk memperpendek masa dormansi dengan cara digurinda pada bagian kePala biji Pala sebanyak 3 kali sayatan halus.</p> <p>Memodifikasi media tanam berupa tanah dan pasir laut (yang telah hilang unsur garamnya) dengan perbandingan 1 : 1.</p>

LAMPIRAN 2

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN SORONG (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
			TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM SESUDAH
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pos Dugem Liku (Pos Pengaduan Penyelesaian dan Pelayanan dugaan sengketa pencemaran lingkungan hidup)	Mengatur masyarakat untuk fungsi kontrol lingkungan, kebijakan strategis lebih cepat, tetap untuk menjaga lingkungan, menerima informasi dari masyarakat secara akurat dan mengatur menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan dengan cepat.	Masalah terkait pencemaran lingkungan pada beberapa lokasi tidak ditangani dengan baik dan lambat karena belum ada informasi ke masyarakat. Masyarakat sendiri tidak melaporkan ke dinas terkait secara cepat. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan.
2	Dinas Peternakan	1. Suka Sehat (Susu Kambing Sehat)	Memanfaatkan produksi susu kambing yang meningkat untuk menjadi suatu produk yang baru. Menciptakan Produk lokal dengan memanfaatkan komoditi dan memperdayakan SDM lokal.	Tersedia Susu Kambing Instan yang diproduksi oleh UD. Industri Suka Sehat (Distrik Aimas Kab. Sorong) menjadi satu produk yang diberi nama SUKA SEHAT (Susu Kambing Sehat) dengan berbagai varian rasa yaitu Rasa Cokelat, Rasa Jahe, Rasa Strawberry) yang memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Suka Sehat telah dipasarkan pada Kota dan Kabupaten Sorong bahkan juga Pada Daerah Jawa , bahkan telah mendapatkan penghargaan tingkat Nasional.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN SORONG (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
		2. Dodol Suka (Susu Kambing Sehat)	Memanfaatkan bahan mentah susu kambing untuk memproduksi satu produk bahan makanan	Jumlah ternak kambing yang banyak menghasilkan susu kambing yang melimpah namun tidak diolah secara teknologi sehingga tidak digunakan atau dimanfaatkan dengan baik.	Terdapat dodol SUKA (Susu Kambing Sehat) Instant yang diproduksi oleh UD. Industri Suka Sehat (Distrik Aimas Kab. Sorong) menjadi satu produk yang dapat dikonsumsi, dipasarkan pada beberapa Kios, Toko di Wilayah Sorong.
3	Dinas PMP2TSP	Laki Sejati (Pelayanan Kilat Sehari Jadi Pasti)	Memberikan izin TDP (Tanda Perusahaan), SITU (Surat izin tempat usaha), SIUP (Surat izin usaha perdagangan)	Masyarakat mengurus izin melewati beberapa prosedur dan pelayanan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga surat izin akan bisa selesai dalam waktu 2-3 hari. Pelayanan ini tidak dikenakan biaya.	Masyarakat mengurus ijin dari jam 8-11 maka surat izin tersebut akan selesai dan diambil pada hari yang sama. Lewat dari jam 12 maka surat izin tersebut dapat diambil pada hari berikutnya.
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pace Komen (Paket cepat pelayanan kependudukan)	Melakukan pelayanan Pernikahan Masal dan menyediakan dokumen kependudukan	Masyarakat yang sudah hidup bersama dan belum melakukan pernikahan melalui Gereja ataupun pernikahan pencatatan sipil tidak menyadari akan pentingnya pernikahan. Masyarakat tidak memiliki dokumen kependudukan secara lengkap, terutama masyarakat pada distrik- distrik tertentu. Jika ingin memiliki dokumen tertentu harus memiliki beberapa persyaratan dan mengikuti prosedur pengurusan.	Dinas Dukcapil bekerjasama dengan kepala Distrik, Pihak Gereja (Tokoh Agama), Tokoh Adat untuk melakukan pendataan penduduk dan pihak dinas mendatangi distrik dengan system jemput bola. Untuk melakukan pernikahan Masal setelah itu masyarakat menerima dokumen di tempat tanpa menunggu berhari-hari. Inovasi ini telah berjalan sejak tahun 2017.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN SORONG (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI		
			TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM	SEKUNDAR
5	Universitas Muhammadiyah	1. Jelajah Sorong	Memberikan informasi spesifik (kota, tempat wisata, hotel/ penginapan, transportasi, dan lain2) tentang seputaran wilayah Sorong Raya dan Raja Ampat.	Belum ada aplikasi yang memberi informasi secara spesifik terkait wilayah Sorong dan Raja Ampat. Pada umumnya banyak pengunjung yang mencari informasi pada beberapa aplikasi yang sudah digunakan misalnya Traveloka, namun Traveloka sendiri tidak memuat yang lebih detail.	Siapapun dapat memperoleh informasi dengan Mengunduh aplikasi Jelajah Sorong pada <i>Playstore</i> . Semua Informasi dapat diperoleh melalui aplikasi Jelajah Sorong.
		2. Smart Printer	Memudahkan pengguna print dari jarak jauh	Kendala untuk print ketika berada pada jarak yang jauh.	Dapat print ketika berada di tempat berbeda, asalkan sudah terhubung dengan smart printer.
6	Lembaga Masyarakat Adat Malamoi AIMAS	Peta Marga	Memberikan informasi secara akurat, tepat dan cepat mengenai kepemilikan hak ulayat tanah adat berdasarkan nama marga masyarakat adat.	Pemerintah atau Masyarakat yang ingin membeli tanah arus mendatangi kepala kampung, mencari informasi tentang tanah adat, mendatangi setiap marga. Ada kepemilikan tanah adat yang masih menjadi persoalan karena tidak ada pengawasan atau dokumentasi.	Terdapat sebuah peta informasi yang memuat wilayah tanah adat berdasarkan marga. Kita langsung mendatangi marga yang bersangkutan. Sudah bisa tahu kepemilikan tanah berdasarkan nama marga masyarakat adat Malamoi.
7	UNIMUDA Sorong	1. Metode Pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review).	Memiliki cara/ metode baru yang tepat untuk kegiatan belajar di sekolah.	Siswa kurang minat belajar biologi	Minat siswa untuk belajar mata pelajaran Biologi mengalami peningkatan.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN SORONG (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI		
			TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM	SEKUNDIAH
2.		Media Pembelajaran Audio Visual	Memiliki cara/ metode baru yang tepat untuk menyampaikan materi.	Siswa kurang minat belajar mata pelajaran Biologi	Hasil belajar meningkat dan mendapat nilai yang tinggi
3.		Larutan Tanaman Sirih (Piper aduncum L.) Pemicuh Pertumbuhan Jamur Merang	Memberikan cara/ teknik baru untuk pengembangan Jamur Merang	Belum dilakukan uji aktivitas larutan	Larutan tanaman Sirih memicuh pertumbuhan Jamur Merang.
4.		Larutan Tanaman Sirih (<i>Piper aduncum</i> L.) penghambat pertumbuhan <i>Candida albicans</i>	Menghambat pertumbuhan <i>Candida albicans</i>	Belum dilakukan uji aktivitas larutan	Larutan tanaman Sirih digunakan sebagai obat untuk penyakit organ genital.
5.		Optimasi Pengolahan gula dari buah tumbuhan Sirih Hutan (<i>Piper caducibracteum</i> C.DC)	Memberikan optimasi pengolahan gula dari buah tumbuhan sirih hutan.	Belum dilakukan optimasi pengolahan gula	Dapatkan optimasi pengolahan gula merah dari tanaman sirih hutan.

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN SORONG (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI		DESKRIPSI INOVASI	
			SEBELUM	SESUDAH		
6.		Metode Eksperimen untuk memahami macam-macam gaya yang bekerja pada suatu benda bagi siswa kelas IV di SD Negeri Moko Waisai Kab. Raja Ampat Tahun Ajaran 2018/2019	Memberikan cara/ metode baru yang tepat untuk belajar	Sulit untuk memahami gaya yang bekerja pada suatu benda	Dapat memahami gaya- gaya yang bekerja pada suatu benda	
7.		Membangun Pulau Tangguh Bencana berbasis kearifan lokal di Pulau Arar	Mengatur dan membentuk kehidupan masyarakat yang tangguh terhadap bencana	Belum dilakukan kegiatan terkait sosialisasi terkait bencana alam dan masyarakat tidak terlalu peduli terhadap pentingnya menjaga hutan Mangrove	Masyarakat menanamkan tanaman Mangrove dan lebih waspada ketika ada bencana	
8.		Pemberdayaan aparatur kampung melalui pembinaan aparatur kampung	Melatih aparatur kampung dalam pengguna dana kampung.	Belum dilakukan kegiatan pemberdayaan aparatur kampung	Meningkatnya pemahaman aparat kampung dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dengan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengoptimalisasian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjerang aspirasi masyarakat desa secara terstruktur dan terarah.	

DESKRIPSI INOVASI DI KABUPATEN SORONG (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI		
			TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM	SEKUNDAR
9.	Sepeda Pintar (Sekolah Peduli Kokoda Pintar)	Berbasis Inklusi Sosial	Memberantas buta aksara	Anak- anak usia sekolah sama sekali belum bisa membaca, menulis dan menghitung	Anak-anak bisa mampu membaca, menulis dan menghitung
10.	Rumah Baca Berbasis Inklusi Sosial	Meningkatkan Budaya membaca masyarakat	Meningkatkan Budaya membaca masyarakat	Minat baca dari masyarakat sangat kurang, juga tidak ada rumah baca.	Meningkatnya minat baca masyarakat dan tersedia rumah baca berbasis Inklusi social.
11.	Gerakan "Gudeg Medan" Guru dengan media pembelajaran berbasis ICT di Kab. Sorong	Mengoptimalkan fasilitas ICT (Information Communication Technology) di sekolah untuk kegiatan media pembelajaran yang inovatif	Tidak dioptimalkan fasilitas ICT (Information Communication Technology)	Siswa lebih cepat menangkap materi melalui desain dan produksi media pembelajaran menggunakan videoscreeb dan pengetahuan tentang desain pembelajaran menggunakan teknologi computer dan teknologi multimedia.	Siswa lebih cepat menangkap materi melalui desain dan produksi media pembelajaran menggunakan videoscreeb dan pengetahuan tentang desain pembelajaran menggunakan teknologi computer dan teknologi multimedia.
12.	Laboratorium Virtual	Memberi pengetahuan dan keterampilan mengembangkan aplikasi pengelolaan virtual laboratorium IPA kepada Guru IPA	Menggunakan penuntun praktikum manual	Tersedia penuntun dan animasi praktikum IPA Virtual Lab (dilengkapi <i>adobe flash</i>)	Tersedia penuntun dan animasi praktikum IPA Virtual Lab (dilengkapi <i>adobe flash</i>)

LAMPIRAN 3

DESKRIPSI INOVASI KOTA SORONG (2019)				
NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	
			DESKRIPSI INOVASI	
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Bappeda	1. <i>One Day Service Advice Planning</i> (ODS-Ade ning)	<p>Pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan untuk pengurusan IMB, surat diandatangani dan diajukan kepada kepala Bappeda untuk mendapat persetujuan. Setelah itu, kepala Bappeda memerintahkan petugas lapangan untuk melakukan pengecekan lapangan. Dan selanjutnya petugas mengecek kesesuaian lokasi peruntukan bangunan dengan Tata Ruang Wilayah. Proses ini dapat memakan waktu lebih dari seminggu.</p>	<p>Berdasarkan surat permohonan dari pemohon, petugas langsung mengecek lokasi menggunakan GPS, sehingga petugas tidak perlu turun lapangan. Setelah itu, petugas mengecek kesesuaian lokasi bangunan dengan Tata Ruang Wilayah. Jika hasil verifikasi sesuai, maka langsung diterbitkan surat persetujuan IMB. Proses ini hanya memakan waktu kurang dari satu hari.</p>
		2. LANTERA (laporan tertib Rapih)	<p>OPD diminta untuk menyampaikan laporan dalam bentuk tercetak. Proses ini memakan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi</p>	<p>Inovasi Lantera merupakan sistem informasi pembangunan daerah berbasis elektronik (online). Dimana setiap OPD dapat mengupload laporan-laporannya, sehingga mudah diakses dan dapat mengurangi waktu proses, serta biaya yang dikeluarkan oleh OPD</p>
		3. Shootherapy Sanksi Bagi ASN yang tidak hadir	<p>Pemberian <i>phumishment</i> sebagai salah satu bentuk mendorong kekatifan ASN</p>	<p>Inovasi ini dilakukan dengan cara memotong /memangkas ULP dan TKD pegawai yang tidak hadir kerja, dengan menggunakan absen kehadiran ASN sebagai indikator</p>

DESKRIPSI INOVASI KOTA SORONG (2019)			
NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI
			DESKRIPSI INOVASI
		SEBELUM	SESUDAH
2.	Perikanan	1. IKAN KAKAP (Informasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan)	<p>Pendataan dan pengawasan hasil tangkapan ikan oleh kapal-kapal perikanan</p> <p>Hasil tangkapan dari kapal didaratkan langsung dibawa ke pasar dan pengecer sehingga sulit mendata hasil tangkapan ikan</p> <p>Inovasi pencatatan data hasil tangkapan dengan format <i>logbook</i> di setiap kapal perikanan, sehingga data: produksi ikan, jenis ikan, dan daerah tangkapan dapat dicatat dengan jelas. Termasuk data kedatangan dan keberangkatan kapal.</p>
		2. TIPIS (Telepon Informasi Proses Ijin Selesai)	<p>Pelaku usaha mengajukan permohonan ke Dinas Perikanan. Surat diagendakan dan diajukan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui oleh kepala Dinas, baru diterbitkan surat rekomendasi yang dapat diambil oleh pelaku usaha. Proses ini bisa memakan waktu 2-3 hari.</p> <p>Dengan inovasi Tipis, pelaku usaha hanya cukup berkomunikasi via telepon atau sms. Surat rekomendasi segera disiapkan oleh Dinas, sehingga pelaku usaha sekali menghadap langsung mendapatkan SKA dalam waktu kurang dari satu jam</p>
		3. PEDATI (Petugas datang kapal ikan)	<p>Pemeriksaan kapal dilaksanakan dengan cara pemilik kapal mendatangi kantor dinas perikanan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kapal. Selanjutnya dilakukan verifikasi permohonan (berkas) oleh petugas Dinas Perikanan. Setelah itu, petugas ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik kapal. Proses ini memakan waktu hingga bisa mencapai 7 hari (1 minggu).</p> <p>Berdasarkan data yang terecord, dinas provinsi mengeluarkan SPT dan petugas langsung mendatangi kapal untuk mengambil berkas data dan langsung melakukan pengecekan fisik kapal. Proses ini hanya memakan waktu 1-3 hari.</p>

DESKRIPSI INOVASI KOTA SORONG (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI		DESKRIPSI INOVASI	
			SEBELUM	SESUDAH		
3		4. JEBOL KARTU KUSUKA (Jemput Bola Kartu Kusuka)	Pengurusan dan pelayanan nelayan melalui penggunaan Kartu Nelayan	Menggunakan kartu pelayanan dimana nelayan mendatangi petugas operator, kemudian diproses dan dicetak kartu nelayan	Kartu nelayan langsung diverifikasi oleh petugas enumerator dan verifikasi, kemudian mendatangi nelayan dan melakukan penginputan secara online kemudian dicetak kartu Kusuka melalui bank yang ditunjuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Kartu ini berfungsi sebagai kartu ATM nelayan. Inovasi dapat mengurangi waktu proses dan biaya yang dikeluarkan oleh nelayan.	
4	Dinas Pendidikan	GESIH LITERASI (Gerakan Sekolah Litters)	Tujuan untuk meningkatkan budaya membaca buku pada siswa	Setiap siswa di sekolah lebih focus menggunakan HP untuk bermain game dan menonton dari pada membaca buku. Dan ada beberapa siswa yang belum bisa membaca	Dengan adanya inovasi ini maka siswa diwajibkan untuk sebelum memulai pelajaran harus membaca buku.	
		2.CC Melek IT	Tujuan untuk meningkatkan ASN mengerjakan tugas-tugas /kinerja menggunakan laptop/komputer dan ini dilakukan secara internal kantor dengan kursus.	Para ASN belum memahami penggunaan Laptop atau komputer secara baik maka diadakan kegiatan kursus untuk ASN pada tahun 2018.	Selah melakukan kegiatan kursus di tahun 2018 tetapi proses kinerja ASN belum berjalan secara baik maka direncanakan pengadaan laptop/komputer untuk setiap ASN pada tahun 2020.	

DESKRIPSI INOVASI KOTA SORONG (2019)				
NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	
			DESKRIPSI INOVASI	
		SEBELUM	SESUDAH	
5	Inspektorat	1. Klinik On Akuntabilitas	<p>Tujuan untuk setiap OPD dapat berkonsultasi dengan Inspektorat terkait kegiatan-kegiatan setiap OPD yang sudah berjalan dan yang akan berjalan atau sudah selesai bisa konsultasi terkait laporan kegiatan.</p> <p>Ketika para pegawai mengikuti kegiatan kantor diluar maupun di dalam daerah ilmu yang didapat menjadi asumsi pribadi.</p>	<p>Dengan adanya inovasi ini maka setiap OPD sudah melakukan konsultasi kepada inspektorat terkait kegiatan-kegiatan telah berjalan dengan baik sejak tahun 2018 – sekarang.</p> <p>Dengan adanya inovasi ini maka setiap pegawai diwajibkan berbagi ilmu dengan cara sharing ilmu di forum ketika selesai mengikuti kegiatan.</p>
6	Dinas Pertanian	1. E-Surat	<p>Tujuan untuk mempermudah surat-surat pada kantor Dinas Pertanian.</p>	Proses perencanaan
		2. Pengolahan limbah ternak	<p>Tujuan untuk mengelola limbah ternak yang jarang digunakan menjadi pupuk agar dapat digunakan oleh masyarakat</p>	Proses perencanaan

DESKRIPSI INOVASI KOTA SORONG (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI		
			TUJUAN/KEGUNAAAN INOVASI	SEBELUM	SESUDAH
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1. Peningkatan kualitas hidup perempuan Papua di bidang pemberdayaan ekonomi	Tujuan pelatihan Perempuan Papua dalam pengelolaan bahan pokok sagu menjadi suatu produk.	Menurut informan sebelum adanya kegiatan pelatihan ini maka ada produk yang dihasilkan dari bahan pokok sagu yaitu keripik dan es krim. Tetapi produk yang dihasilkan belum diproduksi secara banyak untuk diperjualbelikan.	Setelah adanya kegiatan atau pelatihan ini maka ada produk yang dihasilkan dari bahan pokok sagu yaitu keripik dan es krim. Tetapi produk yang dihasilkan belum diproduksi secara banyak untuk diperjualbelikan.
8.	Dinas PTSP	1. SIO-PAPEDA (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Daerah	Tujuan untuk berinteraksi dengan masyarakat terkait ijin-ijin dengan cara online.	Proses perencanaan	Proses perencanaan

LAMPIRAN 4

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN SORONG SELATAN (2019)					
NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Pola Sore Hari	Memberikan Informasi kepada Masyarakat terkait KB dan pendudukan. Sebagai teknik, cara/ metode yang tepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berda pada distrik2 di Kabupaten Sorong Selatan	Sosialisasi yang dilakukan pada pagi atau siang hari masyarakat semua sibuk beraktivitas sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut.	Masyrakat dengan jumlah yang banyak mengikuti kegiatan sosialisasi dan mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Dinas.
2	Inspektorat	Klinik konsultasi pengawasan dan pengaduan pemerintahan Kab. Sorsel	Membantu pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, membantu perangkat daerah dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam melaksanakan tugas pengawasan, membantu percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK-RI maupun aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Memberikan pendampingan untuk membantu pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan aset daerah, membina SDM dan mempercepat penyelesaian permasalahan pada OPD	OPD, Aparat kampung, masyarakat, kontraktor harus melewati beberapa prosedur yang panjang dan memakan waktu yang panjang untuk konsultasi, menangani atau menyelesaikan suatu permasalahan pada satu instansi.	Pelapor membuat surat resmi dan melaporkan kasus, inspektorat akan mendata dan survei untuk langsung turun ke instansi sesuai dengan laporan yang masuk.
3.	BAPPEDA	Sorsel Satu Data	Memberikan Informasi/ menyediakan semua data dari OPD	Informasi terkait data-data dari OPD tersimpan pada OPD masing-masing.	Semua data dari OPD data diakses pada aplikasi Sorsel satu data

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN SORONG SELATAN (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
4.	Dinas Ketahanan Pangan	1. Mie Sagu(Rasa Cabe, Rasa Sawi, Rasa wortel)	Mengolah dan menyediakan bahan makanan berupa produk baru dari pangan lokal yang sudah ada	Bahan mentah Sagu	Produk Mie Sagu dengan berbagai rasa (cabe, sawi, dan wortel)
		2. Tepung Sagu	Mengolah dan menyediakan bahan makanan berupa produk baru dari pangan lokal yang sudah ada	Bahan mentah Sagu	Produk Tepung sagu
		3. Cendol	Mengolah dan menyediakan bahan makanan berupa produk baru dari pangan lokal yang sudah ada	Bahan mentah Sagu	Produk Cendol
		4. Makroni	Mengolah dan menyediakan bahan makanan berupa produk baru dari pangan lokal yang sudah ada	Bahan mentah Sagu	Produk Makroni
5.	Dinas Pendidikan	1. Gerakan Sorsel Cerdas	Meningkatkan mutu pendidikan kepada masyarakat	Hanya ada kegiatan pembelajaran secara Formal di sekolah	Kegiatan pendidikan melalui beberapa komunitas yang nantinya akan diadakan ke beberapa distrik sehingga semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang sama
6.	Yayasan Insan Cita	1. Taman Baca Pasar Ampera	Meningkatkan minat baca dan mutu pendidikan kepada masyarakat	Hanya ada perpustakaan di sekolah- sekolah sehingga yang membaca hanya siswa- siswa	Siapa saja yang minat untuk membaca dapat ke taman paca Pasar Ampera

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN SORONG SELATAN (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
		2. Kelas Alternatif	Melatih siswa-siswi untuk CALISTUNG (Membaca, Menulis, Menghitung)	Siswa- siswa yang mempunyai kemampuan atau daya tangkap kurang, lambat untuk menyesuaikan atau mengikuti kegiatan belajar dengan siswa yang lain pada umumnya.	Kelas Khusus ini membantu anak- anak yang belum bisa CALISTUNG menjadi bisa.
7.	Dinas Kesehatan	1. Bela Kampung (Bebaskan Malaria dari kampung)	Memberantas dan mencegah penyakit malaria	Penyakit malaria menjadi salah satu kasus penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat bahkan bisa menyebabkan kematian.	Masyarakat mengetahui cara memberantas dan mencegah penyakit malaria. Sehingga Tingkat Kasus Penyakit malaria pada beberapa distrik di Kab. Sorstel boleh menurun dan program ini masih terus dilakukan oleh dinas. Program ini merupakan salah satu program Nasional untuk memberantas penyakit malaria, namun Dinas Kesehatan Kab. Sorstel mengemas ini menjadi suatu inovasi di daerah sesuai dengan kondisi masyarakat

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN SORONG SELATAN (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
		2. Sosialisasi HIV-AIDS melalui pendekatan budaya	Memberi informasi kesehatan dan membawa sampel darah	Masyarakat tidak mau datang untuk memeriksa sampel darah karena takut atau merasa malu untuk periksa HIV AIDS	Masyarakat tertarik untuk datang menghadiri acara hiburan yang dilakukan di sekitar kompleks perkantoran dan sambil mengikuti acara, masyarakat dirahakan untuk diambil sampel darah oleh petugas kesehatan, sehingga mereka tidak menolak. Informasi atau data terkait penderita HIV/AIDS dapat diketahui.
		3. Rumah Tunggu Kelahiran	Menyediakan tempat transit dengan fasilitas bagi ibu melahirkan yang datang dari distrik-distrik yang jauh	Ibu- ibu hamil dari distrik-distrik yang sangat jauh sulit untuk mendapat keinginan sementara sambil menunggu kelahiran di Rumah sakit	Ibu- ibu hamil mendaftar langsung ke rumah tunggu, tinggal menginap sambil menunggu waktu lahiran dan dibawa ke rumah sakit. Sehingga jarak dekat dan kesehatan ibu serta anak terjaga.
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Buku Data OAP (Orang Asli Papua) Pada Kabupaten Sorong Selatan	Menyediakan Informasi OAP (Suku Tehit, Imeko dan Maybrat)	Tidak terdapat data OAP Pada Kab. Sorong Selatan	Tersedia Informasi dalam bentuk buku terkait masyarakat asli Suku Imeko, Tehit dan Maybrat

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN SORONG SELATAN (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
		2. See Ahee (Bahagia di Sungai)	Memfasilitasi pelaksanaan pernikahan masal di tepi sungai dan setelah itu masyarakat menerima 7 Dokumen di tempat (Kartu Keluarga terbaru untuk pasangan dan orang tua dari pasangan, KTP Suami istri, akta Nikah)	Mayarakat mengurus pernikahan mengeluarkan biaya yang mahal, mengurus fasilitas, mengurus kepemilikan dokumen di Dinas Dukcapil.	Pasangan suami istri mendaftar dan pihak dinas memfasilitasi semua dan mengadakan pernikahan di Tepi Sungai (Sesuai dengan nama Inovasi dalam bahasa Teminabuan "See Ahee" yang artinya melaksanakan pernikahan dengan penuh kebahagiaan di tepi sungai. Setelah acara selesai, pasangan langsung menerima dokumen 7 Dokumen.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN SORONG SELATAN (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
3.	Samsong (Satu anak menanam satu Pohon di Sorong Selatan)	Menanaman Pohon, sesuai jumlah kelahiran bayi, dan menyediakan dokumen kependudukan	Belum pernah dilakukan. Pada saat kelahiran anak hanya didata oleh RSUD. Orang tua mendatangi Dinas, antri untuk mengurus dokumen kependudukan. Masyarakat menerima dokumen 1-7 hari bahkan bisa sampai seminggu.	Petugas Kesehatan RSUD Scholo Keyen memberitahukan kelahiran bayi kepada penyuluh kehutanan Penyuluh kehutanan menuju Rumah sakit dan melakukan penyuluhan tentang SAMSON sekaligus mengambil data-data kelahiran, melaporkan ke petugas Dukkapol untuk dibuatkan akta kelahiran, KTP anak dan Kartu Keluarga baru. Penyuluh mengambil bibit tanaman dan ditanam dan orang tua bayi menanam pohon sesuai jumlah bayi yang lahir .	
	Kerja sama Dinas Kehutanan Provinsi (CDK VII SORSEL, KPHP SORSEL& KPHL SORSEL) dengan Pemerintah Daerah SORSEL (RSUD SCHOLO KEYEN, DISDUKCAPIL, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PERTANIAN, BAPPEDA DAN DISTRIK TEMINABUAN).				Petugas Dukkapol memberikan Dokumen akta kelahiran anak, KTP anak, dan kartu keluarga baru kepada orang tua.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN SORONG SELATAN (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
4.	Kakekudosa (Kami ke kampung cetak di tempat, dokumen selesai)	Mempercepat dan menyediakan kepemilikan dokumen	Masyarakat di distrik terjauh harus ke kota untuk mengurus dokumen kependudukan, menggunakan transportasi, membutuhkan biaya yang mahal serta menunggu 1-5 hari bahkan bisa seminggu jika ada kendala	Petugas Dinas ke kampung mendata dan cetak dokumen dan pada hari yang sama masyarakat menerima dokumen kependudukan yang sudah jadi.	

LAMPIRAN 5

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN TELUK WONDAMA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
1.	Bidang Organisasi Sekda	1. SILAKIP	Mengintegrasikan seluruh laporan akuntabilitas dari seluruh OPD dan Memberikan Peringkat Kepada OPD dalam penyusunan Lakip	Belum ada mekanisme untuk melakukan pelaporan akuntabilitas dari seluruh OPD	Adanya laporan yang akuntable dari OPD sehingga pemberian peringkat dalam penyusunan lakip terlaksana dengan baik
		2. ANJAS ABK	Sebagai fungsi informan atau pengambilan kebijakan kepada Bupati dalam penyusunan kelembagaan	Mempermudah pengambilan keputusan belum berbasis data	Pengambilan keputusan lebih akurat karena berbasis data
2.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	1. Hidup Mati	Mencatat angka kelahiran bayi dalam bentuk offline aplikasi (Data Base)	Ketika bayi yang baru lahir, belum bisa memiliki akta lahir secara langsung dan nama yang sudah terdaftar dalam kartu keluarga	Dengan adanya inovasi tersebut, bayi yang baru lahir dipermudah dalam proses pembuatan akta lahir dan nama yang sudah ada dalam kartu keluarga, sehingga mempermudah orang tua sah dalam memperoleh dokumen
		2. Semedi (sehari Mesti jadi)	difungsikan menjadi data base DUKCAPIL Kabupaten Teluk Wondama.	Dibutuhkan lebih dari satu hari dalam proses pengurusan dokumen	Dengan adanya inovasi baru yang dijalankan Dukcapil, diwajibkan pengurusan dokumen harus terlaksana dalam satu hari jika persyaratan lengkap

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN TELUK WONDAMA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
3.	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kampung	1. Siskeudes	Sebagai sarana dan fasilitas berkonsultasi laporan keuangan pertanggung jawaban (Aparat Kampung)	Sebelumnya, dana desa yang diberikan oleh Negara tidak dipertanggung jawabkan laporan keuangan dari aparat desa.	Dengan adanya inovasi Siskeudes Pemerintah membina dan melakukan pelatihan kepada aparat dalam Pengelolaan Dana desa yang baik dalam Pembuatan Keuangan laporan Pertanggung jawaban laporan Keuangan desa.
		2. Warkop LP2K	Untuk mempertanggung jawaban Laporan Pemerintahan Desa	Belum adanya pelatihan dan pendamping dalam pembuatan laporan pemerintahan desa	Dengan adanya wadah yang disiapkan dari pemerintah, aparatur kampung dipermudah dalam berkonsultasi terkait laporan yang akan dikerjakan
		3. Bedah Kampung	Melatih masyarakat sebagai kader dalam pembangunan sarana dan prasarana di kampung	Pembangunan sarana prasarana desa kurang memperhatikan pekerja dari masyarakat lokal, sehingga tidak diberdayakan dengan baik.	Dengan adanya Peningkatan kapasitas masyarakat sebagai kader pembangunan. Masyarakat dapat diberdayakan sebagai pelaksana bukan lagi sebagai penonton
4.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1. Jemput Bola	Membantu Pengusaha Kecil dan Menengah dalam Pengurusan Izin (SITU, SIUP, dan TDP)	Sebelumnya masyarakat mengalami kendala dalam pengurusan izin dikarenakan, lokasi yang begitu jauh dengan Perkantoran (pulau yang terpencil) sehingga akses untuk pengurusan izin terkendala.	Dengan adanya inovasi Jemput Bola tersebut Pemerintah langsung menadangi pengusaha kecil dan menegah dalam proses pembuatan izin. Sehingga masyarakat dipermudah dalam pengurusan izin jika persyaratan sudah lengkap.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN TELUK WONDAMA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
5.	Dinas Pertanian dan Pangan	Budidaya Tanaman Nilam	minyak Atsiri yang bisa membantu sebagai parfum sebagai bahan baku industri sabun mandi dan minyak anti nyamuk	budidaya nilam hanya merupakan kearifan lokal dengan kegunaan terbatas.	Produk dipersiapkan sebagai produk dalam skala industri dengan berbagai produk turunan seperti sabun, minyak anti nyamuk dan lain-lain.
6.	Kesehatan	Malaria-Plus	menggunakan kode warna untuk dosis obat malaria sesuai dengan berat badan pasien dengan bantuan timbangan yang telah dimodif dengan warna	Belum adanya paket obat malaria yang diberikan sesuai dengan dosis dari berat badan	Dengan modifikasi timbangan yang telah diberi warna, sehingga dosis paket malaria yang diberikan oleh petugas kesehatan dan juru malaria kampung pun sesuai dengan berat badan dari pasien,
7.	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	1. Pentas Adu Badan	Penataan Arsip secara terpadu dengan menata secara manual dan digital	Arsipan dari berbagai OPD belum tersimpan secara teratur, baik secara manual dan secara digital	Dengan adanya penataan arsip secara teratur dengan cara manual dan digital, mempermudah keuangan dalam menyusun setiap arsip dari pemeriksaan dari 5 tahun sebelumnya dapat ditemukan arsip mana yang dibutuhkan dengan cepat.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN TELUK WONDAMA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
8.	Puskesmas Wasior	Pelangi Cinta	Memberikan Pita sebagai simbol	<p>sebelumnya perkembangan berat badan dan umur bayi tidak diketahui dengan jelas, apakah bayi itu kekurangan gizi atau tidak. Sehingga tidak ada pengontrolan dari orang tua bayi atau pegawai puskesmas</p>	<p>Dengan adanya simbol dari pita yang diberikan oleh petugas puskesmas kepada bayi mereka dapat mengontrol perkembangan bayi mana yang gizinya baik dan yang paling kekurangan gizi, sehingga kedua orang tua juga dapat mengetahui perkembangan bayi mereka dengan memberikan pita sesuai berat badan dan umur bayi</p>
9.	UPTD SAMSAT	Dor to Dor (Rumah ke rumah)	Untuk membayar pajak kendaraan bermotor dari rumah ke rumah	<p>sebelumnya masyarakat sangat sibuk dengan aktifitas kerja, sehingga dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sering lambat dan tidak ada laporan status kendaraan yang jelas ke Samsat.</p>	<p>setelah dilakukan penagihan tunggakan kendaraan bermotor di rumah penduduk dan mendata kendaraan yang alamat tidak jelas, rusak, hilang, atau lapor jual masyarakat merasa terbantu dan senang dalam dipermudah pengurusan pajak.</p>

LAMPIRAN 6

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
1.	BAPPEDA	1. Arsip Digital	Efisiensi dan aksesibilitas dokumen dan konservasi dokumen.	Dokumen-dokumen tersimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan ditaruh lemari atau karton. Keadaan ini apabila terjadi waktu yang lama, dokumen akan menumpuk, membutuhkan tempat banyak dan kadang dokumen tercecer atau hilang.	Dokumen dalam bentuk digital mempermudah sistem pengarsipan surat masuk dan keluar, mempermudah pencarian surat menurut permintaan baik nomor maupun jenis, meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan dan terpenting semua dokumen akan terkonservasi.
		2. Map Base Information	Kemudahan informasi spasial	Belum ada data base spasial	Semua rencana dan program mengacu pada data spasial yang telah disusun bersama. Namun data spasial tersedia sepenuhnya.
		3. <i>E-Planning</i>	Mempercepat dan transparansi Program	Rencana dan Program dibuat secara manual, sehingga prosesnya lambat dan cenderung tertutup	Semua proses penyusunan rencana dan program dibuat secara elektronik. Cara ini selain mempercepat proses penyusunan juga lebih transparan dalam pembuatannya, semua pihak dapat mengakses.
		4. <i>E-Budgeting</i>	Mempercepat dan transparansi penganggaran	Penyusunan rencana anggaran dibuat secara manual, sehingga prosesnya lambat dan cenderung tertutup	Semua proses penyusunan rencana anggaran dibuat secara elektronik. Cara ini selain mempercepat proses penyusunan juga lebih transparan dalam pembuatannya, semua pihak dapat mengakses.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI		DESKRIPSI INOVASI	
			SEBELUM	SESUDAH		
		5. Pendampingan Musrenbang Kampung	Program kampung tidak tumpang tindih dengan Program Pemda atau Pemerintah Pusat	Sering terjadi tumpang tindih program antara Kampung dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.	Pendampingan (walaupun bukan tupoksinya) memberikan masukan kepada masyarakat tentang program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.	
		6. Kajian Belanja OPD	Ketepatan penganggaran Belanja OPD	Belum ada kajian	Berdasarkan kajian ini belanja OPD akan lebih efisien dan efektif.	
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. PERKASA (Pencanaan Kampung Sadar Kependudukan) 2. PELAMPUNG DAPER (Pelayanan Kampung Di Daerah Perbatasan)	Membantu ketertiban data kependudukan kampung Membantu legalitas kependudukan di kampung	Banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya masalah kependudukan Masyarakat kampung yang keberadaannya jauh dari pusat pemerintahan banyak yang belum memiliki dokumen kependudukan	Masyarakat lebih paham akan pentingnya dokumen kependudukan dan turunannya. Seluruh masyarakat Kaimana telah terdaftar dan memiliki dokumen kependudukan.	
		3. JEBOL-PPKPL Jemput Bola Pelayanan Perumahan KIP E Di Lembaga Pemasyarakatan)	Mempercepat proses pembuatan dokumen kependudukan, khususnya KIP Elektronik	Masyarakat yang berada di Lembaga Kemasyarakatan banyak yang enggan mengurus dokumen dan belum memiliki dokumen kependudukan	Seluruh masyarakat Kaimana telah terdaftar dan memiliki dokumen kependudukan.	

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
			TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM SESUDAH
		4. SEMEDI (Sehari Mesti Jadi Dokumen Kependudukan)	Mempercepat proses pembuatan dokumen kependudukan	Proses pembuatan memakan waktu dan tenaga dalam mengurusnya. Masyarakat lebih semangat mengurus dokumen kependudukannya karena proses cepat dan mudah.
		5. PENIKMAT (Pelayanan Nikah Masal Di kampung-Kampung Bagi Penduduk Yang Beragama Kristen)	Membantu legalitas pasangan pengantin beragama Kristen	Cukup banyak masyarakat yang beragama Kristen belum memiliki buku atau mencatatkan nikahnya, mereka hanya menikah secara agama karena keengganan atau ketidaktahuannya atau kekurangan biaya. Keabsahan pernikahannya terjamin secara hukum.
		6. Penanda-tanganan dokumen kependudukan TTE (Tanda Tangan Elektronik)	Mempercepat proses pembuatan dokumen kependudukan	Jika Kepala Dinas tidak ditempat dokumen tidak dapat disahkan dan tidak dapat diterbitkan. Penggunaan tanda tangan elektronik dokumen akan diterbitkan pada saat itu juga asal ada jaringan internet. Cukup dengan Kadis memasukkan password dimanapun dan kapanpun tanpa menggunakan bolpen, dokumen bisa dicetak dimana saja. Dokumen yang sudah bisa menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagai berikut: kartu Keluarga, Surat pindah penduduk, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengangkatan anak dan Akte Pengesahan Anak.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI		DESKRIPSI INOVASI	
			SEBELUM	SESUDAH		
		7. PEDANG (Pelayanan Sidang Isbat Nikah Masal Bagi Penduduk Yang Beragama Islam)	Membantu legalitas pasangan pengantin beragama Islam	Cukup banyak masyarakat yang beragama Islam belum memiliki buku nikah, mereka hanya menikah secara agama karena keenganan atau ketidaktahuannya atau kekurangan biaya.	Keabsahan pernikahannya terjamin secara hukum.	
3.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian	1. Pembentukan Koperasi Produksi	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Selama ini yang ada hanya koperasi simpan pinjam.	Adanya koperasi produksi, masyarakat bisa belanja lebih mudah dan mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaannya.	
		2. Pendampingan Koperasi dan UKM dengan OAP	Mempercepat proses adopsi program	Pendampingan oleh siapa saja yang ditunjuk, sehingga petugas pendamping kadang kurang memahami karakteristik masyarakat yang didampingi.	Pendamping dari Orang Asli Papua (OAP) sendiri akan lebih mudah menyampaikan program-program karena masyarakat lebih percaya. Pendamping OAP mempercepat proses adopsi.	
4.	Dinas Kesehatan	1. Call Centre Kontrol Bidan di Kampung	Informasi Ibu Anak mudah diakses dari kampung	Mencari informasi Ibu Anak harus datang sendiri ke Kantor Dinas atau Puskesmas. Oleh karena itu, masyarakat malas memeriksa kehamilannya karena jauh lokasi rumahnya.	Mencari informasi Ibu Anak tinggal memencet nomor telepon, informasi yang diminta akan dilayani.	

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI		
			TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM SESUDAH	
		2. Pelayanan Posyandu Terpadu	Pelayanan Kesehatan mudah diakses	Pelayanan terpadu (Posyandu) terbatas Pada pusat-pusat pemerintahannya saja.	Pelayanan terpadu (Posyandu) pada semua distrik dilakukan secara terpadu, berbagai bidang ada pada saat pelayanan.
		3. Paket Persalinan	Merangsang ibu hamil mengontrol kandungannya	Masyarakat enggam memeriksakan kehamilannya secara rutin dan teratur	Insentif Paket persalinan menumbuhkan kesadaran untuk memeriksakan kehamilannya secara teratur. Insentif akan diberikan jika Ibu Hamil mau memeriksakan kandungannya secara teratur.
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	STUTSI.ID	Pelayanan online bantuan beasiswa	Selama ini bantuan keuangan untuk anak yang kuliah diserahkan secara langsung, tetapi banyak terjadi penyimpangan	Inovasi aplikasi online mempermudah, mempercepat dan transparan dalam pengelolaan keuangan.
6.	Dinas Sosial	SIKS-NG (Sisem Informasi Kesejahteraan Sosial Nex Generation)	Mempercepat proses informasi	Menggunakan data manual (dalam bentuk cetakan) dan sering tidak terupdate	Penyaluran bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih tepat sasaran dan terkendali.
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Pengembangan 'Demplot 'Range' Sapi	Mempercepat proses adopsi	Masyarakat umumnya memelihara sapiunya dengan dibiarkan liar.	Inovasi pembangunan range sebagai laboratorium lapangan yang dapat diadopsi masyarakat secara langsung.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI		DESKRIPSI INOVASI	
			SEBELUM	SESUDAH		
		2. Pengembangan Pala sambungan	Kepastian pala berbuah	Masyarakat dalam membudidayakan tanaman palannya menggunakan biji dari pohon induk yang mereka miliki, sehingga tanaman pala yang ditanam banyak yang tidak berbuah, bahkan dapat mencapai 50% tidak berbuah.	Inovasi bibit sambung memberikan kepastian tanaman pala berbuah. Sambungan pala bagian atas berasal dari tanaman pala yang pasti berbuah.	
8.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1. Pengembalian Guru ke Tempat Tugas	Meningkatkan Pelayanan Guru di tempat Tugas	Banyak guru tidak disiplin dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya	Inovasi ini dilakukan dengan cara mengembalikan guru ke tempat tugasnya	
		2. Martikulasi	Meningkatkan kemampuan siswa SD dan SMP dalam bidang Ilmu Eksak sebelum mulai belajar reguler	Banyak siswa SD dan SMP kurang kemampuan pelajaran eksakta.	Inovasi ini dilakukan dengan cara menambah jam pelajaran eksakta sebelum pelajaran reguler.	
		3. Pengelolaan Asrama	Waktu guru dapat focus mengajar	Guru selain mengajar juga mengurus asrama, sehingga mengurangi kinerja guru.	Inovasi pengelolaan asrama diserahkan kepada pihak ketiga, sehingga guru bias focus mengajar.	
		4. Penelolan Beasiswa Online	Pengelolaan bantuan keuangan lancar, tepat sasaran dan transparan	Selama ini bantuan keuangan untuk anak yang kuliah diserahkan secara langsung, tetapi banyak terjadi penyimpangan	Inovasi bantuan beasiswa online mempercepat proses, transparan dan tepat sasaran dalam pengelolaan keuangan.	

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
9.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 2. Pembentukan Kelompok Kebersihan Pantai Ibu-Ibu OAP	Tidak terjadi pencemaran dan limbah B3	Belum ada kegiatan yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan pengendalian limbah B3.	Menjadi salah satu program penting untuk mencegah terjadinya pencemaran dan mengawasi limbah B3. Memberdayakan Ibu-ibu OAP menjadikan pantai selalu bersih dan tepat sasaran pemerataan pendapatan.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
10.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persetujuan untuk mengurus perijinan usaha.	<p>Pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan untuk pengurusan Ijin Prinsip Penanaman Modal, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Ijin Trayek, Surat Ijin Usaha Angkutan, Surat Ijin Pengumpulan Hasil perikanan, Surat Ijin Usaha Perikanan, Surat Keterangan Asal, Surat Ijin Usaha Jaga Konstruksi, IMB, Surat Ijin Praktik Dokter, Surat Ijin Praktik Perawat, Surat Ijin Praktik Bidan, Surat Ijin Kerja Tenaga Kesehatan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Ijin Lokasi, Ijin Operasional/ Mendirikan Klinik, Surat Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik, Surat Ijin Apotek, Surat Ijin Optikal, Surat Ijin Toko Obat/ Pedagang Eceran Obat, Surat Ijin Kerja Bidan, Surat Ijin Kerja Apoteker, Ijin Penyelenggaraan Reklame, dan Ijin Lingkungan.</p> <p>Semua proses perijinan melalui OPD teknis terkait dan membutuhkan waktu yang cukup Panjang.</p>	<p>Semua perijinan hanya melalui satu OPD, tanpa dipungut biaya, waktu pengurusan cepat, bahkan dapat dilakukan secara online. Sistem ini belum sepenuhnya berjalan dikarenakan Tim Teknis (Pemberi rekomendasi Teknis) masih berada dimasing-masing OPD. Sistem ini lebih efisien, Efektif dan mudah aksesnya.</p>

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUANAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
11.	Dinas Perikanan	1. Pembentukan Kelompok Budidaya Rumput Laut	Meningkatkan pendapatan nelayan	Nelayan hanya memungut rumput laut sebagai usaha sampingan saja.	Terbentuknya Kelompok Budidaya Rumput laut pengelolaan usaha lebih baik. Budidaya rumput laut menambah dan meningkatkan pendapatan nelayan.
				Ikan awet dengan biaya murah	Selama ini, ketika melaut nelayan pengawetan tangkapan ikan nya menggunakan es batu. Menggunakan cara ini ikan tidak awet lama dan membutuhkan biaya untuk membeli es batu.
12.	SETDA cq Bagian Organisasi	1. Pembuatan WA Group antar Instansi	Nelayan tidak perlu membawa es untuk melaut	Selama ini, ketika melaut nelayan pengawetan tangkapan ikan nya menggunakan es batu. Menggunakan cara ini ikan tidak tahan lama dan membutuhkan biaya untuk membeli es batu	Nelayan tidak perlu lagi membawa es batu untuk pengawetan hasil tangkapannya. Penggunaan Water Chilling sangat memudahkan nelayan mencari ikan lebih jauh.
				Proses administrasi cepat dan lancar	Penggunaan aplikasi Whatapps dengan membentuk WA Group semua proses persuratan dan komunikasi dapat tersebar secara cepat dan lancar.
13.	Dinas Perhubungan	1. Perijinan Trayek Secara Terpadu.	Tidak tumpang tindih perijinan	Dinas Perhubungan melalui Tim Tennis memberikan Ijin trayek secara manual.	Perijinan trayek secara terpadu pengguna dapat memohon perijinan secara online dan dengan cara ini proses perijinan lebih transparan.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI		DESKRIPSI INOVASI	
			SEBELUM	SESUDAH		
		2. Penertibab Ojeg	Penumpang aman dan nyaman	Akutan penumpang roda dua (Ojeg) tidak ada ijin penyelenggaraan dan tidak terdaftar	Penertiban akutan penumpang roda dua akan memberikan keamanan dan kenyamanan penumpang karena ojegnya sudah terdaftar dan terpantau.	
		3. Penertiban dan perizinan angkutan barang	Angkutan aman dan tertib	Akutan barang tidak ada ijin penyelenggaraan dan tidak terdaftar	Akutan barang akan lebih tertib dan terkendali dalam pemuatannya.	
14.	Badan Penang- gulangan Bencana Daerah	1. Profil Kebencanaan	Antisipasi awal bencana	Tidak ada data base kebencanaan	Tersedianya data base kebencanaan mempermudah mitigasi apabila terjadi musibah/bencana.	
		2. Posyana (Pos Pelayanan Bencana)	Mengurangi korban akibat bencana	Tidak ada Posyana	Adanya Posyana dapat mengurangi korban akibat bencana (perahu karam, pohon tumbang, dll), dalam Posyana ini tersedia alat-alat sederhana untuk antisipasi bencana (seperti, life jacket, radio komunikasi, dll)	
		3. Pegawai Siaga	Mempercepat proses mitigasi dan pertolongan bantuan	Mitigasi dan pertolongan bantuan tergantung tupoksi aparat BPPD	Semua aparat (ASN) BPPD tanpa memandang tupoksi bertanggung jawab secara bersama. Saat ini BPPD karyawannya tidak lebih dari 15 orang.	

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
15.	Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. SIMDA	Memperlancar proses pencairan anggaran	Proses pencairan anggaran sering tersendat	Proses pencairan anggaran lancar
		2. ALADIN	Laporan DAK Non Fisik lancar dan tepat waktu	OPD diminta untuk menyampaikan laporan dalam bentuk tercetak (<i>hardcopy</i>). Proses ini memakan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi.	Inovasi berbasis elektronik online). Dimana setiap OPD dapat mengupload laporan-laporannya, sehingga mudah diakses dan dapat mengurangi waktu proses, serta biaya yang dikeluarkan oleh OPD
		3. OMSPAN	Laporan DAK Fisik lancar dan tepat waktu	OPD diminta untuk menyampaikan laporan dalam bentuk tercetak. Proses ini memakan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi.	Inovasi berbasis elektronik online). Dimana setiap OPD dapat mengupload laporan-laporannya, sehingga mudah diakses dan dapat mengurangi waktu proses, serta biaya yang dikeluarkan oleh OPD
		4. SIMTRADA	Pengecekan transfer dari Pusat	Pengecekan transfer dari Pusat tidak menentu	Pengecekan transfer dari Pusat cepat
		5. SINERGI	Pengiriman laporan keuangan daerah cepat	Proses pelaporan sering tersendat bahkan terlambat.	Pengiriman laporan keuangan daerah cepat dan tidak terlambat
16	Badan Pendapatan Daerah	1. Bayar parkir online	Pembayaran restribusi parkir	Parkir dipungut langsung di tempat parkir, pengelolaan jasa parkir kurang transparan	Restribusi langsung masuk rekening khusus, sehingga mudah dikontrol dan dikelola.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI		
			TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM SESUDAH	
		2. Bayar pelayanan Kesehatan online Puskesmas	Pembayaran restribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas	Pembayaran restribusi dilakukan di loket Pembayaran Puskesmas	Pembayaran restribusi dapat dilakukan dimana saja dan cepat serta pengelolaan restribusi lebih transparan
		3. Perekam data restribusi	Pemasangan alat perekam data transaksi di hotel, restoran, warung makan dan tempat hiburan	Data pungutan restribusi menunggu laporan dari pihak pengelola hotel, restoran, warung makan dan tempat hiburan. Hasil pungutan restribusi tidak akurat karena yang melaporkan pihak terpungut.	Data transaksi dan nilai transaksi terekam alat, sehingga data dan pungutan akurat. Diharapkan dengan alat perekam ini kontribusi dari restribusi meningkat.
		4. Host to Host data	Host to Host data BPN dengan data PBB dan BPHTB	Mengurus pembayaran PBB dan BPHTB harus ke kantor BPN terlebih dahulu. Keadaan ini membutuhkan waktu dan biaya, sehingga tidak efisien dan efektif.	Pembayar PBB dan BPHTB dating langsung ke loket pembayaran, karena data PBB dan BPHTB sudah terkoneksi BPN.
		5. Bayar pelayanan Kesehatan online RSUD	Pembayaran restribusi pelayanan kesehatan di RSUD	Pembayaran restribusi dilakukan di loket Pembayaran RSUD	Pembayaran restribusi dapat dilakukan dimana saja dan cepat serta pengelolaan restribusi lebih transparan
17.	Yayasan 1001 Senja	1. Pendirian Politeknik	Kekurangan tenaga terdidik di kampung-kampung teratasi	Belum ada politeknik dengan jurusan pemerintahan daerah, akuntansi dan agribisnis	Terbangunnya Politeknik dapat meningkatkan kemampuan aparat-aparat kampung dalam bidang manajemen pemerintahan, pengelolaan keuangan, audit internal dan mengelola SDA tanpa meninggalkan Kaimana.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI		
			SEBELUM	SESUDAH	
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pemanfaatan gedung P2TP2A sebagai rumah aman	1. Sebagai tempat persinggahan sementara korban kekerasan bagi ibu/ anak.	Tidak ada tempat yang disediakan oleh pemerintah bagi ibu dan anak bila mengalami kekerasan	Tersedianya rumah aman sementara bagi ibu dan anak untuk berlindung bila mengalami kekerasan.
			2. Pembuatan film pendek mengenai kekerasan seksual pada anak sebagai alat edukasi bagi anak-anak dan masyarakat.	Tidak ada alat edukasi yang dapat merubah pandangan masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak yang menggunakan konteks lokal	Adanya alat edukasi yang dapat didistribusikan secara gratis dan banyak kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual pada anak sehingga dapat mendorong perubahan perilaku pada masyarakat
19.	SAMSAT	1. Program <i>door to door</i> pelayanan pembayaran pajak	Untuk mendorong pegawai lebih tepat waktu masuk dan pulang kantor	Tidak ada <i>punishment</i> dan <i>reward</i> untuk pegawai yang disiplin dan yang tidak disiplin	Pegawai lebih sadar akan perilaku disiplin masuk kantor dan dapat menilai dan dinilai tingkat kedisiplinan mereka
			Mendekatkan pelayanan pembayaran pajak ke masyarakat untuk mengurangi hambatan pembayaran pajak	Masyarakat harus mengantri lama untuk membayar pajak	Petugas mendatangi langsung ke masyarakat untuk membayar pajak, sehingga pembayaran pajak lebih tinggi

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN KAIMANA (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
			TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM SESUDAH
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Pembuatan kebijakan melalui PERBUP	Adanya dasar hukum yang dibuat sesuai dengan kondisi lokal sehingga penggunaan dana kampung lebih terarah, tepat sasaran, memperkecil potensi konflik dan mencegah kerugian negara akibat penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara	Menggunakan SOP dari pusat Diterbitkan 13 PERBUP untuk pengaturan penyaluran dana desa yang mencakup, pembuatan klinik pendampingan, teknis pelaporan, pengadaan barang/jasa, perencanaan, pemilihan kepala kampung, pencairan dana, bidding/ penawaran
21.	Kepegawaian dan Pengembangan SDM	PERBUP tentang Majelis Kode Etik	Mengatur dan menjalankan pengawasan kode etik ASN	Belum ada badan yang mengatur kode etik di Kabupaten Kaimana Terbentuk Dewan Kode Etik untuk menangani pelanggaran kode etik di Kabupaten Kaimana.

LAMPIRAN 7

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN FAKFAK (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SEJUDAH
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	CMS (<i>Cash Management Sistem</i>)	Proses Online Pencairan SP2D	Pencairan selali dilakukan di kantor Pendapatan dan masih bersifat non publik pada tahun 2010 hingga 2017	CMS dibuat tahun 2018, di Bank Papua. SP2D ini kita antar ke bank, bank yang siapkan proses pencairan dan disitu ada ruangan yang siapkan untuk peralatan, begitu sp2d terbit proses langsung cair, jadi pengusaha tinggal cek di rekeningnya saja. Dan itu kalau rekeningnya Bank Papua, jika rekeningnya bank lain tetap kami proses di bank lain dan bisa proses online dengan bank lain, jika rekeningnya Bank Papua langsung kami proses online dari kantor dan tak perlu ke bank lagi.
		Pajak Online	Membayar Pajak dengan cara perekaman di bank (Bank Papua)	Penarikan pajak PBB dan retribusi lainnya biasa dilakukan oleh petugas di lapangan atau lokasi tertentu.	Pajak online hadir di tahun 2019 sesuai dengan PERBUP Nomor 66 Tahun 2019, tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara online di kabupaten Fak Fak. Saat ini pajak online sudah bisa digunakan di bank papua dalam bentuk perekaman pada ruangan yang sudah disediakan oleh Dispenda secara online.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN FAKFAK (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
		Dashboard (500 Item) SP2D	<p>Dashboard berbentuk TV Trone yang berfungsi sebagai list proyek, pencairan anggaran dan perencanaan anggaran proyek.</p>	<p>Pengecekan proyek dan pencairan masih bersifat manual dan dilakukan dengan surat menyurat kepada pemegang anggaran belanja.</p>	<p>Dasboard sistem bersifat informasi tagihan yang masuk, jadi kalau pihak ke 3 mau melihat tagihannya langsung saja di depan pintu masuk kantor (dasboard bersifat video trone). Disitu bisa dilihat posisi tagihannya apa masih di skpd terkait atau di bank, dengan demikian prosesnya SPP, SPM dan sp2d akan kelihatan disitu atau tagihan ini sd spm atau tagihan ini sudah SP2D atau sudah pencairan.</p>
		Aplikasi Drone untuk Pemetaan dan Pemutakhiran data	<p>Pemutakhiran data PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dengan pendataan baru area area komersial</p>	<p>Menggunakan data manual di lapangan atau menarik luasan lahan bangunan baik komersial maupun permukiman penduduk untuk diketahui besaran pajaknya.</p>	<p>sekarang sudah bisa dipetakan menggunakan drone, misalnya zona industri dan area komersial lainnya serta pemukiman penduduk yang ada PBB nya. Sehingga dapat dilihat perbedaan PBB dimana kelas tanah nya hampir sama, nah berikut ini area industri, area komersial lainnya dan area pemukiman kita petakan menggunakan drone sehingga nanti ngo dari masing masing anggaran itu berbeda, otomatis pajak yang diberikan kepada mereka juga berbeda.</p>

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN FAKFAK (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SEKUDAH
2	UPT Samsat	Pembayaran Pajak Kendaran menggunakan aplikasi dari pusat (Dispenda pusat/ Provinsi)	Untuk membayar pajak kendaraan bermotor	Masih menggunakan cara lama seperti tahun sebelum ini yaitu pembayaran dilakukan di kantor UPT Samsat	Masih sama menggunakan cara pembayaran yang sama dengan aplikasi yang diterbitkan dari pusat atau provinsi untuk biaya pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Fakfak.
		<i>Dor to dor</i> (jemput bola)	Untuk membayar pajak kendaraan bermotor	Masih menggunakan cara lama seperti tahun sebelum ini yaitu pembayaran dilakukan di rumah rumah penduduk pada distrik terpencil	Retribusi atau surat pajak serta tunggakan dikeluarkan dicetak dan dibawa ke pemilik kendaraan yang bermukim di distrik terpencil sesuai dengan arahan dari pusat atau provinsi. <i>Dor to dor</i> sudah dilakukan sejak tahun 2018
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Duta Genre (Generasi Berencana)	Meningkatkan sosialisasi dan promosi program genre dikalangan remaja usi produktif 10 sampai 24 tahun agar meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang positif dalam pengembangan dirinya	Pada tahun sebelumnya 2014 sampai dengan 2017 akhir tingkat pemahaman akan kehidupan berencana bagi remaja sangat kurang dan kurang pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, kependudukan dan pembangunan keluarga.	Pada tahun 2019 pertengahan bulan juni telah dilakukan duta Genre (generasi berencana) dimana masyarakat yang mengikuti program tersebut sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap substansi generasi berencana (genre), meliputi bidang kesehatan reproduksi remaja, life skill, penyiapan kehidupan berkeluarga usia terbaik dan pembangunan keluarga.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN FAKFAK (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
		P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Memberdayakan kaum perempuan dan anak dan untuk memudahkan serta mewujudkan akselerasi pelayanan terpadu kepada masyarakat.	Permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan hanya dilakukan oleh satu pihak yaitu pihak kepolisian sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012	Di Kabupaten Fakfak ini kami sudah membentuk tim P2TP2A yang di dalamnya terdiri dari lintas sektoral yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan, serta tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan Lembaga bantuan hukum. Ketika ada kasus terhadap perempuan dan anak kami juga ikut terlibat dalam penanganannya, kami bekerjasama dengan unit PPA Polres Fakfak jika ada kasus mereka melaporkan kepada kami untuk pendampingan sampai persidangan. Kemudian jika ada korban diberikan konseling dan kunjungan rumah, apabila korban membutuhkan kami siapkan tenaga konseling yakni psikolog, dan apabila korban membutuhkan konseling dari agama kami menyediakan Tokoh Agama (Pendeta, Pastor, Imam) Kegiatan tersebut kami lakukan secara terpadu. Kegiatan ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak Nomor 089/237/DP3AP2KB/2019.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN FAKFAK (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
		Forum Anak Daerah	Menjamin anak dalam pembangunan daerah agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan.	Pada tahun 2010 terdapat data atau angka pemberdayaan anak yang sangat turun sekali dimana beberapa data menunjukkan tingkat sekolah anak di daerah terpencil hanya terdapat usia sekolah yang tidak normal dan banyak yang putus sekolah dan berkebutuhan Bersama keluarganya.	Berdasarkan SK Keputusan Bupati Fakfak Nomor 100-267 di bentuklah forum anak yaitu melakukan pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan daya serap dan pola pikir anak akan Pendidikan dan program berencana dalam keluarga. Dimana forum anak mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak di Kabupaten Fakfak yang direncanakan dalam forum anak ini yaitu pada tahun 2020 kami akan membangun taman bermain ramah anak (taman bermain outdoor yang berisikan alat-alat permainan dan buku bacaan edukasi dan medidik) di berbagai distrik potensial perkembangan anak usia produktif Pendidikan.
4	BKPSDM	Mail Marge	Mail marge adalah aplikasi yang terdapat di dalam MS Word dan dikembangkan sebagai bentuk pengerjaan SK secara terstruktur dan terkontrol dalam afektifitas waktu	Pengerjaan SK dan beberapa surat penting dalam setiap OPD di kabupaten Fakfak masih digunakan secara manual dan memakan banyak waktu berhari hari bahkan seminggu untuk bisa diterbitkan jika ada perubahan struktur baik ASN maupun badan yang beroperasi.	Aplikasi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu 1 hari sebelum dikeluarkan untuk digunakan sesuai kebutuhan SKPD yang ada di Kabupaten Fakfak. Inovasi yang bersifat aplikasi ini sudah dijalankan sejak tahun 2003 hingga sekarang 2019.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN FAKFAK (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
		Baperjakat	Baperjakat bertujuan untuk membuat sistem perubahan jabatan pertimbanagan dan kepengkangan secara sistematis dan terpadu serta dapat digunakan bagi OPD lain.	Pembuatan serta perubahan SK jabatan dan pertimbangan masih bersifat manual (ditulis tidak dicetak)	Saat ini Baperjakat dapat digunakan di OPD yang berada dalam Kabupaten Fakfak baik dalam perubahan SK, pembuatan Bagan Struktural dan beberapa pertimbangan yang terdapat didalamnya untuk menyediakan data bagi kepentingan Bupati bersama jajarannya.
5	Dinas Kesehatan	Lembaga malaria center sebagai pusat koordinasi lintas sektor, lintas program untuk penurunan elemnasi malaria. Disamping itu malaria center sebagai pusat Pendidikan, pengetahuan dan pembelajaran tentang penanggulangan malaria sprit jenis parasite, kroscekker. Kami punya laboratorium yang mengkroscek jenis-jenis malaria di kampung-kampung, selain itu kami juga mempunyai unit malaria center itu vector nya nyamuk penelitian nyamuk dan penyuluhan. Kami memiliki peraturan bupati tentang malaria center dan malaria center sendiri hanya dimiliki oleh Kabupaten Fakfak sendiri.	Kabupaten Fakfak dikenal sebagai pusat endemis malaria yang sangat besar dan pemerintah kurang membantu dalam penanggulangannya sejak 2013 akhir.	Dinas Kesehatan	Lembaga malaria center sebagai pusat koordinasi lintas sector, lintas program untuk penurunan elemnasi malaria. Disamping itu malaria center sebagai pusat Pendidikan, pengetahuan dan pembelajaran tentang penanggulangan malaria sprit jenis parasite, kroscekker. Kami punya laboratorium yang mengkroscek jenis-jenis malaria di kampung-kampung, selain itu kami juga mempunyai unit malaria center itu vector nya nyamuk penelitian nyamuk dan bupati tentang malaria center dan malaria center sendiri hanya dimiliki oleh Kabupaten Fakfak sendiri.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN FAKFAK (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN	DESKRIPSI INOVASI
			INOVASI	SEBELUM
				<p>Lembaga ini di luar OPD pemerintahan. Inovasi ini bersifat teknologi tepat guna, Lembaga malaria center ini sd tercatat di tingkat provinsi dalam beberapa inovasi kesehatan. Inovasi tersebut di mulai tahun 2015 dan berjalan hingga kini 2019, dengan adanya Lembaga malaria center Dinas Kesehatan lebih focus kepada penurunan angka penderita malaria itu sendiri dan malaria yang tercatat sekarang sudah turun. Ada beberapa daerah percontohan yang kami lakukan di Kabupaten Fakfak, Lembaga ini diketuai oleh Sekda Kabupaten Fakfak. Lembaga malaria center sendiri menjadi forum koordinasi, instansi lintas sektor, sebagai pusat penelitian dan pengembangan penyakit malaria yang di lengkapi laboratorium serta diseminasi informasi malaria di Kabupaten Fakfak. Ada beberapa produk kesehatan terkait Lembaga malaria center yang bekerja sama dengan UNICEF, globafarm dan kompak (LSM bidang kesehatan) dan juga lembaga donor dari pemerintah. Dan setiap tahun hasil dari malaria itu</p>

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN FAKFAK (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM	DESKRIPSI INOVASI SESUDAH
					<p>sendiri menjadi turun drastis, dari 80/1000 penduduk di tahun 2010 hingga tahun ini 2019 menjadi 5/1000 penduduk yang terkena kasus penyakit malaria, biasa disebutkan dalam Dinas Kesehatan dengan sebutan API (Annual Parasite Insiden) atau angka kesakitan malaria. Untuk pengembangan saat ini dengan KOMPAK itu ada muatan lokal (materi tentang malaria didistribusikan dan dipelajari di sekolah sekolah tingkat distrik) berkerjasama dengan dinas Pendidikan. Jadi disini kami hanya penguatan Lembaga, dan inovasi ini untuk pelayanan publik. Kami berharap ke depan nanti dibuatkan peraturan daerah (PERDA) tentang Lembaga malaria center dan Pemda bisa mendanai Lembaga tersebut. Dari Lembaga malaria center kami di bantu alat (mikroskop) saat disorot dalam layar sebagai pusat belajar dan diskusi antara teman teman yang ada di Puskesmas sendiri. Untuk informasi ke masyarakat kami memproduksi pamflet, foto copy materi atau brosure sebagai diseminasi informasi. Disamping itu juga kami mempunyai program PLA (participatory learning actions) sebagai pemberdayaan masyarakat terhadap malaria dan langsung diskusinya dilakukan di kampung (FGD) untuk mengenal masalah malaria itu sendiri. Mengetahui ciri ciri malaria dan tindakan pencegahannya secara lanjut.</p>

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN FAKFAK (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SEJUDAH
		Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	untuk menghimpun data data yang ada di setiap OPD, misalnya data Kesehatan, data Pendidikan dan lain sebagainya, aplikasi tersebut di buat dari DEPDAGRI dan diaplikasikan di BAPPEDA Kabupaten Fakfak,	Aplikasi SIPD ini sebelumnya sudah dijalankan sejak tahun 2010 hingga dipakai secara terus menerus hingga sekarang (2019red).	Aplikasi ini sangat membantu satuan kerja di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi untuk menghimpun data teknis demi pembangunan daerah Kabupaten Fakfak selama 5 tahun pengembangan.
		Gerbang Kaca (Gerakan Membangun Kampung Bercahaya)	Gerbang kaca bertujuan mengangkat potensi unggulan sumber daya alam atau sumber bahan baku sebagai basis Ekonomi Daerah.	Permasalahan yang di hadapi Pemda Kab Fakfak adalah sampai saat ini bersifat sektoral, yang hanya memberikan solusi secara parsial dengan waktu yang bersifat tempore.	Dengan adanya program pembangunan kampung bercahaya (gerbang kaca) saat ini kampung menuju pada “one space one commodity one village one product” atau satu wilayah satu komoditas, satu kampung satu produk agar tetap lestari dan berkelanjutan. Gerbang kaca ini tertuang dalam RPJMD Fakfak tahun 2016-2021 dan saat ini sedang dijalankan di 142 Kampung yang menjadi sasaran sesuai dengan jumlah komoditi unggulannya.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN TAMBRAUW (2019)				
NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI
			SEBELUM	SESUDAH
1	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	Tangan Tangan Elektronik	Pengganti Tanda Manual Kepala Dinas dalam bentuk barkot	Ketika kepala dinas diluar kota dan Masyarakat mau mengurus surat dan membutuhkan tanda tangan Kepala Dinas harus menunggu 1-2 hari atau Kepala Dinas balik baru. Dengan adanya aplikasi ini, saat ini (2019), meskipun kepala dinas di luar kota, masyarakat lebih cepat dan mudah dalam proses pengurusan surat maupun memperoleh tanda taangan tanpa harus menunggu Kepala Dinas di tempat.
2	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	Kartu Identitas Anak (K/A)	Lebi meringankan anak dalam proses pengurusan sekolah dan perbankan	Formulasi dan komposisi pengurusan identitas anak masi dalam pengurusan manual (list data)
3	Dinas Kesehatan	Sosialisasi Stunting Dalam masyarakat (berupa buku panduan)	Panduan buat masyarakat Agar masyarakat lebih mengerti tentang stunting	Kabupaten Tambrauw merupakan daerah loktus shingga stunting dengan mudah bisa terkena masyarakat
4	Dinas Kesehatan	Duta stunting	Untuk meredam produktivitas stunting	Dengan adanya sosialisasi ini Masyarakat lebih mengerti dan memahami bahaya dari pada stunting Dengan adanya duta stunting, (orang yang mensosialisasikan tentang stunting), Masrakat lebih memahami apa itu stunting dan juga bahayanya.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN TAMBRAUW (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
5	Dinas Perhubungan	Bus Trans Tambrauw	Melayani masyarakat di Kabupaten Tambrauw	Masyarakat di bagian kampung-kampung di Kabupaten Tambrauw sangat susah mengakses Transportasi ke kota (tambrauw), mereka harus menunggu Mobil hilux yang dari kota antar penumpang ke kampung-kampung tersebut, baru mereka ikut ke kota dan itupun juga mereka harus mengeluarkan biaya untuk membayar sewa mobil	Dengan adanya Bus Trans Tambrauw, sangat memudahkan masyarakat terutama bagian-bagian kampung untuk bepergian ke kota tanpa harus mengeluarkan biaya
6	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Perkebunan	Sabun nilam	Mengurangi gatal-gatal kama alergi,luka sayatan dan ibu habis melahirkan	Masyarakat di Kabupaten Tambrauw selama ini ketika mereka ada gatal-gatal atau luka sayatan dan ibu habis melahirkan, mereka membeli obatnya di apotik atau rumah sakit terdekat atau harus turun ke Kota Sorong untuk berobat dan mengeluarkan biaya yang mahal	Dengan adanya sabun nilam ini masyarakat hanya cukup membeli atau mendapatkannya dengan harga Rp.20.000 sdh bisa membantu mengurangi gatal-gatal, luka sayatan dan pada ibu habis melahirkan
7	Dinas pertanian, tanaman pangan dan perkebunan	Minyak Virjin	Parfum (pewangi),	Minyak Virjin ini memiliki banyak manfaat kesehatan kebanyakan masyarakat di Tambrauw belum memahaminya, sehingga mereka lebih memilih minyak lain dengan biaya yang lebih mahal/tinggi.	Setelah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Perkebunan memberikan sosialisasi tentang manfaat dari Minyak Virjin , masyarakat mengerti dan mereka sampe sekarang banyak yang senang memakai Minyak Virjin ini

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN TAMBRAUW (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
8	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Perkebunan	Minyak (pangawet)	sebagai pangawet makanan dan kayu	Kita tau bahwa bahan pangawet saat ini sangat dibutuhkan , apaalgi untuk makanan dan juga kayu, suatu terobosan baru dari dinas membuat minyak pangawet dari sisa-sisa tempurung kelapa untuk digunakan sebagai pangawet makanan dan kayu dengan nilai jual yang rendah. Dengan demikian dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya.	Masyarakat di Kabupaten Tambrauw sangat merospon baik apa yang kami lakukan ini, mereka bisa mendapatkan bahan pangawet , terutama kayu dengan mudah dan biaya yang lebih rendah.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN TAMBRAUW (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM	DESKRIPSI INOVASI	SESUDAH
9		P2TP2A	Memberdayakan kaum perempuan dan anak untuk memudahkan serta mewujudkan akselerasi pelayanan terpadu kepada masyarakat	Permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan hanya dilakukan oleh satu pihak yaitu pihak kepolisian	Di Kabupaten Tambrauw ini kami sudah membentuk tim P2TP2A yang di dalam nya terdiri dari lintas sectoral yaitu dinas pemberdayaan perempuan, kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan, serta tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, lsm dan Lembaga bantuan hukum. Ketika ada kasus terhadap perempuan dan anak kami juga ikut terlibat dalam penanganannya, kami bekerjasama dengan unit ppa polres fak fak jika ada kasus mereka melaporkannya kepada kami untuk pendampingan sampai di persidangan. Kemudian jika ada korban diberikan konseling dan kunjungan rumah, apabila korban membutuhkan kami siapakan tenaga konseling yakni psikolog, dan apabila korban membutuhkan konseling dari agama kami menyediakan tokoh agama (Pendeta, Pastor, Imam) Kegiatan tersebut kami lakukan secara terpadu	

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN TAMBRAUW (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
10		Forum Anak Daerah	Menjamin anak dalam pembangunan daerah agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun social serta memperoleh perlindungan	Pada tahun 2010 terdapat data atau angka pemberdayaan anak yang sangat turun sekali dimana beberapa data menunjukkan tingkat sekolah anak di daerah terpencil hanya terdapat usia sekolah yang tidak normal dan banyak yang putus sekolah dan berkebutuhan keluarga nya	Berdasarkan SK Keputusan Bupati Fakfak Nomor 100-267 dibentuklah forum anak yaitu melakukan pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan daya serap dan pola pikir anak akan Pendidikan dan program berencana dalam keluarga. Dimana forum anak mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan hak hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak di Kabupaten Fakfak. Yang direncanakan dalam forum anak ini yaitu pada tahun 2020 kami akan membangun taman bermain ramah anak (taman bermain outdoor yang berisikan alat-alat permainan dan buku bacaan edukasi dan medidik) di berbagai distrik potensial perkembangan anak usia produktif Pendidikan

LAMPIRAN 9

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. MAsDARUsTA (Masyarakat Sadar Urus Akta)	Mempercepat kepemilikan dokumen	Masyarakat belum memiliki akta kelahiran haus mengurus sendiri ke Dinas. Waktu 1-3 hari.	Pihak dinas melakukan sosialisasi ke kampung-kampung dan dengan bantuan informasi dari Kepala Kampung, RT/ RW dapat didata masyarakat yang belum memiliki dokumen akta kelahiran sehingga dinas menyiapkan
		2. 5-10 Menit Dokumen Jadi	Mempercepat kepemilikan dokumen	Masyarakat harus antri menunggu di kantor, mengurus dokumen dapat selesai antara 1-3 hari.	Masyarakat datang melapor ke petugas dan pengurusan dokumen dapat selesai di hari yang sama.
		3. Pulkaskawin Jamei (Kumpul berkas perkawinan Januari- Mei)	Mengatur dan mempercepat proses perkawinan dengan teratur/ sistem jemput bola	Masyarakat harus datang ke kantor, mendaftar, mengurus dokumen sebagai persyaratan, melengkapi berkas-berkas, menunggu konfirmasi dari dinas untuk pelaksanaan pernikahan catatan sipil.	Pihak Dinas bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama / pihak Gereja untuk mendata pasangan yang belum menikah. Pasangan yang belum menikah mengumpulkan berkas setiap tahun dari bulan Januari – April dan pada bulan Mei diadakan pernikahan Masal di Distrik dan setelah itu dibagikan dokumen.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
			4. Pulang Aklika Mas (Jemput langsung akta kelahiran, kematian, dan nikah masal Pada 6 Distrik	Mengatur nikah masal dan mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan serta perkawinan	Masyarakat harus datang ke kantor, mendaftar, mengurus dokumen sebagai persyaratan, melengkapi berkas-berkas, menunggu konfirmasi dari dinas untuk pelaksanaan pernikahan catatan sipil.
			5. Jam Perku Tiga (Jemput Perakaman KTP dan KK di Kampung terjauh, tertinggal dan terbelakang	Mempercepat kepemilikan dokumen dengan sistem jemput bola	Petugas dari Dinas medatangi distrik 3T untuk melakukan pendataan sekaligus melaksanakan perekaman E-KTP dan masyarakat siap untuk menerima Dokumen tersebut.
2.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kampung Iklim Oransbari	Meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim, dampak sehingga masyarakat melakukan aksi nyata untuk tetap menjaga lingkungan	Masyarakat tidak ramah terhadap lingkungan	Masyarakat menikmati kualitas lingkungan yang asri dan nyaman. Kabupaten Manokwari Selatan pada Oktober 2019 mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu kampung iklim terbaik.
		2. Taman Sekolah	Memberikan Nilai Estetika	Tidak ada taman- taman yang tertata rapi pada sekolah	Terdapat taman sekolah yang indah

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI		
			TUJUAN/ KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM SESUDAH	
3.	Dinas Kominfo	1. Layanan Penyebar Informasi Pembangunan Daerah	Memberikan Informasi kepada Masyarakat yang berada pada distrik distrik yang berada pada jarak yang jauh.	Masyarakat sulit mendapatkan informasi terkait pembangunan daerah dan hiburan.	Petugas mendatangi distrik-distrik dan memberikan informasi serta pemutaran film sebaai hiburan kepada masyarakat; sehingga masyarakat akan datang ke tempat tersebut.
		2. RPD (Radio Pemerintah Daerah)	Memberikan Informasi kepada Masyarakat	Tidak mendapatkan informasi yang terkini yang akurat	Masyarakat boleh menerima informasi melalui gelombang radio

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN RAJA AMPAT (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI SEBELUM	SESUDAH
1	Dinas Perhubungan	Bus Pintar	Sebagai Sarana mobilitas Pelajar (SMP & SMA)	Pelajar seringkali menggunakan angkutan roda dua (ojek) untuk dapat menjangkau lokasi belajar atau sekolah dengan biaya sendiri.	Bus pintar ini dibuat dan disediakan pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai bentuk pengurangan biaya pendidikan dan sebagai sarana penunjang terciptanya suasana pendidikan yang mudah. Bus pintar ini juga dapat menjangkau distrik-distrik terpencil (antar-jemput siswa pelajar) di Kabupaten Raja Ampat. Bus pintar ini sudah beroperasi sejak tahun 2019.
		Angkutan Umum (Mobilitas Kota Waisai)	Melayani rute perjalanan dalam kota waisai	Masyarakat sering menggunakan angkutan roda dua (ojek) dalam mobilitas sehari-hari (PP) untuk menjangkau pasar, tempat pariwisata, dan pusat administrasi pemerintah Kab. Raja Ampat.	Inovasi mobilitas waisai ini sangat mempermudah masyarakat yang ada di Kota Waisai maupun yang datang dan berada di kota tersebut dalam segala aktifitasnya. Angkutan ini berupa roda empat yang dapat menjangkau hampir seluruh pusat Kota Waisai sendiri, inovasi ini sudah ada sejak tahun 2010 hingga saat ini.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN RAJA AMPAT (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI		
			TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM SESUDAH	
		ANDES	<p>Angkutan (Angkutan Pedesaan/ Desa) bertujuan memudahkan penduduk yang bermukim di pedesaan di sekitar distrik waisai agar dapat menuju kota waisai.</p>	<p>Masyarakat sering berjalan kaki atau menggunakan kendaraan proyek (Truk) untuk menuju kota dan masyarakat juga sering menggunakannya sebagai moda pengangkutan barang hasil pertanian maupun mata pencaharian penduduk menuju kota waisai.</p>	<p>Setelah tahun 2018, muncul angkutan andes yang dapat memudahkan masyarakat yang bermukim di luar kota waisai untuk dapat menyalurkan hasil bumi menuju pasar atau tempat tempat wisata yang berada di kota waisai. Andes juga dapat mempermudah mobilitas bagi siswa pelajar menuju sekolah di kota waisai.</p>
2	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Taman Pintar (KARFARKOR)	<p>Tujuan dari di buatkannya taman ini agar masyarakat maupun wisatawan local dan asing, bisa menikmati indahnya kota waisai sambil belajar sosial budaya yang ada didalamnya (telah dibangun juga mini perpustakaan roda dua)</p>	<p>Sebelum ada taman ini (tahun 2017) banyak masyarakat maupun wisatawan yang datang namun tidak singgah dan menetap di kota waisai (mereka di jemput oleh pengelola kotage atau tempat wisata). Sehingga terlihat kota waisai tidak begitu ramai di kunjungi seperti sebelumnya.</p>	<p>Pada tahun 2019, dinas kebersihan dan pertamanan kota waisai melakukan terobosan berupa pembangunan taman yang cukup unik agar dapat menarik masyarakat atau wisatawan yang datang berkunjung ke kota waisai. Dan alhasil di akhir tahun 2019 banyak wisatawan yang memilih untuk stay di kota waisai.</p>

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN RAJA AMPAT (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
			TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	SEBELUM
			SEKESKUDAH	
		Taman Burung (hidup)	Taman burung hidup ini adalah bentuk perencanaan yang akan dibangun pada akhir tahun 2019 dan direalisasikan tahun 2020, guna meningkatkan minat masyarakat untuk tetap stay di Waisai.	Wisatawan asing atau lokal sering meninggalkan kota waisai karena mereka menganggap waisai hanyalah pusat pemerintahan dan tidak begitu menarik sejak tahun 2017 (penurunan skala wisatawan yang menetap di Waisai)
3	Dinas Lingkungan Hidup	Paving Block (bahan दौर ulang sampah)	Menjadi inovasi pendapatan masyarakat (kamp. Saonek sebagai percontohan dalam pembuatan paving block)	Masyarakat hanya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau nelayan
				Inovasi ini masih dalam tahap pembangunan di tahun 2019, dan akan direalisasikan pada tahun 2020, namun pemerintah Waisai sangat antusias dapat menarik minat masyarakat maupun wisatawan agar tetap stay di Kota Waisai. Hal ini dikarenakan taman Karfarfor sudah sangat banyak dikunjungi, maka pembangunan taman lainnya menjadi target utama dalam meningkatkan mutu keberadaan Kota Waisai itu sendiri.
				Ketika dinas lingkungan hidup mencoba untuk menerapkan inovasi दौर ulang sampah (plastic) sebagai paving block di salah satu kampung yang ada di kab. Raja Ampat (Kamp. Saonek/tahun 2019) maka saat itu inovasi ini berubah menjadi salah satu bagian pendapatan bagi masyarakat setempat. Kini inovasi ini lagi dicanangkan untuk mendapatkan SK Bupati agar penerapan dan jijn kelola bisa menyeluruh di seluruh distrik pada Kabupaten Raja Ampat.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN RAJA AMPAT (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
4	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Inovasi Teknologi dan Komunikasi (Si Maya)	Tujuan dari aplikasi ini sebagai Pusat informasi dan sistem administrasi perkantoran maya (si MAYA), yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik dengan memperhatikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.41/PER/MEN. KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.	Informasi akan keberadaan Kabupaten Raja Ampat sangatlah terbatas (masih dalam terapan aplikasi) dan pengurusan surat antar administrasi pemerintah masih menggunakan metode manual (tidak secara online)	Si Maya saat ini sangat berguna membantu sistem administrasi pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam pengelolaan surat surat elektronik secara online (aplikasi berupa website resmi pemerintah). Tahun 2019 aplikasi ini masih bersifat internal instansi, namun sangat berguna.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN RAJA AMPAT (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
5	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Si Cantik (Cloud)	Bentuk inovasi ini adalah aplikasi yang bersifat perijinan nilai jual (android-mobile)	Sebelum adanya aplikasi ini dinas yang bersangkutan masih menggunakan sistem manual (ijin) penggunaan lahan maupun jual beli lainnya (surat cetak dari tahun 2010-2018)	Aplikasi ini adalah bawaan penerapan dari pusat dan sangat membantu dalam pengerjaan ijin di Dinas PTSP Kab. Raja Ampat. Aplikasi bawaan ini baru digunakan pada tahun 2019 dan diaplikasikan secara luas (khusus penggunaannya) aplikasi si Cantik sangat berguna juga sebagai sistem informasi terpadu dengan keterkaitan masalah perijinan, namun kendala jaringan penghubung ke server pusat (jaringan internet Kota Waisai).

LAMPIRAN 11

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN BINTUNI (2019)				
NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI
			SEBELUM	SESUDAH
1	Bappeda	Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Sebagai Pendekatan yang lebih efisien, selektif dan implementatif. Serta digunakan sebagai sistem informasi yang akurat pada Kab. Teluk Bintuni	Setelah adanya SIDA ini maka bidang penelitian dan pengembangan (BAPPEDA) Kab. Teluk Bintuni dengan sangat tanggap melakukan beberapa aplikasi penunjang SIDA yakni salah satunya yaitu informasi tentang penanganan Malaria oleh Dinas Kesehatan, pengembangan AMB (angkutan masyarakat bintuni) oleh dinas perhubungan, pengembangan manusia PZTIM (Pusat Penelitian Teknik Industry Dan Migas) oleh perindakop. Dengan adanya SIDA sangat membantu pemerintah daerah dalam mengekspos data inovasi yang ada saat ini (tahun 2019) berkembang di Kab. Teluk Bintuni.
2	Dinas Perindagkop UKM	Pusat Pelatihan Teknik Industri Migas (PZTIM)	Memberdayakan masyarakat dalam bekerja sejak usia dini. PZTIM juga memprioritaskan OAP sebagai prioritas pekerja utama pada PETROTEKNO Bintuni	Inovasi yang dikembangkan oleh dinas Perindagkop UKM Teluk Bintuni dengan adanya nota atau surat perjanjian kontrak nomor 013/095.B/Bup-TB/VIII/2017 oleh Dinas Perindagkop dan Petrotekno dalam hal perekrutan tenaga kerja dan juga sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia sangat membantu dalam pembangunan di bidang Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni. Hingga kini sudah banyak OAP dan anak nusantara terbaik yang direkrut didalamnya dan siap menjadi pekerja handai di bidang MIGAS dengan kualifikasi kerja (Asia & Eropa)

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN BINTUNI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	
				SEBELUM	SESUDAH
3	Dinas Kesehatan	<i>Early Diagnosis And Treatment</i> (EDAT)	EDAT merupakan kolaborasi antara Pemda, organisasi non-Pemerintah, dan sektor swasta. Program dilaksanakan melalui pembentukan Juru Malaria Kampung (JMIK) atau spesialis malaria yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang identifikasi, pencegahan, dan pengobatan malaria.	Sebelum adanya inovasi ini Pada tahun 2009, penderita malaria mencapai angka 115 per 1000 penduduk.	Setelah diimplementasikan sejak 2010, sistem EDAT berhasil mereduksi wabah malaria. Tahun 2015, kasus malaria ini turun menjadi 2,4 per 1000 penduduk di Papua maupun Papua Barat (bumi cendrawasih). Pada 2017, program ini berhasil mereduksi penyebaran malaria dari angka 9,2 persen ke angka 0,02 persen di 12 desa. Selain mengurangi penyebaran, program ini juga sukses mengurangi tingkat morbiditas malaria dari 115 penderita per 1000 penduduk (2009) menjadi 5 penderita malaria dari 1000 penduduk (2016).
		AIDS Tuberculosis Malaria (ATM)	Inovasi ATM ini dibuat dalam bentuk bangunan untuk mengontrol penderita AIDS, Tuberkolosis dan Malaria agar tetap terkontrol kesehatannya di Kabupaten Teluk Bintuni.	Para perawat dan tenaga medis masih memberikan pelayanan langsung (dor to dor) di kampung terpencil yang sangat sulit dijangkau di Kabupaten Teluk Bintuni sejak tahun 2000 hingga 2018 ini.	Dengan adanya inovasi ATM ini Dinas Kesehatan sudah bisa mengontrol setiap penderita di kampung-kampung terpencil (terdapat bangunan pengontrol) ATM di buat pada Tahun 2019 dan diharapkan terealisasi dengan SK Bupati Kab. Teluk Bintuni pada Tahun 2020.

DESKRIPSI INOVASI KABUPATEN BINTUNI (2019)

NO	NAMA INSTANSI	NAMA INOVASI	TUJUAN/KEGUNAAN INOVASI		DESKRIPSI INOVASI	
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
4	Dinas Perhubungan	Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB)	Memperudah Aksesibilitas Masyarakat yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni (daerah terpencil)	Masyarakat masih menggunakan jasa angkutan umum untuk bisa mencapai pusat kota Bintuni dengan berbagai aktifitas sehari hari.	Inovasi AMB ini di bentuk pada tahun 2015 dan sudah diaplikasikan menyeluruh di berbagai distrik pada Kabupaten Teluk Bintuni, inovasi tersebut sangat berguna dan bermanfaat dalam mobilitas masyarakat dari dan ke pusat Kota Bintuni (distribusi hasil bumi dan administrasi pemerintahan)	

LAMPIRAN 12

INFORMASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) UNIPA				
No	PEROLEHAN HKI	TAHUN PEROLEHAN	JENIS HAKI	KETERANGAN
1	IDS000001633. Alat Pengereng Pati Berbasis Sagu dan Umbi-Umbian Model Fluidized Terfluidisasi (Granted)	2019	Paten sederhana	Granted
2	IDS000001882. Alat Ekstraksi Pati Sagu.	2019	Paten sederhana	Granted
3	P00201809258. Proses Modifikasi Tepung talas dengan Oksidasi dan Iradiasi UV.	2018	Paten	Terdaftar
4	P00201809299. Alat Oksidasi Tepung.	2018	Paten	Terdaftar
5	S00201810642. Alat Pengereng Pati dan Tepung dengan Irradiasi Ultraviolet.	2018	Paten sederhana	Terdaftar
6	S00201811150. Mesin Ekstraksi Pati Sagu Model Pengaduk Berulir.	2018	Paten sederhana	Terdaftar
7	ID P0030110. Proses Produksi Pupuk Fosfat Padat dan Cair dari Tanah Endapan Fosfat Krandalit Ayamaru dan Bahan Organik	2012	Paten	Granted
8	P00201508134. Metode Pembuatan Pupuk Cair dari Bakteri dan Jamur Pelarut Fosfat dan Cara Pemberiannya	2016	Paten	Terdaftar
9	P00201704578. Produk Pupuk Fosfat-Plus Berbasis Jenis Tanaman	2017	Paten	Terdaftar

INFORMASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) UNIPA

No	PEROLEHAN HKI	TAHUN PEROLEHAN	JENIS HAKI	KETERANGAN
10	C00201702895. Potensi Fosfat Alam dan Teknologi Pemanfaatannya	2017	Hak Cipta	Sertifikat
11	WFD2018040744. Dus Kemasan Kue Berbahan Baku Tepung Sagu	2018	Desain Industri	Pendaftaran Online
12	IG))2015000014. Pala Tomandin Fakfak	2016	Indikasi Geografis (IG)	Granted
13	IG002017000008. Kopi Arabika Baliem Wamena	2017	Indikasi Geografis (IG)	Pemeriksaan Substantif
14	No.00140210. Hasil Hutan Bukan Kayu	2019	Hak Cipta	Surat Pencatatan
15	No. 000140208. Dasar-Dasar Penggajian Kayu	2019	Hak Cipta	Surat Pencatatan
16	WFP2018049682. Metode Kuantifikasi Kecepatan Merangkak dan Renang Tukik Penyus Laut	2018	Paten	Pendaftaran Online
17	No. 201912970. Kemitraan PMA dan PMDN dengan UMKM dalam Manajemen Usaha	2019	Hak Cipta	Pendaftaran Online

PROFIL SINGKAT PENULIS

Hendra Marthinus Fatubun, S.Hut.

Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, pada jabatan Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah sejak Tahun 2017 sampai sekarang.

Ezrom Batorinding, S.Hut., M.Sc.

Pernah bekerja sebagai Staf Peneliti pada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2000 – 2016. Dan sejak bulan Januari Tahun 2017 menjadi staf pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, yang saat ini diberi tanggung jawab sebagai Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.

Jhonal Thio, S.Pi.

Bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat sejak Tahun 2017, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Inovasi Teknologi.

Prof. Dr. Roni Bawole, M.Si.

Bekerja sebagai Staf Pengajar/Dosen dan Guru Besar Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua dengan bidang keahlian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut.

Dr. Aser Rouw, SP., M.Si.

Bekerja sebagai Staf Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Papua Barat dengan bidang keahlian Agroklimat dan Perubahan Iklim, dan juga sebagai Dosen Luar Biasa pada program Pasca Sarjana Universitas Papua dan Polbangtan Manokwari.

Dr. Pudja Mardi Utomo, MP.

Bekerja sebagai Staf Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari Papua Barat.

Maria Irene Arim, SP., M.Si.

Bekerja sebagai staf Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Papua dengan bidang keahlian Agribisnis.

Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat substansi buku ini mencakup tiga kategori utama, yaitu: **Informasi Umum**, meliputi: kelompok sumber inovasi, instansi penghasil inovasi, fokus bidang riset nasional, kategori riset, dan kategori area inovasi; **Deskripsi Inovasi**, meliputi: nama inovasi, lembaga inventor, bentuk Inovasi, kegunaan Inovasi; dan **Kualitas Inovasi**. Selain itu, buku ini juga memuat sintesa tentang: kebaruan inovasi, tantangan dan solusi penciptaan inovasi, serta rekomendasi bagi upaya peningkatan penciptaan dan penerapan inovasi di Papua Barat



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lt. 2 dan 3
Jl. Brig. Jen. Mar. (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari
Papua Barat 98312

ISBN 978-623-93246-7-4



9 786239 324674



<http://balitbangda.papubaratprov.go.id>



@balitbangdaPapal



Balitbangda Papua Barat



balitbangda_papua_barat